

KERJASAMA PERTAHANAN AUSTRALIA DAN INDONESIA
PASCA BOM BALI I (2002-2008)

TESIS

NAMA : I GUSTI AYU ARLITA NK
NPM : 0706187735



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
JUNI 2009

**KERJASAMA PERTAHANAN AUSTRALIA DAN INDONESIA PASCA
BOM BALI I (2002-2008)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.si

NAMA : I GUSTI AYU ARLITA NK
NPM : 0706187735



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
JUNI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama I Gusti Ayu Arlita NK

NPM : 0706187735

Tanda Tangan : 

Tanggal : 26 Juni 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : I Gusti Ayu Arlita NK
NPM : 0706187735
Program Studi : Pasca Sarjana
Judul Tesis : Kerjasama Pertahanan Australia-Indonesia Pasca Bom Bali (2002-2008)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister of Science pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Penguji : DR.Edi Prasetyono

Pembimbing : DR.Ikrar Nusa Bhakti

Ketua Sidang : DR.Makmur Keliat

Sekretaris Sidang: Dwi Ardhanariswari Sundrijo S.Sos., M.A.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Juni 2009

KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya mengucapkan beribu syukur kepada Allah karena atas rahmatNya saya bisa menyelesaikan tesis ini. KarenaNya juga, saya menjadi kuat dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan yang muncul selama penulisan tesis ini. Mengingat sedikit ucapan Mario Teguh “ kalau anda kalah dalam bisanya paling tidak anda harus menang dalam beraninya”, saya kemudian berusaha mewujudkan impian saya dalam program Pasca Sarjana jurusan Hubungan Internasional walaupun jalan yang saya tempuh sungguh berliku dan begitu banyak yang harus dikorbankan tapi keinginan yang kuat telah mendorong saya untuk terus berjuang. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini, oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Depkominfo tempat saya bekerja yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti S2 melalui program beasiswa.
2. Kepala BIP Bp Suprawoto, Redaktur Newsroom Ibu Illa, Editor Bahasa Inggris saya Mr.Toni yang telah mengizinkan saya untuk tidak bekerja selama mengikuti program S2.
3. Pusat Diklat Depkominfo yang telah mempercayai saya untuk memperoleh beasiswa.(Maaf ya pak kalau saya tidak berhasil lulus cumlaude, paling tidak saya sudah berusaha)
4. Seluruh teman-teman di lingkungan Badan Informasi Publik Depkominfo yang juga turut mendoakan keberhasilan saya.
5. DR.Ikrar Nusa Bhakti selaku dosen pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktunya di sela jadwalnya yang- padat untuk membantu mengarahkan saya dalam penyelesaian tesis ini.(Terimakasih pak untuk ilmu dan kritiknya)
6. Atase Pertahanan Kedubes Australia Brigadier Ian Errington dan Penasehat Keamanan Paul Iozzi yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dan bersedia membantu mencarikan bahan-bahan yang saya perlukan sehubungan dengan tesis saya .
7. Dirjen Strahan Dephan Bp Syarifudin Tippe yang telah memberikan waktunya untuk diwawancarai (It's very difficult to come into Department of Defence but I

was lucky that I can interview you) juga Kasubdit Hublu Dephan Bp Abdurahman yang telah memberikan penjelasan detil tentang kerjasama dengan Australia.

8. Kedua orang tua saya “ Mami dan Papi tercinta” yang telah memberikan berbagai bantuan dan memberikan kekuatan dalam berbagai masalah yang datang disaat penulisan tesis dan sebelum memulai kuliah.(Even we always have some different opinion but I always respect for both of you!)
9. Suami saya tercinta “ Nurjamali” yang telah mengorbankan banyak hal untuk kepentingan kuliah saya termasuk tidak masuk kerja disaat saya harus ke perpustakaan dan bertemu dosen pembimbing. (Thank’s for everything !)
10. Anak-anak saya tercinta “ Annaba Tama Sabian”, “ Adrian Reramadhan Paiste” dan “ Najwalija Prajabcia” yang telah sangat memberikan inspirasi dalam kehidupan saya selama ini. (You’re my everything !)
11. Kak Jerry dan Mbokgek Reni atas doanya dan adik-adik tercinta “Rena and Ayu” yang juga turut serta menjaga keponakan-keponakannya disaat sedang sibuk-sibuknya menjelang deadline pengumpulan.
12. Orang –orang yang telah menyepelkan dan menganggap saya bukan apa-apa, (This is a fact that I can do something !)

Depok, Juni 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : I Gusti Ayu Arlita NK
NPM : 0706187735
Program Studi : Pasca Sarjana
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Nonklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Kerjasama Pertahanan Australia-Indonesia Pasca Bom Bali I (2002-2008)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya dan selalu tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 Juni 2009

Yang menyatakan



(I Gusti Ayu Arlita NK)

ABSTRAK

Nama : I Gusti Ayu Arlita NK
Program Studi : Pasca Sarjana
Judul : Kerjasama Pertahanan Australia-Indonesia pasca Bom Bali I
(2002-2008)

Australia dan Indonesia telah memiliki hubungan pertahanan sejak lama dan hubungan tersebut tetap berlanjut sampai saat ini. Tesis ini membahas Kerjasama Pertahanan Australia-Indonesia Pasca Bom Bali I periode 2002-2008. Walaupun banyak dokumen yang mengatakan bahwa keterhubungam pertahanan antara kedua negara telah berlangsung sejak jaman kemerdekaan Indonesia tetapi data yang jelas adalah bentuk program kerjasama pertahanan Australia yang dituangkan dalam *Defence Cooperation Program /DCP* dalam *Defence Annual Report*. Program tersebut sudah ada sejak 1972 dan terus berlanjut sampai saat ini. Dimana dalam DCP tersebut dijelaskan besaran dana yang diberikan oleh Australia terhadap negara-negara yang menjadi kepentingannya termasuk Indonesia. DCP juga mengulas tentang bentuk kerjasama pertahanan yang berlangsung seperti latihan bersama, pertukaran dan kunjungan pejabat tinggi. Sebelum 2002, Indonesia sudah menjadi negara yang sangat penting bagi Australia bahkan ketakutan Australia akan ancaman dari utara dan menganggap Indonesialah negara dari dan melalui mana ancaman tersebut akan datang. Tesis ini ingin membuktikan hubungan pertahanan yang ada antara Australia dan Indonesia memang sudah berlangsung sejak lama dan dalam bentuk informal dan hubungan tersebut berlanjut sampai saat ini walau pun begitu banyak masalah yang muncul antara kedua negara. Kembali ke masa PM Keating dimana hubungan sangat dekat antara Australia dan Indonesia terbukti dengan ditandatanganinya AMS 1995 maka saat ini Perjanjian Lombok tahun 2006 menjadi simbol hubungan baik antara kedua negara dan adanya saling percaya. Tesis ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian diharapkan akan dapat berguna sebagai acuan untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai Kerjasama Pertahanan Australia dan Indonesia.

Kata kunci:

Pertahanan, keamanan, kerjasama pertahanan

ABSTRACT

Nama : I Gusti Ayu Arlita NK
Program Studi : Master degree
Judul : The Defence Cooperation between Australia-Indonesia after the 1st Bali Bombing (2002-2008)

The defence relationships between Australia and Indonesia have been conducted for a long time and that relation is still existing until now. This thesis focuses on the defence cooperation between Australia and Indonesia after the 1st Bali Bombing (2002-2008). Although there are many documents that discussed about the defence relationship between the two countries but the accurate information about the defence cooperation program was in 1972 from defence annual report. The fund for each countries that become Australia's strategic was explained on that book. The book also explains about the kinds of cooperation such as exchange students, visits and joint exercise. Before 2002, Indonesia has become a very important country for Australia and Australia thinks that Indonesia was a country from and through the threat would come to Australia. This thesis want to prove the defence relationships between the two countries have been existed for a long time ago even though there were many problems. Back to the Keating era, when Australia and Indonesia signed a security agreement in 1995 called Agreement of Maintaining Security that proved their close relation. Now, both country signed a Lombok Treaty in 2006 that also proved their good relation and they have been trusted each other. This thesis is a qualitative and also analytic descriptive. This thesis is expected to be a reference for other people who want to make a research about the defence cooperation between Australia and Indonesia more detail.

Key words:

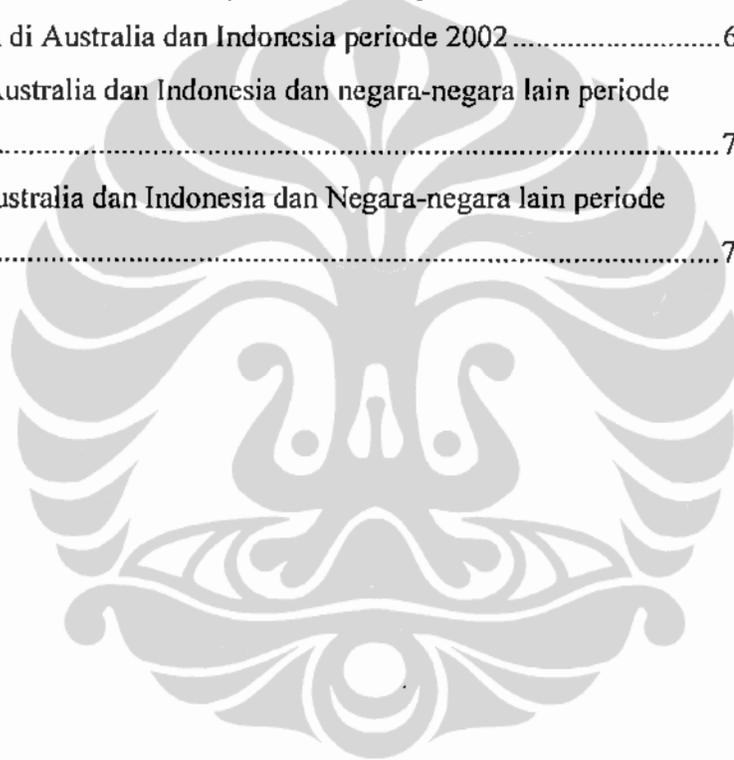
Defence, security, defence cooperation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR ORISINIL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB.I.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Kerangka Teori	11
1.6 Asumsi	19
1.7 Metode Penelitian	19
1.8 Sistem Penulisan	21
BAB.II PERSEPSI AUSTRALIA DAN INDONESIA	22
2.1 Persepsi Ancaman bagi Australia dan Indonesia	22
2.2 Indonesia di Mata Australia	26
2.3 Australia di Mata Indonesia	36
2.4 Hubungan Australia-Indonesia di Bidang Politik, ekonomi dan Budaya	40
BAB.III KERJASAMA PERTAHANAN AUSTRALIA-INDONESIA SEBELUM 2002	48
3.3 Awal Kerjasama Pertahanan Australia-Indonesia	48
3.4 Program Kerjasama Pertahanan Australia dalam <i>Defence Annual Report</i> periode 1998-1999 sampai 2000-2001	56
3.5 Bentuk Kerjasama Pertahanan dalam <i>Defence Cooperation Program/DCP</i> <i>Arrangement of Maintaining Security 1995/AMS</i>	66
BAB.IV KERJASAMA PERTAHANAN AUSTRALIA-INDONESIA SESUDAH 2002	76
4.1 Program Kerjasama Pertahanan Australia dalam DCP periode 2001-2002 sampai 2007-2008	76
4.2 Dialog Strategis Pertahanan Australia-Indonesia 2002-2008	86
4.3 Lombok Treaty 2006	92
BAB.V KESIMPULAN	105
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Latihan Bersama Australia dan Indonesia 1972-1986.....	51
Tabel 3.2 Program Kerjasama Pertahanan periode 1997-1998- 2000-2001	57
Tabel 3.3 Program Kerjasama Pertahanan Australia terhadap Indonesia antara angkatan Bersenjata periode 1998-1999	58
Tabel 3.4 Latihan Bersama Australia dan Indonesia periode 1999-2000.....	60
Tabel 3.5 Kunjungan Royal Australian Navy Ship ke Indonesia periode 2001-2002	64
Tabel 3.6 Pertukaran/pelatihan di Australia dan Indonesia periode 2002.....	65
Tabel 4.1 Latihan Gabungan Australia dan Indonesia dan negara-negara lain periode 2002-2003.....	76
Tabel 4.2 latihan Gabungan Australia dan Indonesia dan Negara-negara lain periode 2005-2007.....	78



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 .Latar Belakang

Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Australia sudah berlangsung sejak 1968 dengan program pemetaan di Indonesia. Kerjasama tersebut berlanjut sampai tahun 1972 dengan cukup banyak program kegiatan yang dilakukan. Salah satunya adalah *Defco (Defence Cooperation)* meliputi kegiatan seperti melakukan latihan perang bersama, patroli bersama, pemetaan bersama dan pertukaran personil. Selama kerjasama tersebut berjalan, Australia menyediakan dana sebesar 10 juta dolar AS setiap tahunnya. Biaya tersebut dipakai untuk pengadaan berbagai peralatan pendidikan serta latihan. Indonesia menerima sejumlah pesawat Nomad untuk TNI-AU, kapal patroli, helikopter Sioux untuk latihan dasar TNI AU, bengkel pemeliharaan pesawat dan alat komunikasi Jip Landrough untuk TNI AD.¹ Pada dekade 1980-an, kerja sama tersebut diwadahi dalam suatu program yang disebut "*Indonesia-Australia Defence Cooperation Program*" (DCP). DCP ini memiliki kegiatan rutin setiap tahun berupa pertemuan yang dilaksanakan secara bergiliran di Australia dan Indonesia serta melakukan latihan bersama.²

Beberapa kerja sama yang telah dilakukan selama ini adalah Latihan Kartika-Kangaro (TNI-AD), Latihan Albatros (TNI AU), Latihan Kakadu, Latihan Cassoary, Passex dan Latihan Cakrawala baru, serta pengadaan kapal patroli dan pesawat Nomad (TNI AL). Kendati kerja sama militer kedua negara sempat terganggu akibat krisis Timor Timur tahun 1999 dengan dihentikannya seluruh kegiatan DCP kecuali program pendidikan, kedua pihak berupaya kembali memperbaiki kerja sama bilateralnya yang ditandai dengan penyelenggaraan pertemuan informal pejabat Dephan RI dan Dephan Australia tahun 2001.³

Sedangkan menurut Billver Singh, kerjasama pertahanan dimulai pada era PM Whitlam tahun 1972. Whitlam menginisiatifkan bentuk kerjasama

¹ Lembaga Informasi Nasional, *Citra Indonesia: Kerjasama Asia Pasifik dan kerjasamu Afrika dan Timur Tengah*, Jakarta: LIN, 2001, hlm.35

² "Dialog Pertahanan Indonesia –Australia Hasilkan 41 Kegiatan Kerjasama", untuk tahun 2008 .
http://www.kemhan.go.id/modul_c.php?nama=News&file_artikel&id=7901 diakses 7 Februari 2009 pukul.14.00 WIB

³ ibid

pertahanan dengan Indonesia yang berkelanjutan dalam program kerjasama pertahanan (DCP).⁴

Australia mengeluarkan dana sebesar A\$20 m untuk *Defence Cooperation Program* periode 3 tahun pertama dari 1972-1975. Tujuan DCP sendiri adalah untuk mengembangkan kemandirian dan kemampuan menangkal ancaman dari luar melalui bantuan teknis, bantuan pelatihan, latihan bersama dan konsultasi berkelanjutan. Dalam DCP tersebut ada beberapa aktifitas yang dilakukan antara lain Australia menyediakan 16 pesawat Sabre. Australia juga mengikutsertakan 1000 personil militer Indonesia dalam pelatihan di William Town Air Base di New South Wales. Aktifitas tersebut menghabiskan dana sekitar A\$6-7m dari A\$20m. Jumlah personil militer Indonesia yang berlatih di Australia semakin bertambah pada 1971 ada 79 personil menjadi 90 pada 1972.⁵

Australia juga setuju melanjutkan proyek pemetaan di Sumatra seluas 26.000 km² yang diharapkan selesai dipetakan pada 1972 dimana pemetaan tersebut melibatkan 80 personil militer Australia.⁶

Bagi Australia, membangun hubungan pertahanan dengan Indonesia merupakan komponen yang sangat penting dalam penguatan hubungan bilateral kedua Negara. Kerjasama pertahanan dengan Indonesia telah membawa keuntungan yang sangat besar bagi Australia khususnya dalam hal pengawasan perbatasan, kerjasama evakuasi korban serta akses terhadap para pengambil keputusan di Indonesia. Hubungan pertahanan ini juga menjadi kerjasama yang sukses dalam menghadapi ancaman teroris internasional serta menghasilkan kerjasama yang berharga setelah kasus Bom Bali 2002 terutama dalam proses evakuasi korban.⁷

Awal dari upaya Australia untuk menstabilkan dan memperkuat hubungan bilateral ini dilakukan oleh Menlu Australia Gareth Evans sejak 1988 melalui pendekatan multidimensional (politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan). Hubungan semakin kokoh dengan dilakukannya kunjungan kenegaraan PM Paul Keating ke Indonesia pada 21-24 April 1992.⁸ Dalam sejarah hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang sering mengalami pasang surut, mantan perdana

⁴ Bilver Singh, *Defense relations between Australia and Indonesia in the post-Cold War Era*, Westport, Conn. Greenwood Pr, 2002, hlm.66

⁵ ibid

⁶ ibid

⁷ Department of Defence Submission, "Inquiry into Building Australia's relation with Indonesia", submission no.92, Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade Foreign Affairs Sub-Committee, 2003, hlm.6-7

⁸ Ikrar Nusa Bhakti, "Kunjungan Keating Memperkukuh Hubungan Bertetangga," *Kompas*, 20 April 1992

menteri Paul Keating (1991-1996) melihat bahwa hubungan bilateral dengan Indonesia merupakan batu sendi yang penting dalam hubungan Australia-Indonesia. Ia menyampaikan dalam sebuah pertemuan di Sydney tahun 1994 bahwa tidak ada satu negara pun yang lebih penting bagi Australia daripada Indonesia.

Dalam *Strategic Basis of Australian Defence Policy* (1968), Australia menegaskan bahwa kawasan Indonesia bisa saja menimbulkan ancaman bagi Australia dan persepsi tersebut berlanjut sampai laporan Dibb "*Review of Australia's Defence Capabilities*" yang dikeluarkan pada tahun 1986. Kenyataannya sejak *Strategic Basis* tahun 1959, 1968, 1971 dan 1976⁹ sudah menekankan pentingnya Indonesia dimata Australia. Australia berusaha menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Indonesia untuk mencegah ancaman tersebut masuk ke Australia. Dalam tesis ini, penulis mengulas bentuk ancaman terhadap Australia dan Indonesia dan juga dokumen-dokumen penting Australia yang membahas masalah tersebut. Penulis yakin hubungan pertahanan tersebut memang sudah terjalin sejak lama dan akan terus berlanjut dimasa depan.

Dalam Buku Putih Pertahanan Australia tahun 1994 "*Defending Australia*" ditegaskan bahwa Australia menggunakan strategi "Pertahanan Jauh ke Depan" melalui *Defence in Depth*. walaupun Australia tidak menyebutkan siapa musuh yang dihadapinya di masa datang, kebijakan untuk membangun jaring-jaring keamanan dengan negara-negara tetangga Utaranya di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan menjadi prioritas selain tetap beraliansi dengan Amerika Serikat. Bahkan sejak dikeluarkan *Australia's Strategic Policy 1997*, kepentingan strategis Australia telah meluas ke wilayah Asia Pasifik. Jaring-jaring kerjasama keamanan ini juga sangat penting untuk mengantisipasi pengembangan kekuatan-kekuatan militer negara-negara besar di Asia khususnya RRC, Jepang dan India.¹⁰

Sementara itu, letak geografis Australia juga menjadi salah satu determinan politik luar negeri Australia. Australia dikelilingi dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan ditinjau dari kepentingan Australia, Australia menduduki posisi yang strategis di wilayah Asia Tenggara. Garis pantai Barat-Laut dan Utara Australia membentuk perbatasan terdekat dengan

⁹ *The Strategic Basis* adalah review internal yang dikeluarkan Australia melalui Komite Pertahanan secara reguler mengenai situasi strategis Australia

¹⁰ Ikrar Nusa Bhakti, Merajut Jaring-Jaring Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia: Suatu Upaya Untuk Menstabilkan Hubungan Bilateral Kedua Negara" Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Asia Pasifik, L.IPI:Jakarta, 2006,hlm.26

kepulauan Indonesia. Sisi utara itulah kunci strategis pertahanan Australia. Pulau-pulau itu tidak dipandang sebagai perisai Australia melainkan sebaliknya sebagai mata rantai lemah dalam pertahanan.¹¹

Hubungan bilateral Australia dan Indonesia mencapai puncaknya pada periode Keating dengan ditandatangani perjanjian keamanan pada 18 Desember 1995 yang memiliki sejarah yang amat penting. Perjanjian tersebut merupakan kerangka untuk mengatasi masalah-masalah yang bersifat tradisional yang akan membahayakan keamanan lingkungan strategis regional.¹²

AMS antara kedua Negara merupakan salah satu mata rantai kerjasama keamanan bilateral yang ada di kawasan Asia Tenggara yang dibangun Australia setelah ANZUS tahun 1952, FPDA atau Five Power Defence Arrangement yang ditandatangani tahun 1971 dan keterlibatan Australia dalam ARF pada 1993.¹³

Perjanjian itu juga mengakui pentingnya jaminan perdamaian dan stabilitas kawasan sebagai cara untuk menjamin adanya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bagi kedua negara. Kedua negara menyepakati bahwa para menteri negara akan secara tetap berkonsultasi mengenai masalah-masalah keamanan; mereka akan saling berkonsultasi jika terjadi tantangan yang sifatnya bermusuhan terhadap kepentingan keamanan bersama, dan mempertimbangkan tindakan individual atau tindakan bersama yang mungkin diambil; dan, mereka akan bekerjasama dalam masalah-masalah keamanan.¹⁴

Keinginan Australia untuk memiliki perjanjian keamanan dengan Indonesia didasari oleh dua hal yaitu pentingnya Indonesia sebagai penyangga yang kuat di Asia Tenggara dan masih adanya anggapan bahwa "Indonesia adalah negara dari dan melalui mana serangan terhadap Australia bisa dilakukan". Karena dalam Buku Putih Pertahanan 1994 yang berjudul *Defending Australia* mengungkapkan bahwa hubungan pertahanan Australia Indonesia adalah yang terpenting di kawasan dan merupakan suatu elemen kunci dalam pendekatan Australia terhadap pertautan pertahanan regional".¹⁵

Kerjasama AMS (*Agreement Maintaining Security*) antara kedua negara merupakan upaya untuk meningkatkan kerjasama pertahanan menjadi lebih

¹¹ Hilman Adil, *Kebijakan Australia terhadap Indonesia 1962-1966: studi kasus keterlibatan Australia dalam konflik bilateral*, Jakarta: CSIS, 1997, hlm 2

¹² Hilman Adil, *op.cit.*, hlm.78

¹³ Ikrar Nusa Bhakti, "Merajut Jaring-Jaring...", hlm.9

¹⁴ Data dari Lembaga Australia-Indonesia, www.dfat.gov.au/ai/publication/babi1.html. Jdi diakses tanggal 10 Maret 2009 pukul 22.00 WIB

¹⁵ Ikrar Nusa Bhakti, "Politik Luar Negeri Australia" dalam Zainuddin Djafar (Ed) *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tuntutan Masa Depan*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1996, hlm. 154

tertata dan bertahap dan juga mengikat. Namun kerjasama itu dihentikan secara sepihak oleh Indonesia, kecuali program pendidikan karena keterlibatan Australia dalam persoalan Timor-timur pasca jajak pendapat.¹⁶

Seiring dengan perubahan dinamika lingkungan strategis di tingkat global, regional maupun domestik, persepsi dan hakekat ancaman berkembang. Sebagai konsekuensinya dari adanya perkembangan dinamika dan lingkungan strategis, pendekatan dan kebijakan pertahanan dan keamanan negara perlu disesuaikan untuk menghadapi perkembangan tersebut.¹⁷

Persepsi mengenai kemungkinan adanya ancaman dari dan melalui Indonesia tersebut membuat Australia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tetangga yang sangat penting dalam kepentingan strategis Australia. Letak Indonesia yang berada di Utara Australia dapat menjadikan Indonesia sekaligus sebagai penyangga dan juga ancaman bagi Australia. Bentuk ancaman apapun baik tradisional maupun non tradisional dianggap oleh Australia bisa datang dan melalui Indonesia. Sebagai contoh, pada era perang dingin, Australia sangat takut pada bahaya komunis dan serangan militer dari Uni Soviet, RRC dan negara-negara Indochina yang merupakan satelit Uni Soviet. Karena itu kerjasama pertahanan Indonesia-Australia menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya serangan dari Utara.

Saat ini tidak ada negara yang mampu berdiri sendiri untuk memenuhi kepentingan nasional mereka. Dalam waktu yang sama tingkat kerapuhan yaitu tingkat sensitifitas terhadap perkembangan internasional makin tinggi, di satu sisi hal ini membuka peluang bagi negara untuk melakukan kerjasama untuk mencapai kepentingan mereka. Tetapi perlu juga diperhatikan adanya perkembangan-perkembangan global yang negatif yaitu adanya kejahatan lintas nasional (*transnational crimes*) yang makin sulit di atasi, melemahnya batas nasional masing-masing negara, dan bahkan munculnya sentimen-sentimen komunalisme dan primordialisme akibat tekanan kekuatan globalisasi. Keamanan nasional menjadi lebih kompleks karena masalah-masalah politik dan ekonomi dalam negeri saat ini terkait dengan masalah-masalah *transnational security threats*, misalnya *terrorism, drug trafficking, illegal migration, money laundering,*

¹⁶ Ikrar Nusa Bhakti "Bantuan Luar Negeri Australia di bidang Keantanan" dalam Adriana Elizabeth (Ed), *Bantuan Kebijakan Luar Negeri Australia kepada Indonesia*, Jakarta: P2P LIPI, 2004, hlm. 55-56

¹⁷ Theo L. Sambuaga, *op. cit*

Disampaikan pada Launching IODAS & Diskusi Publik "Pertahanan Dan Keamanan Negara Merupakan Tulang Punggung Bangsa dan Negara", 25 Agustus 2008, Hotel JW. Mariot, Jakarta.

http://www.Indonesia.com/theo_l_sambuaga.html diakses 15 April 2009 pkl.01.19 WIB

pemalsuan uang, *illegal small arms transfer*, penyebaran senjata pemusnah massal baik nuklir maupun kimia, dan terorisme.¹⁸

Pada dasawarsa terakhir disadari bahwa potensi dan persepsi ancaman tidak lagi didominasi oleh bentuk ancaman yang sifatnya tradisional yang lebih menitik beratkan pada ancaman negara dari ancaman militer negara lain, akan tetapi persepsi tentang potensi ancaman yang sifatnya non-tradisional juga semakin mengemuka. Potensi ancaman negara digambarkan juga berasal dari berbagai elemen dan aktor yang sifatnya non-state dan non-militer. Aksi teror WTC New York membawa dampak luas pada perubahan paradigma tentang potensi ancaman bagi suatu negara oleh *non-state actor*.¹⁹

Tahun 2001, sejak serangan bom tersebut terjadi perubahan yang signifikan dalam memandang ancaman terhadap keamanan internasional dimana bentuk ancaman yang bersifat tradisional/militer berubah menjadi ancaman yang bersifat non tradisional yang para aktornya sebagian besar bukan negara. Perubahan lingkungan strategis inilah yang menyebabkan Australia memperbaharui Buku Putih Pertahanannya "*Australia's National Security: a Defence Update 2003* ", jelas dinyatakan bahwa serangan teroris di New York, menunjukan bahwa tak ada satu negarapun yang bisa lepas dari rasa takut yang ditimbulkan oleh teroris internasional. Dalam buku tersebut, Australia mengidentifikasi tiga ancaman utama yaitu terorisme global, WMD dan konflik kawasan.²⁰

Dalam buku "*Strategic Defence Review 2005*" Departemen Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa ancaman militer tradisional yaitu bombardemen atau berupa penggunaan senjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain bisa dilakukan oleh Australia karena Australia memiliki kekuatan udara yang canggih. Agresi juga merupakan salah satu bentuk ancaman tradisional dimana Australia dianggap sebagai salah satu negara yang mampu melakukannya. Dalam buku tersebut juga dinyatakan bahwa kerjasama bilateral bidang pertahanan diprioritaskan juga dengan Australia dimana kerjasama bilateral ini diarahkan untuk membangun rasa saling percaya dan memecahkan masalah keamanan yang mendesak untuk ditangani bersama. Tujuan utama

¹⁸ Edi Prasetyono, "Perkembangan Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia", http://www.preparia.or.id/download/Paper%20Diskusi/perkembangan_internasional_dan_kennas_mda_per_1_dj_b_01 diakses 24 Februari 2009 pukul 22.00 WIB

¹⁹ Theo L. Sambuaga, *op.cit*

²⁰ Commonwealth of Australia, *Australia's National Security: A Defence Update 2003*, Canberra ACT:Department of Defence, 2003

adalah mewujudkan stabilitas kawasan multi lapis di tingkat regional dan global untuk mendukung kepentingan Indonesia.²¹

Setelah kasus bom Bali I, isu teroris nampaknya menjadi salah satu isu kontroversial di berbagai belahan dunia karena mengacu pada anggapan bahwa para teroris tersebut adalah kaum muslim. Sehingga terjadi sedikit pertentangan antara kaum muslim dan barat padahal terlihat disini bahwa sistem internasional yang terbentuk tidak lagi didasarkan atas konsep kedaulatan nasional yang sempit dan kaku, melainkan akan dibentuk oleh masalah –masalah transnasional baik bidang politik maupun ekonomi. Ada kecenderungan kuat bahwa konflik yang terjadi tidak hanya konflik antar negara (*between states*), melainkan konflik antar negara dengan *non-state actor* yang kemudian mempengaruhi hubungan antar negara. Di dalam konteks ini, kasus teroris menjadi menjadi isu dominan hubungan internasional.²²

Di Australia sendiri, kekhawatiran akan teroris telah muncul pada saat terjadinya serangan WTC September 2001. Serangan tersebut telah mempengaruhi banyak aspek dalam sistem internasional dan hubungan internasional walaupun tidak mengubah semuanya secara fundamental. Bisa dikatakan serangan WTC tersebut menjadi awal kampanye melawan teroris bagi Australia.²³

Keamanan nasional menjadi lebih kompleks dan Australia merasa harus bekerjasama dengan negara-negara lain baik dalam konsep bilateral , regional maupun multilateral dalam menangani masalah teroris karena sifatnya yang lintas batas. Perubahan bentuk ancaman dari ancaman tradisional sebelum 2001 berubah menjadi ancaman nontradisional atau transnasional membuat Australia mengubah kembali buku putih pertahanannya.

Serangan teroris di Bali Oktober 2002 menjadi latar belakang pentingnya stabilitas Indonesia dalam kepentingan strategis Australia. Akan lebih baik jika Indonesia berada dalam keadaan stabil dan kuat sehingga mampu menghadapi ancaman terorisme regional daripada Indonesia tidak stabil dan lemah sehingga akan mempengaruhi keamanan Australia sebagai negara tetangganya.²⁴

²¹ Departemen Pertahanan RI, *Menata Sistem Pertahanan: Kaji Ulang Pertahanan*, Jakarta: Dephan, 2005, hlm. 18-19

²² Edi Prasetyono, *op. cit.*, hlm. 2

²³ The Australian Strategic Policy Institute, *Australia's defence after September 11: a quick guide to the issues*, Australia: ASPI, July 2002 . www.aspi.org.au diakses 16 Maret 2009 pukul 11.00 WIB

²⁴ Department of Defence Submission, *loc. cit.*

Kasus bom Bali I 2002 berdampak sangat besar pada hubungan Indonesia dan Australia. Australia kehilangan banyak warga negaranya bahkan Australia memasukan Indonesia sebagai salah satu negara yang dilarang untuk dikunjungi dan menganggap Indonesia sebagai negara sarang teroris tetapi kemudian topik ini menjadi menarik untuk diteliti karena ledakan bom Bali ternyata tidak mempengaruhi hubungan pertahanan kedua negara. Kedua negara tetap melakukan dialog strategis pertahanan yang membahas isu-isu internasional yang muncul dan juga bekerjasama dalam berbagai hal. Australia juga tetap memberikan bantuan dalam *Defence Annual Reportnya* kepada Indonesia.

Tetapi satu hal yang sangat penting, isu terorisme yang membawa Australia dan Indonesia menandatangani *Framework Agreement on Security Cooperation* atau perjanjian Lombok tahun 2006 untuk memperkuat kerjasama keamanan kedua negara. Perjanjian ini dibuat untuk mengatasi ancaman dalam bentuk ancaman asimetris dan nontradisional dimana didalamnya terdapat 9 pokok kerjasama keamanan yaitu kerjasama keamanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, kerjasama interlijen, kerjasama maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, proliferasi senjata pemusnah masal, kerjasama tanggap darurat, kerjasama di organisasi internasional yang terkait masalah keamanan.²⁵

Australia berusaha mengembangkan kerjasama keamanan dengan Indonesia dan terlihat dari adanya Lombok Treaty tersebut dan Dialog Strategis Pertahanan antara Dephan Australia dan Indonesia yang menjadi acara rutin tahunan sejak 2001 sampai 2008. Walaupun tidak dapat disangkal bahwa kerjasama pertahanan antar Australia dan Indonesia sudah dimulai sebelum 2002 dalam bentuk informal dan AMS (*Agreement of Maintaining Security*) yang ditandatangani tahun 1995 sebagai bentuk legalnya.

Lingkungan strategis pasca bom Bali mengarahkan kerjasama pada level kunjungan pejabat senior pada akhir 2002 dan awal 2003. Dialog diperkuat dengan kunjungan Kepala Staf Angkatan Udara Australia pada Agustus 2002 dan keikutsertaan angkatan bersenjata kedua negara dalam forum menteri Australia-Indonesia pada Maret 2003. Terjadi peningkatan bantuan kerjasama

²⁵ Lihat pasal-pasal dalam perjanjian keamanan antara Australia-Indonesia yang ditandatangani di Lombok tahun 2006

pertahanan Australia terhadap Indonesia periode 2002-2003 menjadi \$5,131m dari sebelumnya \$. 3,355m pada periode 2000-2001²⁶

Kerjasama Pertahanan yang menjadi fokus penelitian adalah kerjasama pertahanan dalam *Defence Cooperation Program/DCP* dan bentuk dialog strategis pertahanan antara ADF dan TNI dari tahun 2002-2008. Dirjen Strahan Dephan, Syarifudin menambahkan bahwa dialog strategis pertahanan ini berusaha untuk mengaktifkan semua elemen dari kedua negara termasuk berdialog dengan para pejabat tinggi atau kolonel termasuk adanya kunjungan pejabat senior Australia ke Indonesia. Selain itu, dialog strategis ini mencakup usaha untuk memperkuat hubungan antara IDU (*Indonesia Defence University*) dan *Australian Defence College*.²⁷

Sedangkan menurut Kasubdit Hublu Dephan Abdurrahman, yang melatar belakangi kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara tetangganya adalah karena Indonesia terletak diposisi silang yang memungkinkan banyak negara asing yang melewati daerah kedaulatan dan yuridiksi Indonesia. Selain itu ia juga menyetujui soal rambu-rambu dari Deplu untuk hidup berdampingan secara damai dan berusaha meminimalisir potensi konflik.²⁸

Dialog strategis pertahanan I²⁹ (*Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue*) dimulai tahun 2001 di Bali dimana diadakan pertemuan informal antara Dephan dan ADF yang membahas masalah situasi global dan regional yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan Australia-Indonesia. IADSD I juga menekankan pentingnya CBM (*Confidence Building Measures*) antara kedua negara untuk mencegah kerugian disalah satu pihak. Dialog strategis pertahanan tetap berlanjut hingga 2008 dan menjadi rencana tahunan dari kedua negara.

Kerjasama pertahanan AMS tahun 1995 merupakan konsep kerjasama keamanan yang legal antara kedua negara tetapi dihentikan karena ikut campurnya Australia dalam masalah Timor sedangkan *Lombok Treaty* tahun 2006 merupakan kerangka kerjasama keamanan yang mengikat kedua negara dalam berbagai bidang. Tetapi yang menjadi masalah adalah dalam perjanjian tersebut masih kurang detil dibahas apa yang harus dilakukan dan tidak dalam bidang pertahanan sehingga menyebabkan perjanjian tersebut bersifat umum

²⁶ Defence Annual Report 2002-2003, hlm. 177

²⁷ Wawancara dengan Dirjen Strahan Dephan Mayjen Syarifudin Tippe S.ip, M.si tanggal 24 Februari 2009 pkl 10.25

²⁸ Wawancara dengan Kasubdit Hublu Dephan Abdurrahman tanggal 24 Februari 2009 pkl 10.45

²⁹ Laporan hasil pertemuan informal Indonesia-Australia (IADSD) dari Dirjen Strahan Dephan.

³⁰ www.dephan.go.id diakses 20 Februari 2009 pukul 14.00 WIB

dan kurang mengikat bagi Australia. Hal itu menyebabkan dari pihak Australia meminta Indonesia untuk membuat kerangka kerjasama pertahanan yang mengikat *IDefence Cooperation agreement* dimana saat ini kerangka tersebut masih dalam proses negosiasi antar substansi³⁰

Pertanyaan dari kapan suatu ancaman menjadi suatu pokok persoalan keamanan nasional, tergantung bukan hanya kepada bentuk dan ancaman tersebut dan bagaimana negara penerima memperhatikannya tetapi juga pada intensitas dan pada operasi ancaman tersebut.³¹

Menurut May Rudi ancaman ada 5 macam yaitu ancaman militer, politik, sosial, ekonomi, dan ekologi. Ancaman militer merupakan hal yang paling menakutkan dalam sejarah sebuah bangsa. Tak hanya unsur-unsur vital yang akan hancur tapi unsur-unsur ekosistem serta unsur kehidupan sosial politik akan mengalami akibat yang lebih fatal. Tingkatan ancaman militer terhadap suatu negara bervariasi tergantung dari apa yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Tujuan ancaman juga beragam, mulai dari persoalan minor sampai perbedaan paham yang dianut negara lain.

Menurut penulis, hubungan Australia dengan Indonesia adalah salah satu hubungan yang paling penting di bidang politik luar negeri Australia terutama hubungan di bidang pertahanan. Hubungan pertahanan sudah berjalan cukup lama sebelum 2002 dengan adanya latihan bersama, saling kunjung antara pejabat militer kedua negara serta diskusi pertahanan bilateral. Hubungan itu dikukuhkan dalam *Agreement of Maintaining Security* pada tahun 1995. Hubungan pertahanan antara Australia dan Indonesia tetap berjalan walaupun terjadi krisis Timor bahkan makin erat pasca serangan teroris di Bali tahun 2002 yang memiakan korban dari kedua negara dibuktikan dengan ditandatanganinya *Lombok Treaty* 2006.

Penelitian lain yang serupa adalah Tesis yang berjudul "Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Australia dan Indonesia (1995-1996): Studi kasus Pembatalan persetujuan Pemeliharaan Keamanan oleh Arif Rahman Kunjono. Tetapi yang membedakan adalah, Kunjono fokus pada perjanjian AMS 1995 sesuai dengan periode yang diambilnya. Sedangkan tesis Angel Damayanti yang berjudul "Tinjauan Paradigma Hubungan Internasional dalam Perjanjian Keamanan RI-Australia tahun 2006" fokus pada Perjanjian Lombok dimana ia

³⁰ Wawancara dengan Kasubdit Hublu Dephan Abdurahman tgl 24 Februari 2009 pkl 11.00

³¹ T.May Rudi, *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2002, hlm.36

mengulas latar belakang, isi dan implikasi Perjanjian Lombok dari persepsi kedua negara. Ia juga menjabarkan paradigma HI yang ada dalam Perjanjian tersebut. Kedua tesis tersebut sesuai dengan periodenya yang sama adalah mereka sama mengulas tentang perjanjian keamanan antara Australia-Indonesia.³²

Dari ulasan di atas bisa dikatakan bahwa Kebijakan Pertahanan Australia selalu didasarkan pada *threat oriented*. Dalam *strategic Basis dan Defence White Paper*, Australia selalu menjelaskan tentang ancaman yang akan dihadapi baik berupa ancaman invasi militer negara lain atau perubahan konsep ancaman setelah 2002 menjadi ancaman simetris atau non tradisional. Australia tetap mengulas keahawatirannya pada ancaman yang mengancam keamanan kawasannya. Sehingga Australia berusaha memperkuat jaring-jaring keamanannya dengan negara-negara tetangganya.

Tetapi pertahanan Australia juga tidak lepas dari faktor geostrategik seperti yang dikatakan Thomas Durrell Young bahwa perencanaan pertahanan tidak lepas dari empat faktor dan salah satunya adalah faktor geopolitik dan geostrategik.³³

Sedangkan penulis sendiri memfokuskan tesis ini pada hubungan pertahanan antara Australia dan Indonesia periode 2002-2008 dan bentuk program kerjasama pertahanan Australia bagi Indonesia. Walaupun didalam tesis ini penulis mengulas AMS 1995 dan Lombok Treaty 2006 tetapi hanya sebagai perbandingan bukan sebagai fokus kajian. Penulis lebih tertarik dengan hubungan pertahanan yang sudah berjalan sejak lama dan terus berjalan walaupun berbagai isu muncul dalam hubungan tersebut tetapi fakta menunjukkan hubungan dibidang militer tetap ada walaupun terjadi penurunan aktifitas. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana faktor geostrategik dan diplomasi pertahanan berpengaruh pada kebijakan pertahanan Australia.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah serangan bom Bali I mempengaruhi kerjasama pertahanan antara Australia dan Indonesia?

³² Lebih lanjut lihat Arief Rahman Kunjono, "Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Australia dan Indonesia (1995-1996): Studi kasus Pembatalan persetujuan Pemeliharaan Keamanan," Fisip UI: Jakarta, 2000 dan Angel Damayanti, "Tinjauan Paradigma Hubungan Internasional dalam Perjanjian Keamanan RI-Australia tahun 2006," Fisip UI: Jakarta, 2007

³³ Thomas Durrell Young, "Threat Ambiguous Defence Planning: The Australian Experience," a final report, Strategic Studies Institute, US Army War College: 1993, hlm.v

2. Sampai sejauh mana kerjasama pertahanan Australia dan Indonesia berlangsung dan bagaimana prospek hubungan di bidang pertahanan kedua negara?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ingin mengetahui:

1. Tentang pentingnya posisi Indonesia bagi Australia dan sebaliknya
2. Hubungan Australia dan Indonesia di bidang pertahanan sebelum 2002 dan membandingkannya dengan setelah 2002
3. Perbedaan Perjanjian Keamanan Australia dan Indonesia (AMS) 1995 dengan *Lombok Treaty* 2006
4. Kerjasama pertahanan antara Departemen Pertahanan kedua negara dalam bentuk dialog strategis pertahanan dari 2001-2008
5. Bagaimana Australia menjadi suatu contoh proyek nyata dari gabungan faktor geostrategik, diplomasi pertahanan dan kebijakan pertahanan

1.4 Manfaat penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi para peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini lebih dalam.
2. Penelitian ini diharap dapat memberikan input kepada pemerintah dalam membuat kebijakan luar negeri terhadap Australia

1.5. Kerangka Teori

Sedangkan konsep yang digunakan sebagai panduan dalam penelitian ini sesuai dengan judul tesis: Kerjasama pertahanan Australia-Indonesia Pasca Bom Bali (2002-2008) adalah konsep *defence relationship*, *security relationship* dan tahap kerjasama pertahanan menurut Brigadier A.J.Molan yang dibagi menjadi 4 tahap yaitu *Latent stage*, *Initial stage*, *Intermediate stage* dan *Mature stage*³⁴, Definisi dan jenis-jenis ancaman untuk menjelaskan ancaman apa saja yang dihadapi oleh Australia dan Indonesia, konsep keamanan menurut Barry Buzan untuk menjelaskan bentuk kerjasama *Lombok Treaty* serta diplomasi

³⁴ Brigadier A.J.Molan, "The Australian-Indonesian Defence Relationship", Canberra: Australian College of Defence and Strategic Studies, August 1997, hal 3-5 dikutip Ikrar Nusa Bhakti, "Bantuan Luar Negeri Australia di bidang keamanan" dalam Adriana Elizabeth (Ed), *Kebijakan Bantuan Luar Negeri Australia kepada Indonesia*, Jakarta: P2P LIPI, 2004 hlm. 62-63

pertahanan/militer dalam menganalisa bentuk *Defence Cooperation Program* Australia dalam dialog strategis pertahanan antara ADF dan TNI.

Dalam berbagai literatur Studi Keamanan, masalah pendefinisian konsep "keamanan" menjadi salah satu topik perdebatan yang hangat, setidaknya sampai berakhirnya Perang Dingin. Dalam hal ini, perdebatan akademik mengenai konsep "keamanan" ini berkisar seputar dua aliran besar, yakni antara definisi strategis (*strategic definition*) dan definisi non-strategis ekonomi (*economic non-strategic definition*). Definisi yang pertama umumnya menempatkan "keamanan" sebagai nilai abstrak, terfokus pada upaya mempertahankan independensi dan kedaulatan negara, dan umumnya berdimensi militer. Sementara, definisi kedua terfokus pada penjagaan terhadap sumber-sumber ekonomi dan aspek non-militer dari fungsi negara.³⁵

Ia menyebutkan ada lima 5 sektor keamanan, yaitu, sektor militer (*military security*), sektor politik (*political security*), sektor ekonomi (*economic security*), sektor sosial (*societal security*) dan sektor lingkungan (*environmental security*). Dimana dalam prakteknya ke lima sektor tersebut saling bersinggungan satu sama lain. Untuk dimensi militer, Buzan menyatakan bahwa dimensi militer dari keamanan berurusan dengan kapabilitas pertahanan suatu negara. Menurut Buzan:

*"The security of human collectivities is affected by factors in five major sectors: military, political, economic, societal and environmental. ..., military security concerns the two level interplay of the armed offensive and defensive capabilities of states, and states' perception of each other's intentions. Political security concerns the organizational stability of states, systems of government and the ideologies that give them legitimacy. Economic security concerns access to the resources, finance and markets necessary to sustain acceptable levels of welfare and state power. Societal security concerns the sustainability, within acceptable conditions for evolution, of traditional patterns of language, culture and religious and national identity and custom. Environmental security concerns the maintenance of the local and the planetary biosphere as the essential support system on which all other human enterprises depend. These five sectors do not operate in isolation from each other. Each defines a focal point within the security problematique, and a way of ordering priorities, but all are woven together in a strong web of linkages"*³⁶.

³⁵ Abdul-Monem M. Al-Mashat, "National Security in the Third World", Colorado.: Westview Press, 1985, hlm. 19 dikutip Rizal Sukma, *Konsep Keamanan Nasional*, Jakarta: CSIS, 2002

³⁶ Barry Buzan, *People, State & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, 2nd edition (New York: Harvester Wheatsheaf, 1991). Hlm. 19-20

Konsep Buzan ini sangat sesuai dengan Perjanjian Lombok yang ditandatangani oleh kedua negara pada 2006. Dalam perjanjian tersebut tidak hanya mencakup aspek pertahanan dan keamanan secara tradisional saja tetapi mencakup aspek yang lebih luas yaitu penegakan hukum, pemberantasan terorisme, kerjasama intelijen, kerjasama maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, proliferasi senjata pemusnah masal, kerjasama tanggap darurat, kerjasama di organisasi internasional yang terkait masalah keamanan.

Sedangkan menurut Stewart Firth, pertahanan dan keamanan saling berhubungan. Keamanan merupakan konsep menyeluruh termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan dan kesejahteraan dari suatu bangsa. Sedangkan pertahanan lebih ke perlindungan wilayah atau memajukan kepentingan nasional suatu bangsa. Diplomasi, perdagangan, investasi, imigrasi, intelijen dan hubungan politik dengan negara lain bisa masuk kedalam konsep menyeluruh dari keamanan dimana hal-hal tersebut bisa membuat lingkungan Australia aman. Pertahanan hanya salah satu dari elemen keamanan Australia yang tidak menjadi satu-satunya elemen penting pada era 1990an karena Australia memperkirakan bahwa dengan diplomasi internasional mereka bisa menjaga keamanan nasional Australia sama seperti dengan menggunakan kekuatan militer.³⁷

Bisa dikatakan konsep *security* menurut Buzan dan Firth memiliki kesamaan pandangan dimana keamanan tidak hanya pada segi pertahanan saja tetapi mencakup banyak hal.

Menurut Molan (1997), secara sederhana suatu keterhubungan pertahanan (*defence relationship*) merupakan ikatan jaringan antara dua atau lebih negara melalui angkatan-angkatan bersenjata nasionalnya dan badan-badan penelitian, pengembangan dan industri pertahanan dan birokrasi pertahanan. *Defence relationship* merupakan suatu elemen atau subordinate dari keterhubungan keamanan (*security relationship*). Keterhubungan keamanan sendiri bersifat luas bukan saja mencakup keamanan tetapi juga perdagangan, diplomasi, budaya dan bidang –bidang kehidupan nasional lainnya. Jika *defence relationship* merupakan wilayah kegiatan menteri pertahanan, departemen pertahanan dan angkatan bersenjata maka *security relationship* mencakup ketiga lembaga yang bertanggung jawab dalam hal pertahanan tersebut juga mencakup

³⁷Stewart Firth, "Defence and Regional Security," dalam *Introduction to Australian Foreign Policy*, Crows Nest, N.S.W: Allen & Unwin, 2005, hlm. 154

departemen-departemen pemerintahan lainnya (Adriana Elizabeth (Ed),2004,hlm.62-63).

Defence relationship dilakukan atas dasar aktifitas maupun dialog tingkat tinggi pada tingkat menteri dan panglima angkatan bersenjata. *Defence relationship* dikatakan lemah apabila terdapat sangat sedikit atau tidak ada sama sekali kegiatan atau aktifitas kerjasama militer. Sebaliknya, dikatakan kuat apabila ada saling kunjung antar pejabat-pejabat senior dan adanya saling menghormati yang terjadi sebagai hasil dari aktifitas dan dialog tersebut.

Sedangkan, Menurut Sudarsono, konsep pertahanan memang berakar dari kuatnya pengaruh konsep negara-negara yang lahir dan mekar selama abad ke-19 dan meluas dengan pertumbuhan negara-negara baru pada tahun 1940-1970an. Pertahanan terutama dikaitkan dengan masalah pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan wilayah. Cara kita menilai serta menghadapi tantangan lingkungan itu akan mempengaruhi cara kita merangkai konsep pertahanan keamanan dalam masa-masa yang akan datang.³⁸

Negara-negara bangsa akan membangun suatu keterhubungan pertahanan untuk berbagai alasan dan keterhubungan pertahanan antara negara-negara tetangga dirancang untuk tiga hal penting yaitu: menambah pendalaman kekekuatan pada pertahanan bangsa, membantu kemampuan pertahanan suatu bangsa dan memperbaiki keamanan regional dan global.³⁹

Seperti disebutkan diatas ada 4 tahapan kerjasama pertahanan⁴⁰ menurut Mollan yaitu *Latent stage*, *Initial stage*, *Intermedial stage* dan *Mature stage*. *Latent Stage* ialah tahap dimana negara-negara memiliki potensi untuk membangun suatu *defence relationship* tetapi tidak ada hubungan tersebut, mungkin karena tidak adanya keuntungan yang dirasakan seperti hubungan Australia dan RRC. *Initial Stage* ialah hubungan pertahanan yang terjadi pada saat awal dimana hubungan dikelola atas dasar hubungan personal antar individu seperti pertukaran atase militer atau kunjungan pejabat senior. *Intermediate Stage* yaitu tahap antara *Initial Stage* dan *Mature Stage* dimana ada mekanisme untuk menangani aktifitas-aktifitas yang jangkauannya penting dan banyak tetapi masih ada kekhawatiran penting yang berkaitan dengan koordinasi. Hubungan Australia dan Indonesia dalam kerjasama pertahanan saat

³⁸ Juwono Sudarsono, Lingkungan Internasional dari Pertahanan-Kecamatan Indonesia dalam *Ekonomi, Politik dan Strategi*, Jakarta: Gramedia, 1995, hlm. 333-334

³⁹ Adriana Elizabeth (Ed), *op cit.*, hlm.64

ini termasuk dalam tahap ini. Yang terakhir adalah *Mature Stage* dimana pada tahap ini defence relationship sudah bisa diterima dan stabil, ada sejumlah aktifitas penting dan mekanismenya sudah sangat terbangun seperti hubungan Australia dan AS.

Konsep lain yang digunakan adalah Diplomasi Pertahanan⁴¹ untuk menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama pertahanan antara kedua negara. Secara tradisional peran militer atau kekuatan pertahanan ditujukan untuk pertahanan Negara baik melalui fungsi-fungsi penangkalan, pertahanan, intervensi militer maupun sebagai instrumen pemaksa terhadap pihak lain. Diplomasi pertahanan di masa lalu ditujukan untuk menggalang kerjasama dengan sekutu strategis atau aliansi atas dasar-dasar pertimbangan real politik dan kepentingan pertahanan nasional. Saat ini, Diplomasi Pertahanan mencakup pertama, upaya untuk membantu membina hubungan dengan negara-negara bekas musuh dan untuk mengembangkan apa yang disebut CBM (*Confidence Building Measures*). Kedua, Diplomasi Pertahanan juga ditujukan untuk membantu mengembangkan hubungan sipil-militer yang demokratis yang ditandai dengan supremasi otoritas politik atas militer dan pembentukan tata pemerintahan yang baik di bidang pertahanan. Ketiga, Diplomasi Pertahanan juga digunakan untuk memberikan sumbangan kepada upaya-upaya perdamaian dunia seperti misi-misi operasi perdamaian dunia. Diplomasi Pertahanan juga bisa membentuk persepsi bersama tentang suatu masalah dan *mind-set* militer negara lain.

Pada dasarnya kerjasama pertahanan merupakan bagian dari diplomasi pertahanan. Prinsip-prinsip umum mengenai kerjasama pertahanan harus diperhitungkan oleh pejabat-pejabat yang terlibat didalam komitmen kerjasama pertahanan kedua negara. Di dalam rumus-rumus hukum diplomatik juga harus mencermati jika ada kepentingan-kepentingan yang ada di belakangnya, seperti tekanan ekonomi dan tekanan politik. Kerjasama pertahanan tidak mengubah kebijakan politik dengan negara lain, dan kerjasama ini dapat menopang upaya pemerintah dalam mengembangkan sains dan teknologi, khususnya di bidang industri pertahanan. Selain itu, Pemerintah harus berpegang teguh pada prinsip persamaan terhadap keuntungan bersama, penghormatan terhadap kedaulatan

⁴¹ Edy Prasetyono, *Defence Planning*, <http://www.indonesia.com/defense/ptf/09.html> diakses 15 April 2009 Pukul 15.00 WIB

masing-masing negara dan dapat bermanfaat bagi peningkatan kapasitas dan kemampuan pertahanan Indonesia secara komprehensif.⁴²

Diplomasi Pertahanan juga berarti berperan aktif menjaga danelihara perdamaian, mengirim pasukan dlm kerangka PBB serta meningkatkan kemampuan manajerial & operasi dan membangun Pusat Misi Perdamaian,penyebarluasan kebijakan pertahanan (*CBM*),aktif dalam organisasi regional & internasional, memiliki *good will*, memberikan bantuan & mengatur kepentingan negara sahabat dlm kerangka pertahanan dan keamanan di dalam negeri, melakukan pertukaran prajurit, mengadakan atau ikut serta dalam seminar, workshop & berbagai pertukaran tenaga ahli serta membangun dan meningkatkan kemampuan dan kekuatan TNI dlm rangka penugasan Perdamaian.⁴³

Sedangkan Australia menggunakan konsep Diplomasi Militer⁴⁴ yang mencakup hubungan militer, kerjasama pertahanan, latihan bersama dan bentuk perjanjian. Hubungan Militer termasuk konferensi, seminar, *working group* dan kunjungan-kunjungan pejabat militer dari berbagai level. Kerjasama Pertahanan adalah bentuk formal dari Diplomasi Militer Termasuk didalamnya pelatihan-pelatihan yang didanai oleh Australia terhadap Angkatan Bersenjata Negara lain. Selama periode 1999-2000, Australia telah memberikan bantuan kepada 19 negara dimana kerjasama pertahanan ini mendukung tujuan strategis Australia yaitu berkontribusi untuk mempertahankan keamanan regional, bekerjasama dengan aliansi dan patner lainnya di kawasan regional dan memperkuat dan mengembangkan pertahanan dengan negara-negara di kawasan regional. Serta membuktikan keberadaan Australia di kawasan regional terhadap isu-isu internasional. Penulis sendiri merasa yakin bahwa konsep diplomasi pertahanan dan diplomasi militer antara Australia dan Indonesia sama dan hal tersebut merupakan bagian dari *defence relationship* antara kedua negara.

Pada periode tersebut, Australia telah berpartisipasi dalam 45 latihan bersama dengan negara lain seperti AS, Inggris, Kanada, Selandia Baru,

⁴² Deddy Djamaaluddin Malik, "Peran DPR-RI dalam Kerjasama Pertahanan", makalah disampaikan sebagai pengantar dalam Workshop *The Current Status of Indonesia's Defense Diplomacy*, 29-30 November 2007 yang diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan RI-Lesperssi-DCAF Switzerland

⁴³ Marsekal Pertama TNI Parulian Simamora M.Sc dalam Seminar "Current Status Of Indonesia's Defence Diplomacy Workshop" Jakarta, 28 – 29 November 2007, Direktur Kerjasama Internasional, Ditjen Strategi Pertahanan, Dephan, 2007

⁴⁴ Nicholas Maclellan, "Defence Cooperation Program South Pacific", <http://www.globalcollab.org/Nautilus/australia/australia-in-pacific/defence-cooperation-program> diakses 10 Maret 2009 pkl 11.00 WIB

Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunai Darusalam, Papua, Jepang, Korea selatan dan Cili.

Masalah pertahanan dan keamanan merupakan dua bidang yang berbeda sekaligus memiliki saling keterkaitannya. Seiring dengan perubahan dan perkembangan lingkungan strategis di tingkat global, regional maupun domestik, persepsi dan hakekat hakekat ancaman berkembang seiring dengan dinamika yang ada. Sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan dinamika dan lingkungan strategis, pendekatan dan kebijakan pertahanan dan keamanan negara perlu disesuaikan untuk menghadapi perkembangan tersebut.

Pertanyaan dari kapan suatu ancaman menjadi suatu pokok persoalan keamanan nasional, tergantung bukan hanya kepada bentuk dan ancaman tersebut dan bagaimana negara penerima memperhatikannya tetapi juga pada intensitas dan pada operasi ancaman tersebut.⁴⁵

Menurut May Rudi ancaman ada 5 macam yaitu ancaman militer, politik, sosial, ekonomi, dan ekologi. Ancaman militer merupakan hal yang paling menakutkan dalam sejarah sebuah bangsa. Tak hanya unsur-unsur vital yang akan hancur tapi unsur-unsur ekosistem serta unsur kehidupan social politik akan mengalami akibat yang lebih fatal. Tingkatan ancaman militer terhadap suatu Negara bervariasi tergantung dari apa yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut..⁴⁶

Sedangkan menurut Paul Monk, Australia menghadapi tiga macam ancaman yaitu: pertama, ancaman yang berhubungan dengan sistem negara, kedua, ancaman dari dalam negara dan terakhir, ancaman dari luar.⁴⁷

Ancaman pertaman adalah ancaman yang muncul dalam kerangka institusi bisa berupa ancaman dalam sistem sosial yakni: ancaman politik bisa berupa partai-partai politik dan sistem pemerintahan federal, hukum bisa berupa hukum bagi teroris atau imigrasi ilegal, ekonomi bisa berupa nilai investasi dan hutang, sitem pajak dan sistem hubungan industri, pendidikan bisa berupa birokrasi kebijakan pendidikan, persaingan di pasar global dan sosial berupa ancaman nilai dan kemampuan dalam sistem kesehatan dalam lingkungan saat ini seperti pandemik. Ancaman kedua adalah ancaman dari dalam yaitu ancaman

⁴⁵ T. May Rudi, *op.cit.*, hlm.36

⁴⁶ *ibid.*, hlm.35

⁴⁷ Paul Monk, *Threats to Australia's Future Security and Prosperity*, Melbourne: Austhink Consulting Pty Ltd, 2006, hlm.5-6, www.austhink.com diakses 28 April 2009 pkf.22.00 WIB

yang muncul dari dalam tata sosial seperti berbagai macam konsekuensi dari kegiatan ekonomi, perubahan demografi, kebiasaan atau pola gaya. Masalah-masalah tersebut menjadi ancaman pada saat negara tidak bisa menstabilkan masalah tersebut atau tidak menanganinya dengan baik sehingga menjadi masalah yang sangat serius seperti penyebaran penyakit. Ancaman ketiga adalah ancaman dari luar berupa ancaman diluar yuridiksi Australia sendiri seperti serangan teroris, krisis ekonomi global, bencana alam, invasi dari negara lain atau penyakit menular.

Secara umum, berdasarkan pendekatan sumber ancaman, maka ancaman dapat dibagi ke dalam tiga tipe yaitu ancaman internal, ancaman eksternal dan ancaman internal-eksternal. Ancaman internal adalah ancaman yang berasal dari dalam negara, seperti pemberontakan dan konflik komunal. Sementara ancaman eksternal adalah ancaman yang berasal dari luar negara, yang seringkali diidentikan dengan ancaman dari negara lain atau negara musuh. Sementara ancaman internal-eksternal merupakan ancaman yang tidak dapat dipastikan secara tepat sumbernya, seperti serangan terorisme global. Ketiga ranah ancaman tersebut tidak berdiri terpisah satu dengan yang lainnya melainkan saling terkait membentuk jaring-jaring ancaman.⁴⁸

Sedangkan Rizal Sukma menyatakan dari segi bentuk, ancaman menjadi semakin rumit dan kompleks. Pada saat kemungkinan ancaman invasi militer secara langsung dari sebuah negara ke negara lain mengalami penurunan, ancaman asimetris menjadi semakin menonjol, seperti yang terlihat dari semakin besarnya ancaman terorisme lintas batas negara dan lintas kewarganegaraan. Sejak berkembangnya teknologi, khususnya teknologi militer, dan juga karena globalisasi, ancaman mengalami perubahan yang cukup mendasar, baik dari jenis maupun bentuknya. Dari segi jenis, ancaman militer dan non-militer dapat menimbulkan efek yang sama dahsyatnya bagi penjagaan "nilai-nilai inti" sebuah negara.⁴⁹

⁴⁸ Institute for Defence and Security and Peace Study (IDSPS), Kebijakan Umum Keamanan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 14, www.idsp.org diakses 16 April 2009 pkl. 02.34 WIB

⁴⁹ Rizal Sukma, Keamanan Nasional: Ancaman dan Eskalasi, CSIS, Jakarta, 2003, www.csis.org/id diakses 16 April 2009, pkl. 14.00 WIB

1.6. Asumsi

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kerjasama Pertahanan antara Australia dan Indonesia sudah dimulai sebelum kasus Bom Bali 2002
2. Kebijakan pertahanan Australia lebih ke *threat oriented*
3. Isu teroris menjadi prioritas ancaman bagi pertahanan Australia setelah 2002
4. Serangan Bom Bali 2002 telah mengubah hubungan kerjasama keamanan antara Australia dan Indonesia menjadi lebih kooperatif.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis yaitu memaparkan penjelasan-penjelasan, data-data dan berbagai informasi lain yang tercakup dalam variabel yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini kemudian dijelaskan juga keterkaitan antara variabel yang ada dan digambarkan dalam model analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan dari berbagai sumber yang telah diseleksi seperti buku, majalah, artikel, jurnal ilmiah, surat kabar, makalah seminar, skripsi, data dari internet dan dokumen yang dikeluarkan oleh suatu institusi tertentu untuk mendapatkan data sekunder dan melalui wawancara untuk mendapat data primer yang bersumber dari para informan yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang diinginkan peneliti. Informan-informan yang dipakai untuk penelitian ini adalah Atase Pertahanan dan Penasehat Keamanan Kedutaan Australia di Jakarta yang mengetahui hubungan pertahanan Indonesia dan Australia sebelum Bom Bali I dan sesudahnya yang dituangkan dalam bentuk kerjasama. Informan yang juga penting adalah Dirjen Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan yang terkait dengan kerjasama pertahanan ADF dan TNI dalam dialog strategis pertahanan serta Kasubdit Hubungan Luar Negeri Dephan yang menjelaskan bentuk kerjasama tersebut. Pejabat lain dari Departemen Luar Negeri yang diharap bisa memberikan informasi tentang kerjasama keamanan khususnya *Lombok Treaty*.

Teknik wawancara semi formal juga digunakan dimana rancangan wawancara yang dipakai sudah ditentukan fokusnya tetapi tidak menghindari jawaban yang lebih luas yang di berikan oleh para informan.

1.8. Sistematika Penulisan

Peneliti membagi penulisan menjadi lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah mengapa penulis mengangkat masalah kerjasama pertahanan Australia dan Indonesia, permasalahan, kerangka teori, metodologi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data primer dan sekunder serta sistematika penulisan.

Bab II memuat persepsi Australia dan Indonesia yang antara lain berisi persepsi ancaman bagi Australia dan Indonesia; Australia di mata Indonesia; Indonesia di mata Australia dan hubungan kedua negara di bidang politik, ekonomi dan budaya.

Bab III memuat Kerjasama Pertahanan Australia dan Indonesia sebelum Bom Bali 2002 meliputi: Awal kerjasama pertahanan Australia-indonesia; bentuk kerjasama pertahanan dalam DCP; program kerjasama pertahanan Australia dalam Defence Annual Report (DCP) periode 1998-2001; termasuk kerjasama pertahanan pada 1980an serta perjanjian keamanan (AMS)1995.

Bab IV memuat Kerjasama pertahanan Australia dan Indonesia setelah Bom Bali 2002 yang terdiri dari: kerjasama pertahanan dalam DCP periode 2002 sampai 2008; kerjasama pertahanan antara ADF dan TNI dalam bentuk dialog strategis pertahanan dari tahun 2002-2008; perjanjian *Lombok Treaty* tahun 2006 yang didalamnya akan dibahas latar belakang perjanjian, isi dan implikasi *Lombok Treaty* terhadap kedua negara.

Bab V, Memuat kesimpulan akhir yang dapat ditarik berdasarkan uraian penjelasan dan hasil-hasil pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II. PERSEPSI AUSTRALIA DAN INDONESIA

Hubungan Australia-Indonesia dalam berbagai bidang selalu berubah. Pola hubungan ini dipengaruhi oleh persepsi masing-masing negara dan juga gaya kepemimpinan pemimpin politiknya. Bab ini akan difokuskan pada: pertama, persepsi ancaman bagi kedua negara. Kedua, persepsi kedua negara yang melatarbelakangi kerjasama pertahanan Australia dan Indonesia. Penulis akan mengulas Indonesia di mata Australia berdasarkan *The Defence White Paper* dan *The Strategic Basis, The Strategic Review* dan *Australia Foreign and Trade Policy White Paper*. Ketiga, pandangan Indonesia tentang Australia, penulis akan menggunakan Buku Putih Pertahanan 2003 Indonesia serta Kaji Ulang Pertahanan 2005⁵⁰. Ketiga, akan diulas hubungan kedua negara dalam bidang ekonomi, politik dan kebudayaan sebelum kasus Timor dan sesudahnya dimana akan terlihat pola hubungan yang turun naik.

2.1. Persepsi Ancaman bagi Australia dan Indonesia

Bagi Indonesia sendiri, Dalam Buku Putih Pertahanan (BPP) Departemen Pertahanan 2003 dinyatakan, sasaran penyelenggaraan pertahanan negara adalah untuk "menghadapi dan mengatasi ancaman keamanan tradisional dan nontradisional". Kemungkinan ancaman tradisional dalam waktu dekat, agresi dan invasi, dinilai kecil. Namun, untuk kepentingan pembangunan postur pertahanan secara komprehensif, potensi ancaman tradisional perlu dijabarkan secara operasional. Kalaupun kecil kemungkinan akan adanya ancaman agresi dan invasi terhadap Indonesia, ancaman berupa infiltrasi dan intrusi (pelanggaran wilayah) kekuatan asing ke wilayah yurisdiksi Indonesia, seperti pernah terjadi di atas Pulau Bawean, tidak dapat diabaikan begitu saja. Manuver itu jelas mengancam tegaknya kedaulatan Indonesia, yang dinyatakan sebagai tujuan utama pertahanan negara.

⁵⁰ Buku Putih Pertahanan Indonesia 2003 merupakan buku yang berisi pernyataan kebijakan pertahanan negara untuk menghadapi tugas-tugas pertahanan di masa datang yang disusun berdasarkan tujuan dan kepentingan nasional dihadapkan pada perkembangan konteks strategis dan kondisi obyektif bangsa. Sedangkan Kaji Ulang Pertahanan 2005 merupakan proses kegiatan yang dilakukan terus menerus dengan memperhatikan konteks strategis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk merumuskan kebijakan pertahanan yang melibatkan Dephan, Mabes TNI, Mabes AD dan departemen terkait serta litbang partai.

Dalam konteks strategis, diperkirakan ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan Indonesia dimasa datang.⁵¹ meliputi: terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri, gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri, konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konflik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas. Ancaman juga bisa berupa kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, pencucian uang dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya, kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain, gangguan keamanan laut seperti pembajakan dan perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem, gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara, perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya, bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa

Menurut Theo L.Sambuaga bahwa berbagai potensi ancaman yang dihadapi Indonesia adalah karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kepulauan nusantara terdiri dari sekitar 17.000 pulau dengan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang memiliki berbagai titik kerawanan. Jika dikaitkan dengan berbagai potensi dan hakekat ancaman yang ada, perpaduan pada *land-based defence* dan *maritime-based defence* menjadi keharusan mengingat masing-masing pijakan tersebut juga membawa perbedaan konsekuensi strategis. Ia menekankan Indonesia untuk mampu menghadapi potensi gangguan ancaman yang besar terhadap laut dan pantainya termasuk sumber daya alam yang ada di sekitarnya.⁵²

Sedangkan bagi Australia, potensi ancaman muncul dari arah Utara dan Indonesia termasuk salah satu diantaranya. Tanggal 9 Maret 1950 P.C.Spender,

⁵¹ Buku Putih Pertahanan Indonesia 2003, *op.cit.*, hlm.48-49

⁵² Theo L.Sambuaga, *op.cit*

yang waktu itu menjadi Menteri Luar Negeri Australia menyatakan bahwa: Politik luar negeri sesuatu negeri pertama-tama dan selamanya harus memperhatikan situasi geografis negeri tersebut. Dan kepentingan Australia yang pertama dan selamanya adalah mengamankan tanah air dan menjaga perdamaian di kawasan yang secara geografis melingkungi Australia. Australia juga dipandang sebagai pulau-benua yang dikitari dua samudera diketiga sisinya. Dalam hal ini, Irian dengan pulau-pulau yang berdekatan dengannya membentuk atap bagi garis pantai utara Australia. Sisi utara itulah kunci strategis pertahanan Australia dan ada kekhawatiran bahwa keamanan Australia akan terancam apabila pulau-pulau itu jauh ketangan musuh.⁵³

Strategic Basis 1963 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak stabil tetapi memiliki potensi kekuatan yang sangat penting. Dinyatakan dalam:

*Standing between the mainland of Asia and Australia, Indonesia is an unstable but potentially important power. The future alignment of that country will therefore be of the greatest importance to Australia's security.*⁵⁴

Sedangkan dalam Strategic Basis 1964 dinyatakan ketakutan Australia akan gerakan komunis di Indonesia:

Sukarno's current attitude and policies are leading him steadily into a closer association with the communist powers and away from the United States and United Kingdom, and he may find it difficult to arrest this process if he should wish to do so. The process may be accelerated if the Western position suffers further setbacks in South Vietnam or elsewhere in Asia.

Pernyataan tersebut jelas mengatakan bahwa Indonesia adalah ancaman bagi Australia dimana Indonesia lebih dekat ke komunis daripada Amerika Serikat dan Inggris. Sedangkan Australia sangat bergantung pada AS dan Inggris. Bahkan setelah Sukarno meninggalpun, di Indonesia masih terjadi konflik antara PKI dan TNI.

Dalam *Strategic Basis of Australian Defence Policy* (1968), Australia menegaskan bahwa kawasan Indonesia bisa saja menimbulkan ancaman bagi Australia. Dinyatakan dalam:

⁵³ Hilman Adil, *Kebijakan Australia terhadap Indonesia 1962-1966: Studi kasus keterlibatan Australia dalam konflik bilateral*, Jakarta: CSIS, 1997, hal 1-3

⁵⁴ *Strategic Basis of Australian Defence Policy* 1963, hlm..7

*It is from or through Indonesia that the possibility of hostile action against Australia or its Territories is most likely to arise. Never to be forgotten is the possibility that Indonesia could over a short period increase her military capacity if a major power were prepared to provide military aid as the USSR did in the past*⁵⁵

Dibb and Smith menyatakan bahwa dalam rencana pertahanan Australia telah dinyatakan akan ancaman dari dan melalui kepulauan sebelah utara dan ini didasarkan pada pengalaman pada Perang Dunia ke II dimana Jepang menggunakan Indonesia dan PNG sebagai tempat melakukan serangan terhadap Australia.⁵⁶

Australia menganggap Indonesia adalah dari dan melalui mana ancaman akan datang ke Australia dan ditegaskan lagi dalam *Strategic Basis* bahwa ketakutannya akan Indonesia tersebut membuat Australia membangun kekuatan pertahanannya. "one more reason why the capability of the forces we develop from now on should be versatile enough to meet a possible future threat from Indonesia"⁵⁷

Arti penting Indonesia bagi Australia juga disebutkan didalam *Strategic Basis* 1973 dimana dinyatakan Indonesia adalah Negara dari dan melalui mana ancaman militer terhadap Australia akan datang:

*Indonesia is of the greatest strategic significance to Australia because of its position. The Indonesian archipelago imposes a substantial sea and air barrier between Australia and mainland South East Asia; it is also the country from or through which a conventional military threat to the security of Australian territory could most easily be posed. Australia's relations with Indonesia are of profound and permanent importance to Australia's security and national interest.*⁵⁸

Pada tahun 1960an dan awal 1970an, sebuah polling menyatakan bahwa hanya 10% masyarakat Australia yang menganggap Indonesia sebagai ancaman. Tetapi pada awal 1980an, karena tindakan Indonesia dalam kasus Timor-Timor, Indonesia menjadi ancaman nomor dua setelah Uni Soviet. Setelah perang dingin berakhir, Australia menganggap Indonesia sebagai ancaman terhadap keamanan Australia dan tahun 1993, 57% orang Australia percaya

⁵⁵ *Strategic Basis of Australian Defence Policy – 1968*, hlm.58-59 dikutip Paul Dibb & Richard Brabin Smith, "Indonesia in Australia Defence Planning", *Security Challenge* Volume 3 No. 4, November,2007,hlm.78

⁵⁶ Paul Dibb & Richard Brabin Smith, Indonesia in Australia Defence Planning, *Security Challenge* Volume 3 No. 4, November,2007, hlm.67

⁵⁷ *ibid.*,hlm.52-53

⁵⁸ *Strategic Basis of Australian Defence Policy – 1973*,hlm 25

bahwa Indonesia akan menjadi ancaman terhadap Australia dalam 5-10 tahun kedepan.⁵⁹

Tetapi perubahan potensi ancaman menurut Australia disebabkan karena adanya perubahan lingkungan strategis dimana sebelum 2001, potensi ancaman Australia merupakan ancaman tradisional atau ancaman invasi militer negara lain setelah 2001 khususnya setelah 9/11, Australia memandang bahwa ancaman terorisme menjadi ancaman utama bagi Australia dan Australia telah mengubah bentuk ancamannya dari tradisional menjadi non tradisional atau asimetris.

Sebagai akibat dari globalisasi, kawasan Australia menjadi lebih fokus pada ancaman keamanan non tradisional daripada sebelumnya yaitu ancaman militer.⁶⁰

Potensi ancaman teroris tersebut jelas dikatakan dalam *Australia's National Security: A Defence Update 2003* dimana Australia menyatakan *Global terrorism* merupakan salah satu dari 3 ancaman utama selain *Weapons of Mass Destruction* dan *troubled region*. Dalam buku tersebut juga dinyatakan bahwa perdagangan manusia, penangkapan ikan ilegal, pencucian uang, korupsi, masalah-masalah kependudukan dan lingkungan bisa menjadi ancaman bagi negara-negara tetangga yang lemah termasuk Indonesia. Dan otomatis hal tersebut bisa berakibat pada keamanan Australia sendiri sehingga Australia berkomitmen untuk membangun hubungan kerjasama dengan Indonesia yaitu kerjasama pengawasan maritim untuk mencegah ancaman-ancaman non tradisional tersebut.

Dalam *National Security: A Defence Update 2005* ancaman-ancaman nontradisional tetap dimenjadi prioritas utama yaitu teroris, WMD dan negara-negara lemah. Potensi ancaman militer terhadap Australia tidak terlihat dimasa datang dan lebih ke pada ancaman bersifat lintas batas atau transnasional. Australia menyatakan bahwa negara-negara lemah dapat membuka kesempatan untuk adanya perekrutan, pelatihan dan mempersenjatai teroris karena vakumnya pemerintahan dan hukum.⁶¹

2.2. Indonesia di mata Australia

⁵⁹ Desmond Ball, "Indonesia and Australia: Strange Neighbours or Partner in Regional Resilience" dalam Hadi Sosastro & Tim McDonalds (Eds), *Indonesia-Australia relations: Diverse Cultures Converging Interest*, Jakarta: CSIS, 1995, hlm.96

⁶⁰ Department of Defence, *Australia's National Security: A Defence Update 2003*, Canberra: AGPS, 2003, hlm.1

⁶¹ Department of Defence, *Australia's National Security: A Defence Update 2005*, Canberra: AGPS, 2005, hlm.4

Pandangan Australia terhadap Indonesia bisa dilihat dari berbagai dokumen penting Australia seperti *Strategic Basis*, *Strategic Review* dan *White Defence Paper*.

Dalam *The Strategic Basis* (1959) Australia dinyatakan:

*"Indonesia is of great strategic importance to Australia and constitutes a most important factor in both Australian and regional defence. The size of its population and its economic possibilities endow Indonesia with a long term potential far in excess of its previous or present importance."*⁶²

Indonesia masih dianggap penting oleh Australia dan merupakan faktor yang penting dalam pertahanan regional. Meskipun Australia masih menganggap Indonesia sebagai ancaman karena kemampuan militernya telah mendapat banyak bantuan dari luar.⁶³

Persepsi Australia terhadap Indonesia dapat dibagi ke dalam empat bagian yaitu: persepsi psiko-historis, persepsi psikokultural, persepsi geografis/geopolitik/geostrategis dan persepsi ekonomi.⁶⁴

Persepsi psiko-historis, Australia yang tumbuh sebagai negara imigran yang dimulai sejak pemukiman pertama para narapidana, pelacur dan sipir penjara dari Inggris tahun 1788, amat peduli dengan perkembangan di negara-negara tetangga utaranya. Ketakutan kepada bangsa-bangsa Asia yang memiliki keragaman budaya, ideology dan warna kulit menyebabkan Australia dikenal sebagai negara penakut (*the frightened country*) yang selalu mencari keamanan di Asia (*Looking for Security from Asia*). Baru sejak masa pemerintahan PM Hawke, Australia mengubah cara pandangnya menjadi mencari keamanan di dalam Asia. Dalam kaitannya, Indonesia dipandang sebagai negara penyangga dari serangan musuh Australia dari Utara dan pada saat yang sama dipandang sebagai negara yang memiliki sifat ekspansionis dan agresif.

Dari persepsi psiko-kultural, Indonesia dipandang sebagai suatu bangsa yang berkulit berwarna yang juga berbeda budaya dan hal ini menjadi kendala psikologis dalam membina hubungan Jakarta-Canberra. Dari persepsi geografis, Indonesia adalah negara terdekat yang bisa menjadi negara penyangga dari serbuan negara-negara kuat Asia. Dari persepsi ekonomi, Indonesia adalah negara yang cukup penting bagi pembangunan ekonomi Australia. Selain kaya

⁶² *Strategic Basis of Australian Defence Policy*, dated January 1959, NAA A2031/8, hlm. 4.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 5

⁶⁴ Ikrar Nusa Bhakti, "Bantuan Luar Negeri Australia di bidang Keamanan", dalam Adriana Elizabeth (Ed) *Kebijakan Bantuan Luar Negeri Australia*, Jakarta: P2P LIPI, 2004, hal 66-67

akan sumber alam, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang banyak sehingga bisa dijadikan pasar yang amat prospektif bagi barang-barang Australia.

Dalam *Strategic Basis of Australian Defence Policy* (1968), Australia menegaskan bahwa kawasan Indonesia bisa saja menimbulkan ancaman bagi Australia. Dinyatakan dalam:

*It is from or through Indonesia that the possibility of hostile action against Australia or its Territories is most likely to arise. Never to be forgotten is the possibility that Indonesia could over a short period increase her military capacity if a major power were prepared to provide military aid as the USSR did in the past*⁶⁵

Hal itu juga yang membuat Australia membangun kekuatan pertahanannya dikarenakan adanya kekhawatiran akan ancaman yang muncul dari Indonesia di masa depan. Jelas dinyatakan dalam buku tersebut *"one more reason why the capability of the forces we develop from now on should be versatile enough to meet a possible future threat from Indonesia"*⁶⁶

Pandangan Australia akan pentingnya Indonesia berlanjut dalam *The Strategic Basis of Australian Defence Policy* (1971) dimana Australia menegaskan *"A stable, cohesive and economically developing Indonesia, with which Australia enjoyed relations of close confidence, would provide depth to our defence and add considerably to our security"*⁶⁷.

Kepentingan Australialah yang menyebabkan Australia melanjutkan langkah selanjutnya yaitu menjalin kerjasama dengan Indonesia di bidang pertahanan dimana orientasi militer pemerintah Indonesia juga menjadi rekomendasi bagi arah kerjasama pertahanan yang efektif bagi Australia dan dinyatakan dalam:

"afford us opportunities to develop our defence and security relationships with Indonesia" and "opportunity to assist in the improvement of Indonesian military capability for internal security and for defensive weapons".⁶⁸

Australia terus melanjutkan kerjasama pertahanannya dengan Indonesia sebagai negara tetangga terdekatnya karena kerjasama pertahanan tersebut menjadi dasar bagi keamanan Australia dan juga cara untuk menghindari konflik

⁶⁵ *Strategic Basis of Australian Defence Policy* 1968, *op.cit.*, hlm.58-59

⁶⁶ *Ibid.*, hlm.52-53

⁶⁷ *Strategic Basis of Australian Defence Policy* 1971, hlm.27

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.28

antara kedua negara. Kerjasama pertahanan yang didukung penuh adalah kerjasama pengawasan maritim antara Indonesia juga Singapura dan Malaysia.

Sehingga tujuan dari kepentingan strategis Australia dalam menjaga keamanan negaranya terpenuhi.⁶⁹

Pada *The 1976 Strategic Basis*, Australia tidak lagi menggunakan istilah "dari dan melalui mana ancaman itu datang" pada Indonesia tetapi lebih mengatakan bahwa kepulauan Indonesia dan PNG merupakan faktor penting dalam menangkal serangan militer melawan Australia. Australia tidak lagi dengan lantang menyuarakan ancaman dari Utara tetapi berusaha memperhalus kalimat tersebut walaupun intinya Indonesia tetap menjadi ancaman bagi Australia. Australia lebih menekankan untuk memperkuat Indonesia dalam mengembangkan ketahanan nasionalnya dalam melawan pengaruh eksternal. Australia yakin bahwa kerjasama pertahanan akan membantu memperkuat kemampuan dan kapasitas militer Indonesia.⁷⁰

Sejak 1986, Australia sudah berkeinginan membuat perjanjian keamanan dengan Indonesia yang didasari oleh pentingnya Indonesia sebagai negara penyangga yang kuat di Asia Tenggara dan masih adanya anggapan bahwa Indonesia adalah negara dari dan melalui mana serangan terhadap Australia bisa dilakukan.⁷¹ Australia dalam *The Defence of Australia* (1987) menyatakan:

*"the northern archipelagic chain...is the most likely route through which any major assault could be launched against Australia. (Hence) developments in the archipelagic states, especially Indonesia, are of great strategic significance to us".*⁷²

Bisa dikatakan bahwa perkembangan negara-negara kepulauan khususnya Indonesia merupakan hal yang sangat penting bagi Australia. Dengan kata lain, deretan kepulauan di utara bisa juga menjadi suatu ancaman bagi Australia karena itu Australia menekankan pengembangan ikatan-ikatan keamanan yang lebih dekat dengan negara-negara di kawasan.

Bagi Australia, Indonesia dipandang sebagai sesama negara "*middle power*" di Asia Tenggara yang bisa diajak untuk menggalang kekuatan dan

⁶⁹ *The Strategic Basis of Australian Defence Policy 1975*, dated October 1975, NAA A12934, hlm.53-64.

⁷⁰ *Australian Defence*, Canberra, Australian Government Publishing Service, 1976, hlm.7-8

⁷¹ Paul Dibb, *Review of Australia's Defence Capabilities*, Canberra:AGPS,1986, hlm 48

⁷²Departemen of Defence, *The Defence of Australia* 1987, Canberra:AGPS, 1987, hlm.15

bekerjasama dalam menjaga serta mempromosikan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara.⁷³

Sedangkan dalam buku putih kebijakan dan perdagangan luar negeri tahun 1987, Australia juga menekankan pentingnya kawasan Indonesia karena lokasi strategisnya. Australia juga mementingkan untuk memperluas konsultasi dan kerjasama dalam isu-isu strategis dengan Indonesia. Dikatakan:

*Australia's relations with Indonesia will always be fundamentally important. This reflects Indonesia's strategic location astride Australian's northern approaches through which 60 per cent of Australia's exports pass, and its size-Indonesia is by far the largest and most populous country in Australia's immediate vicinity. Australia and Indonesia share significant strategic interests and an expanding structure of consultation and cooperation on strategic issues.*⁷⁴

Australia dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2000 menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia adalah negara tetangga yang paling besar dan paling penting bagi Australia. Lebih dari 30 tahun, Australia dan Indonesia telah bekerja keras membangun hubungan pertahanan yang erat berdasarkan kepentingan strategis masing-masing. Kedua negara telah membuat kemajuan yang sangat penting walaupun terdapat perbedaan dalam memandang beberapa isu. Masa transisi demokrasi di Indonesia dan juga keputusannya melepas Timor-Timor serta adanya salah pemahaman terhadap peran Australia dalam masalah Timor-Timor juga menjadi dasar hubungan pertahanan kedua negara.⁷⁵

Downer sendiri menekankan bahwa Australia tidak bersalah dalam kasus Timor-Timor karena Australia hanya menjalankan mandat dari PBB untuk memimpin pasukan Interfetnya ke daerah tersebut. Bukan keinginan Australia untuk ikut campur terhadap masalah domestik Indonesia walaupun begitu banyak berita yang mengatakan bahwa Australia telah mendominasi masalah timor-Timor. Ia menekankan bahwa pasukan Interfet Australia yang merupakan wewenang PBB datang ke Timor-Timor untuk memperbaiki dan menjaga perdamaian di Timor-Timor serta membantu operasi kemanusiaan. Interfet juga mempersiapkan jalan yang baik untuk pasukan penjaga perdamaian PBB agar dapat masuk dan diterima. Downer bahkan memuji tindakan Presiden Habibie saat itu yang telah melakukan suatu langkah yang sangat berani yaitu meminta

⁷³ Ikhar Nusa Bakti, "Merajut Jejaring..." hlm.26

⁷⁴ Hon Alexander Downer MP and the Hon Tim Fisher MP, *In the National Interest: Australia's Foreign and Trade Policy*, August 1997, pp. 61,62 dikutip dalam Inquiry into Australia's Relation with Indonesia, Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade, Commonwealth of Australia, www.apft.gov.au diakses 7 April 2009 pk1.10.44 WIB

⁷⁵ Department of Defence, *Defence 2000: Our Future Defence Force*, Canberra: AGPS, 2000, hlm.41-42

bantuan dari PBB untuk mengatasi krisis di Timor-Timor dan membiarkan rakyat Timor-Timor lepas dari Indonesia. Downer tetap menyatakan bahwa Australia datang sebagai pasukan penjaga perdamaian yang akan menjalankan operasi kemanusiaan dan akan menghilangkan penderitaan mereka dan luka mereka dari tekanan politik Indonesia selama 25 tahun. Australia tidak pernah bertindak atas dasar egonya atau sekedar pamer kekuatan tetapi kita melakukan itu karena itu adalah hal yang benar.⁷⁶

Pernyataan Downer sama seperti pernyataan Menteri Pertahanan John Moore yang menegaskan bahwa keterlibatan Australia di Timor-Timor bukan dimotivasi oleh keinginan pribadi sehingga memunculkan masalah dalam hubungan dengan Indonesia. Ia menekankan bahwa "*It is important to note that we are in East Timor at the request of the United Nations and with the agreement of the Indonesian Government*".⁷⁷

Menurut Penulis justru pernyataan Downer dan Moore adalah pernyataan yang hanya menutupi alasan sebenarnya dibalik keterlibatan Australia di Timor-Timor. Penulis lebih yakin bahwa keterlibatan Australia memang sesuai dengan kepentingan strategis Australia dengan adanya surat dari Howard yang dikirim ke Presiden Habibie saat itu yang menyarankan Habibie untuk membiarkan rakyat Timor-Timor lepas dari Indonesia dan membiarkan mereka menentukan pilihan mereka sendiri. Surat dari Howard itulah yang menjadi elemen penting dalam intervensi Australia dalam masalah Timor-Timor.⁷⁸ Penulis lebih merasa bahwa alasan ekonomi dibalik campur tangan Australia di Timor-Timor karena adanya kepentingan strategis lain yang disembunyikan Australia. Lebih lanjut Moore menyatakan "*We cannot pretend that what happen to our neighbours do not matter to Australian security*". Jelas bahwa ketakutan Australia akan masalah – masalah yang muncul di negara-negara tetangganya sangat mempengaruhi kebijakan pertahanannya. Ia menganggap masalah-masalah yang muncul di kawasan akan mempengaruhi keamanan Australia.⁷⁹

"Indonesia mempunyai arti penting strategis yang unik bagi Australia dan akan menjadi sebuah kunci penentu dari keamanan Australia di masa depan (*Australia's Strategic Policy*, 1997:10,11). " Kombinasi jumlah penduduk, luas

⁷⁶ Alexander Downer MP, "Change In Asia - An Australian Perspective", Speech by Minister for Foreign Affairs, to the Asia Society, New York, USA, 28 September 1999

⁷⁷ John Moore MP, "New Challenges for Australian Defence Policy", Address to the Strategic Update '99 Conference, Australian Defence Studies Centre University College, Australian Defence Force Academy, Canberra 28 September 1999

⁷⁸ Stewart Firth, *op.cit.*, hlm. 188-189

⁷⁹ John Moore, *loc.cit.*

teritorial, potensi ekonomi dan kekuatan politik yang dimilikinya menjadikannya negara berpengaruh di kawasan Asteng..." (*Australia's Strategic Policy* 1997:22). Buku tersebut menandakan hubungan Australia-indonesia akan tetap penting; bahwa strategis Indonesia akan mengangkangi rute perdagangan Australia; dengan populasi dan posisi di asteng dan pembangunan serta diversifikasi kemitraan bilateralnya merupakan hal-hal patut diperhitungkan Kerjasama telah berkembang melintasi wilayah strategis, ekonomi, teknis, pendidikan dan budaya yang luas. "tantangannya adalah bagaimana menjaga dan memperluasnya".⁸⁰

Konsep keamanan regional yang berkembang sampai saat ini adalah sebagaimana yang dikembangkan dalam laporan menlu Gareth Evans tahun 1989. Laporan tersebut menyatakan bahwa dalam konteks keamanan regional, kebijakan luar negeri Australia ditujukan untuk: pertama, melindungi keamanan Australia dan lingkungan strategis kawasan, kedua adalah untuk meningkatkan perdagangan, investasi dan kerjasama ekonomi dan ketiga adalah untuk kontribusi bagi penciptaan keamanan internasional dan terakhir adalah menjadi warga negara internasional yang baik. Bagi Australia, kawasan strategis primer/RSPI terdiri dari Aisa Tenggara, Pasifik Barat Daya dan bagian timur Samudera Hindia. Lebih jauh, Indonesia menjadi fokus perhatian utama.⁸¹

Dalam "*Defence Update 2003: Australian National Security*", Australia juga menyatakan bahwa prioritas utama bentuk ancaman adalah ancaman teroris global dimana peristiwa Bom Bali 2002 menjadi bukti nyata serangan teroris. Australia juga berkomitmen untuk menjalin hubungan yang erat dengan Indonesia, dan saling menguntungkan termasuk kerjasama pengawasan perbatasan dan pertukaran intelijen. Kerjasama Pertahanan dengan Indonesia juga menjadi elemen yang penting dalam hubungan bilateral dan mendukung pencapaian kepentingan national dan strategis Australia.⁸²

Selain itu Indonesia menjadi sangat penting bagi Australia seperti dinyatakan dalam buku putih pertahanannya bahwa besarnya wilayah Indonesia menjadi salah satu indikator bahwa Indonesia adalah stabilisator bagi stabilitas dan keamanan kawasan. Letak geografis Indonesia juga meningkatkan kepentingan strategis Australia bukan hanya karena Indonesia dekat dengan

⁸⁰ In the National Interest, 1997, hlm.61

⁸¹ Ikrar Nusa Bhakti, Ganewati Wuryandari dan M Rifqi Muna, *Persetujuan Pemeliharaan Keamanan Republik Indonesia- Australia, Kaitannya dengan Stabilitas dan Keamanan Regional Asia Tenggara: Suatu Tinjauan Strategis Politik*, Jakarta PPW-LIPI dan Balitbang Deplu, 1997, hlm.68

⁸² *Australia's National Security: A Defence Update 2003*, *op.cit.*, hlm. 1-2

Australia tetapi juga karena banyak perdagangan luar negeri Australia melewati kepulauan Indonesia.

Menurut Carlyle ada beberapa pandangan mengapa Indonesia sangat penting bagi Australia yaitu karena Australia dan Indonesia adalah negara tetangga yang terdekat dan sangat mungkin bagi kedua negara untuk saling tertarik dan perduli pada kesejahteraan dari masing-masing negara. Kedua, Indonesia memiliki posisi strategis yang harus dilalui Australia dalam perdagangan luar negerinya jika melalui rute lain akan menambah biaya yang lebih tinggi. Ketiga, adanya gambaran tentang Indonesia dimana Indonesia dianggap sebagai negara yang miskin, populasi penduduknya tinggi, memiliki budaya yang bermacam-macam, negara yang tidak stabil dimana politik domestiknya bisa mempengaruhi keamanan Australia. Pandangan lain, Indonesia memiliki posisi geostrategis sebagai "Land Bridge" di negara-negara Asia Tenggara.⁸³

Senator Evans mengatakan bahwa Indonesia adalah mitra kunci bagi Australia dan Australia memiliki komitmen terhadap hubungan kerja sama yang erat dan praktis menyangkut masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama. Australia bermaksud untuk mempromosikan pemahaman mengenai pandangan Pemerintah Australia, serta memperbarui dan mengintensifkan komitmennya terhadap hubungan yang kukuh dan penuh dukungan dengan Indonesia. Australia juga mengakui peran penting Indonesia dalam mengamankan perbatasan dan mencegah lalu lintas kapal ilegal yang diorganisir para penyelundup manusia dan manfaat penting hubungan erat dengan Indonesia adalah keamanan perbatasan yang lebih baik bagi ke dua negara.⁸⁴

Australia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara tetangga terbesar dan terpenting bagi Australia. Telah lebih dari 30 tahun, Australia dan Indonesia telah bekerja keras membangun hubungan pertahanan yang erat berdasarkan pada kepentingan strategis dan kebutuhan dan kedua Negara telah membuat kemajuan yang sangat penting. Walaupun kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani beberapa isu seperti kasus Timor-Timor. Masa jajak pendapat di Timor-Timor telah mengubah beberapa elemen perkembangan hubungan strategis dan juga munculnya kesalahpahaman Indonesia dalam

⁸³ Carlyle A. Thayer, *Australian Perceptions and Indonesian Reality*

<http://www.gahs.gov.au/Coonahshome.html> diakses tanggal 12 Maret 2009 pukul 23.00 WIB

⁸⁴ Siaran Media Menteri Imigrasi dan Kewarganegaraan Australia Chris Evans dalam kunjungannya ke Indonesia 16 Januari 2008, http://www.austembjak.or.id/jakiindonesia/SM08_004.html diakses 3 April 2009 pukul 13.00 WIB

memandang peran pasukan Australia. Hal tersebut menyebabkan adanya penurunan kontak pada bidang pertahanan. Tetapi masalah Timor-Timor tidak mempengaruhi keinginan Australia untuk tetap berkomitmen membangun hubungan pertahanan baru dengan Indonesia sesuai dengan tujuan dan kepentingan strategis Australia.⁸⁵

Australia juga menegaskan pentingnya stabilitas Indonesia bagi keamanan Australia:

*Australia has a fundamental national interest in Indonesia's stability. We strongly support Indonesian unity and territorial integrity. Indonesia's creation of a robust and functioning democratic system is crucial to achieving these goals. Terrorism and Islamic extremism pose significant threats to Indonesia's transition to a modern democratic state and to its fragile economy. Indonesia's ability to deal with these threats is crucial for its own and South-East Asia's stability, and for its links with the rest of the world.*⁸⁶

Hal ini ditegaskan Downer pada saat peluncuran Buku Putih kebijakan Luar Negeri Australia di Canberra bahwa Australia secara tegas mendukung keutuhan dan integritas wilayah Indonesia. Dan Australia memiliki kepentingan terhadap stabilitas Indonesia. Australia tetap berkomitmen mendukung Indonesia mengatasi terorisme dan senantiasa menawarkan bantuan praktis bagi pembangunan kemampuan memberantas teroris. Indonesia sendiri adalah salah satu Negara yang mendapat catatan khusus di dalam buku putih kebijakan luar negeri Australia.⁸⁷

Begitu pula dengan Dobb yang menyatakan bahwa stabilitas dan kedamaian di Indonesia adalah kunci bagi kedamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.⁸⁸ Ia menekankan pentingnya Indonesia yang stabil, bersatu dan demokratis bagi kepentingan nasional Australia. Ia membantah pandangan yang menyatakan bahwa Australia ingin melihat Indonesia terpecah. Dobb menyatakan bahwa orang-orang yang berpandangan begitu adalah orang-orang yang tidak mengerti realita dari posisi geopolitik Australia. Sejak 1965 dan jatuhnya rezim Sukarno, Indonesia telah menjadi perlindungan strategis bagi Australia.⁸⁹

⁸⁵ Defence White Paper 2000, *op.cit.*, hlm.41-42

⁸⁶ Department of d Department of Communications, Information Technology and the Arts, *Advancing the National Interest: Australia Foreign and Trade Policy White Paper*, 2003, hlm.81

⁸⁷ Downer nilai Indonesia positif prangai teroris, www.gatra.com/2003-02-17/versi_cetak.php diakses 15 Februari 2009 pukul 14.00 WIB

⁸⁸ Paul Dobb, *The Key to South-East Asia's Security*, International Affairs Vol. 77, No. 4 Oktober, 2001, hlm. 830, <http://www.jstor.org/stable/3095597> diakses 27 April 2009 pkl.02.43 WIB

⁸⁹ *Ibid.*, hlm.838

Lingkungan keamanan regional yang stabil adalah sangat penting terhadap kepentingan nasional Australia. Australia telah membangun jaringan pertahanan bilateral dan hubungan politik serta dialog keamanan yang melibatkan banyak negara di kawasan Asia. Dialog militer-politik bilateral dalam isu keamanan akan membantu memahami secara lebih luas dan berbagi kepentingan dan juga kerjasama pertahanan bilateral ini akan membantu Australian Defence Force (ADF) untuk bekerjasama dengan seluruh pasukan militer di kawasan. Hubungan pertahanan strategis Australia bersifat lebih mengerti dan melibatkan kegiatan-kegiatan pertahanan seperti keterlibatan ADF untuk berinteraksi, berlatih bersama dan melakukan operasi bersama dengan pasukan Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina dan juga membangun hubungan pertahanan dengan Indonesia.⁹⁰

Alexander Downer menyatakan bahwa Australia diingatkan akan pentingnya hubungan regional dengan negara-negara kawasan termasuk hubungan dekat dengan tetangga terdekat Indonesia. Hubungan kemitraan dengan Indonesia dan kapasitas kedua negara untuk bekerjasama dalam menghadapi krisis yang sama pada saat ini yaitu teroris setelah peristiwa 12 Oktober sudah terjalin dengan sukses.⁹¹

Dalam *Australia's National Security: A Defence Update 2005* dinyatakan bahwa Indonesia tetap penting bagi Australia karena Indonesia adalah negara yang berpenduduk 230 juta orang dan dari segi jumlah, sejarah dan potensi ekonomi, Indonesia tetap menjadi prioritas bagi Australia.⁹²

Australia tetap memprioritaskan bekerjasama dengan Indonesia dalam isu-isu keamanan khususnya terorisme dan keamanan perbatasan. Australia menegaskan bahwa ancaman terhadap negara tetangganya merupakan ancaman terhadap Australia juga apakah ancaman tersebut berupa terorisme, kejahatan transnasional, pembajakan, perdagangan obat terlarang dan penyelundupan orang.⁹³

Dalam *Australia's National Security: A Defence Update 2007* dinyatakan bahwa Australia tetap mempertahankan kemitraan keamanannya dengan negara-negara tetangganya di kawasan regional. Australia membangun keterlibatan regional dalam bidang pertahanan dan dialog keamanan dengan

⁹⁰ *Defence White Paper 2000, Op.Cit.*, hlm.76

⁹¹ "The Global Strategic Environment: An Australian Perspective", Speech by Australia's Foreign Minister Alexander Downer in the Royal Institute of International Affairs, London 31 October 2002

⁹² *Australia's National Security: A Defence Update 2005*, hlm.8

⁹³ *Ibid.*, hlm.26

negara-negara kawasan agar bisa menyelesaikan masalah keamanan yang muncul di kawasan secara bersama sesuai dengan tujuan kepentingan keamanan Australia sendiri.⁹⁴

Perdana Menteri Australia John Howard menyatakan bahwa Indonesia merupakan mitra yang sangat penting bagi negaranya. Hal itu didasari sejumlah faktor, selain kedekatan jarak, hubungan politik, keamanan dan ekonomik yang kuat serta luas, juga karena Indonesia merupakan termasuk 10 besar negara tujuan investasi pengusaha Australia.⁹⁵

2.3. Australia di mata Indonesia

Sejak Indonesia merdeka, kerja sama pertahanan telah banyak memberi kontribusi bagi kepentingan nasional, yakni dalam menjamin tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Kerjasama pertahanan telah dapat mempererat hubungan Indonesia dengan banyak negara, baik sesama kawasan maupun di luar kawasan. Kerja sama pertahanan dalam berbagai bentuk telah mengangkat citra Indonesia di dunia internasional, seperti yang dikembangkan melalui latihan bersama militer, patroli bersama pengamanan Selat Malaka, pertukaran informasi, penanganan bencana alam, dan tugas perdamaian dunia. Indonesia menempatkan kerjasama pertahanan sebagai salah satu media yang efektif, tidak saja untuk membangun saling percaya dengan negara lain, tetapi lebih dari itu melalui kerjasama pertahanan hubungan antar negara lebih terjalin dalam nuansa yang lebih konkret melalui tindakan nyata.⁹⁶

Dalam buku "*Strategic Defence Review 2005*" Departemen Pertahanan Indonesia menyatakan bahwa ancaman militer tradisional yaitu Bombardemen atau berupa penggunaan senjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain bisa dilakukan oleh Australia karena Australia memiliki kekuatan udara yang canggih. Agresi juga merupakan salah satu bentuk ancaman tradisional dimana Australia dianggap sebagai salah satu negara yang mampu melakukannya. Dalam buku tersebut juga dinyatakan bahwa kerjasama bilateral bidang pertahanan diprioritaskan juga dengan Australia dimana kerjasama

⁹⁴ Department of Defence, *Australia's National Security: A Defence Update 2007*, Canberra: AGPS, 2003, hlm.35

⁹⁵ Howard: *Indonesia Mitra yang Sangat Penting*,

<http://www2.kompas.com/ver1nasional/0707/27/113126.htm> diakses 9 April 2009 pkl.14.00 WIB

⁹⁶ Departemen Pertahanan, *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21*; Buku Putih Pertahanan 2003, Jakarta:Dephan, 2003, hlm.79-80

bilateral ini diarahkan untuk membangun rasa saling percaya dan memecahkan masalah keamanan yang mendesak untuk ditangani bersama. Tujuan utama adalah mewujudkan stabilitas kawasan multi lapis di tingkat regional dan global untuk mendukung kepentingan Indonesia.⁹⁷

Dirjen Strategi Pertahanan Mayjen TNI Syarifudin Tippe, S.ip,M.si dalam wawancaranya mengatakan bahwa walaupun Deplu telah menerapkan rambu-rambu untuk hidup berdampingan secara damai tetapi potensi konflik tetap ada karena manusia sendiri dilahirkan dengan sisi baik dan buruk. Dalam buku putih pertahanannya, Australia mengatakan bahwa ancaman datang dari Utara dan Australia menganggap Indonesia adalah negara dari dan melalui mana ancaman datang. Selain itu faktor jumlah penduduk yang banyak di Indonesia juga menjadi salah satu faktor mengapa Australia memandang Indonesia sebagai ancaman karena Australia sendiri berpenduduk sedikit.⁹⁸

Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki *bargaining position* sendiri dalam konteks pertahanan karena Indonesia memiliki faktor geopolitik dan geostrategis bagi bangsa lain dan hampir 2/3 negara di dunia melewati Indonesia. Indonesia tidak bisa memisahkan diri tapi juga tidak "obral" dan Indonesia harus memiliki strategi pertahanan sendiri dimana strateginya adalah membuat pintar pertahanan Indonesia agar *bargaining positionnya* naik.

Ia menegaskan bahwa pertahanan tidak bisa dipisahkan dari sejarah dan kebijakan menjadi pilar utama dari pertahanan.

Duta Besar RI untuk Australia Sudjadnan Parnohadiningrat menyatakan, kepentingan geopolitik maupun geostrategi Australia tidak bisa lepas dari eksistensi Indonesia. Indonesia harus melihat Australia sebagai alternatif yang bermanfaat bagi pemulihan ekonomi nasional sehingga tidak terlalu tergantung pada Amerika Serikat, Asia Timur maupun Cina,⁹⁹

Bagi Indonesia, Australia juga bisa dijadikan mitra yang alamiah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia. Salah satu sebab Indonesia berpaling ke Australia adalah adanya kebijakan Amerika Serikat untuk menghentikan penjualan senjata, mengurangi bantuan militernya ke Indonesia serta mengurangi penerimaan siswa militer Indonesia yang berlatih di AS. Ketika

⁹⁷ Departemen Pertahanan RI, Menata Sistem Pertahanan;Kaji Ulang Pertahanan, Jakarta: Dephan,2005,hlm. 18-19

⁹⁸ Wawancara dengan Dirjen Strahan Dephan Mayjen TNI Syarifudin Tippe, S.ip,M. tanggal 24 Februari 2009 pkl 10.25

⁹⁹Keuntungan Australia Tidak Bisa Lepas dari Indonesia, <http://www.2.kompas.com/berita-ekonomi/2009/04/09/09040917.html> diakses 9 April 2009 pkl.13.00 WIB

AS menghentikan *Program Internastional Military Education and Training* bagi Indonesia sejak 1994, 300 personil militer Indonesia mulai berlatih dan kursus di Australia.¹⁰⁰

Dalam menjalin hubungan yang lebih konkret, kedua negara telah menyepakati suatu Perjanjian Kerangka Kerja sama Keamanan yang ditandatangani di Lombok pada tanggal 13 November 2006. Pada saat ini Indonesia sedang menindaklanjutinya untuk meratifikasi perjanjian tersebut sebagai dasar untuk penjabaran bentuk-bentuk kerja sama di masa mendatang. Dalam waktu-waktu mendatang, kerja sama di bidang pertahanan dengan Australia diarahkan untuk dapat mengakomodir kepentingan nasional kedua negara, terutama dalam penanganan isu-isu keamanan bersama sebagai negara yang secara teritorial berbatasan langsung. Forum dialog Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue (IADSD) merupakan wadah strategis yang memfasilitasi kedua negara dalam bidang pertahanan.¹⁰¹

Forum dialog tersebut telah menunjukkan kinerjanya sebagai wadah yang cukup produktif serta efektif dalam mengomunikasikan kepentingan pertahanan dan merancang kerjasama kegiatan di bidang pertahanan kedua negara. Kunjungan antar pejabat tinggi pertahanan dan Angkatan Bersenjata kedua negara dalam beberapa waktu terakhir berjalan cukup tinggi, membuktikan semakin eratnya kerjasama pertahanan kedua negara.

Hal ini juga ditandai dengan semakin bervariasinya kerja sama antar Departemen Pertahanan dan antar Angkatan Bersenjata yang mencakup bidang penanggulangan terorisme, keamanan maritim, pendidikan dan latihan, penanggulangan dampak bencana alam serta manajemen pertahanan. Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk memanfaatkan kerjasama tersebut dalam menangkal dan mengatasi isu-isu pertahanan dan keamanan yang dihadapi ke dua negara seperti terorisme internasional, penyelundupan manusia (*people smuggling*) dan bentuk-bentuk kejahatan lintas negara yang lain.

Dari sisi geografis, Australia memiliki posisi strategis khususnya dalam usaha Indonesia mencegah dan mengatasi anarki-anarki separatisme Papua. Melalui kerjasama kegiatan di bidang pertahanan kedua negara dapat mengembangkan langkah-langkah konkret secara mutualistis untuk penanganan

¹⁰⁰ Ikrar Nusa Bakti, "Merajut Jejaring..." hlm.26-27

¹⁰¹ Buku Putih Pertahanan Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 119

isu-isu pertahanan dan keamanan dalam kerangka kepentingan nasional masing-masing¹⁰²

Australia adalah negara yang paling sering memberi bantuan dalam program pengembangan dan reformasi dimana Australia tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga para ahli yang berkualitas dan relevance dengan bidangnya. Australia juga negara yang ramah dan menjadi tujuan belajar siswa dan mahasiswa Indonesia. Australia juga merupakan salah satu patner penting dalam perdagangan.¹⁰³

Serangan teroris 11 September 2001 telah mengubah paradigma tentang keamanan global. Terorisme menjadi ancaman global yang sangat mengemuka. Sejak itu konsep-konsep keamanan di setiap negara mengalami perubahan secara mendasar dari konsep-konsep lama yang lebih mengedepankan pendekatan konvensional. Respons global terhadap isu terorisme melalui penerapan pola pengamanan yang ketat di tempat-tempat umum telah menghadirkan suasana kewaspadaan yang tinggi. Kondisi tersebut ikut mengubah pola hidup masyarakat global yang lebih mementingkan keamanan (*sense of security*). Nuansa penanganan isu terorisme telah mempengaruhi hubungan antar negara dengan semakin menguatnya kerja sama di bidang pertahanan yang menempatkan penanganan isu terorisme sebagai agenda utama.¹⁰⁴

Dijelaskan juga oleh Menhan Juwono Sudarsono "persepsi Australia terhadap Indonesia yaitu Australia menginginkan Indonesia jangan terlalu kuat dari segi militer, karena dianggap bisa mengganggu keamanannya, tetapi jangan juga sampai terlalu lemah sebab bila terlalu lemah juga akan menimbulkan berbagai persoalan di dalam negeri seperti krisis politik, ekonomi dan sosial, hal ini dikuatirkan akan menimbulkan masalah bagi Australia".¹⁰⁵

Hubungan kerjasama pertahanan Indonesia - Australia telah terjalin lama, namun seringkali mengalami pasang surut sebagai dampak dari pasang surut hubungan politik kedua negara. Kerjasama pertahanan kedua negara pernah berada pada titik terendah pada tahun 1999 sehubungan dengan posisi Australia dalam penyelesaian masalah Timor Leste. Kerjasama di bidang pertahanan dengan Australia, Indonesia tetap berpijak pada prinsip-prinsip CBM

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Australia's relation with Indonesia- A Rich and Complex Tapestry, *op. cit.*, hlm.3-4

¹⁰⁴ Buku Putih Pertahanan Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 5

¹⁰⁵ Hubungan Indonesia – Australia, <http://www.dmc.depban.go.id/internasional1.htm> diakses 7 February 2009 pukul 14.00 WIB

yang mengedepankan semangat kebersamaan dan perimbangan kepentingan dan dibangun berdasarkan persamaan hak, saling menghormati, dan tidak mencampuri urusan intern masing-masing. Kerjasama dengan Australia kedepan akan lebih ditingkatkan untuk mengatasi isu-isu kejahatan lintas negara seperti terorisme dan imigran gelap, termasuk dalam penanganan masalah nelayan tradisional.¹⁰⁶

Menurut Presiden Yudhoyono, Australia adalah patner investasi dan patner perdagangan yang penting bagi Indonesia. Perbedaan antara Australia dan Indonesia dalam hal budaya, sejarah, tradisi, pandangan serta perbedaan ekonomi tidak akan mempengaruhi hubungan Australia-Indonesia karena adanya persamaan kepentingan dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik.¹⁰⁷

2.4 Hubungan Australia-Indonesia di bidang Ekonomi, Politik dan Budaya

Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang sangat unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan menyolok diantara kedua negara dan bangsa bertetangga, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas kepentingan. Tidak dipungkiri, perbedaan-perbedaan tersebut akan menciptakan berbagai masalah yang akan selalu mewamai hubungan kedua negara di masa-masa mendatang. Sebaliknya data empiris menunjukkan bahwa hubungan kedua negara memiliki kecenderungan yang sangat fluktuatif, sehingga para pemimpin serta masyarakat kedua negara dituntut untuk selalu siap dengan berbagai solusi menghadapi setiap masalah yang muncul.¹⁰⁸

Antara 1972-1988, hubungan Australia dan Indonesia diwarnai oleh beberapa masalah antara lain masalah Timor-Timur. Persoalan Timor mewarnai kebijakan luar negeri Australia selama masa PM Buruh Whitlam (1974-1975), PM Koalisi-Liberal Fraser (1975-1983) dan PM Buruh Hawke (1983-1989). Hubungan Australia dan Indonesia selalu dibayangi dengan persoalan Timor, sekalipun pemerintah Australia selalu berusaha memelihara hubungan baik dengan

¹⁰⁶ [http://www.depkeppan.go.id/buku_pu\(t\)h\(b\)ab_v.htm](http://www.depkeppan.go.id/buku_pu(t)h(b)ab_v.htm) diakses 10 February 2009 pukul 15.00 WIB

¹⁰⁷ Susilo Bambang Yudhoyono, "Cultural Exchange A Way to Build Mutual Trust", keynote address at the Asialink Centre 11 September, 2007

¹⁰⁸ Imron Cotan, *Peluang dan Tantangan Hubungan Bilateral Australia dan Indonesia*, Ceramah Duta Besar I.B & BP RI untuk Australia dan Vanuatu di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Andalas, Desember 2004, www.fabri-canberra.org.au diakses 24 Februari 2009 pukul 15.00 WIB

Indonesia namun media Australia dan beberapa kelompok penekan tidak menghendaki persoalan Timor dihentikan. Sikap pemerintah Australia yang membiarkan kecaman-kecaman pers Australia dipandang Indonesia sebagai sikap yang tidak bersahabat serta mendukung kepentingan kelompok-kelompok anti Indonesia. Akhirnya hubungan kedua negara memburuk antara 1980-1983 ketika Indonesia mengambil langkah keras terhadap perwakilan-perwakilan media Australia di Indonesia. Beberapa kantor surat kabar Australia dilarang beredar, kantor perwakilan ABC di Jakarta ditutup karena permohonan visa kepala perwakilannya ditolak pemerintah Indonesia serta kunjungan para pejabat tinggi kedua negara ditunda beberapa waktu.¹⁰⁹

Dalam bidang ekonomi, pada periode 1986-1993, Australia merupakan patner dagang Indonesia yang ke 13. Indonesia sendiri menjadikan Jepang, Amerika Serikat dan Eropa menjadi patner dagang terbesarnya. Indonesia mengimpor produk seperti gandum, katun, logam metal dari Australia sedangkan Australia mengimpor minyak mentah dari Indonesia. Investasi Australia di Indonesia masih sangat kecil karena Australia lebih fokus pada investasinya di Amerika serikat dan Inggris. Sedangkan dalam bidang pariwisata, Indonesia merupakan daerah tujuan wisatawan Australia dimana pada tahun 1985, wisatawan Australia yang datang ke Indonesia berjumlah 100,400 dan meningkat pada 1993 menjadi 201,000.¹¹⁰

Perkembangan hubungan Australia dan Indonesia sepanjang tahun 1988-1996 era PM Keating berkembang sangat pesat dimana kedua negara menjalin hubungan politik, ekonomi, perdagangan dan sosial-budaya. Kunjungan pejabat tinggi kedua negara semakin sering dilakukan baik untuk dialog, konsultasi ataupun membangun kerjasama yang konstruktif. Persoalan-persoalan yang mengganjal diantara kedua Negara segera diselesaikan dengan dialog pemimpin kedua negara.¹¹¹

Pemerintah Buruh Australia berupaya membangun empat pilar utama dalam hubungan Jakarta-Canberra.¹¹² Pertama, pilar politik dalam hal ini Australia menginginkan adanya *special inter personal relationship* atau hubungan antar pribadi yang bersifat khusus antara pemimpin Australia dan Indonesia. Hubungan ini diwujudkan dalam kunjungan Keating sebanyak enam kali ke Indonesia. Kedua, pilar

¹⁰⁹ Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Australia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, hlm. 423-425

¹¹⁰ Mari Pangestu, "Indonesia-Australia Economic Relations into the 21st Century" dalam Hadi Sosastro & Tim McDonalds (Eds), *Indonesia-Australia relations: Diverse Cultures Converging Interest*, Jakarta: CSIS, 1995, hlm. 67-74

¹¹¹ Buku Putih Pertahanan Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 84-85

¹¹² Ikrar Nusa Bhakti, *Politik Luar Negeri Australia Terhadap Asia dalam Zainuddin Djafar (Ed) Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tuntutan Masa Depan* Jakarta: Pustaka Jaya, 1996, hlm. 152-153

ekonomi dimana kedua Negara berusaha meningkatkan kerjasama ekonomi baik pada tingkat bilateral maupun kerangka multilateral. Perwujudan kerjasama ini tampak pada semakin giatnya *Australia-Indonesia Business Council* (AIBC) dan *Indonesia-Australia Business Council* (IABC) dan *ministerial forum* antara kedua negara.

Pilar ketiga ialah pilar sosial-budaya dalam hal ini Australia membentuk *Australia-Indonesia Institute* pada 1989 untuk mempererat hubungan kebudayaan kedua negara. Pertukaran pemuda melalui Australia Youth Exchange Program dimulai sejak 1981 dimana program ini ikut mendorong berkembangnya hubungan kerjasama kebudayaan kedua negara. Sedangkan pilar yang terakhir adalah pilar pertahanan-keamanan dimana Australia menginginkan suatu perjanjian keamanan yang mengikat antara kedua negara. Sejak 1986, Australia sudah berkeinginan adanya perjanjian keamanan dengan Indonesia yang didasari oleh pentingnya Indonesia sebagai negara penyangga yang kuat di Asia Tenggara dan masih adanya anggapan bahwa Indonesia adalah negara dari dan melalui mana ancaman itu datang.

Pascabom Bali Oktober 2002, di mana ratusan warga Australia juga jadi korban, ternyata banyak bantuan mengalir dari Australia untuk membantu pemulihan ekonomi keluarga Indonesia yang menjadi korban bom, juga membantu pengembangan RS Sanglah dan lain-lain. Ketika terjadi bencana tsunami Desember 2004, Australia termasuk negara pertama yang membantu, dan dana untuk rehabilitasi paling besar, mencapai Rp 7 triliun. Australia pula yang banyak membantu pembangunan pusat pendidikan antiteroris di Semarang. Indonesia saat ini adalah penerima terbesar bantuan pembangunan yang disalurkan melalui AusAID senilai Aus\$ 344 juta (2007).¹¹³

Senator Robert Hill menyatakan bahwa Australia terus melanjutkan penempatan Atase Pertahanan di masing-masing negara. Australia juga menyediakan kursus di institusi militer dan mempertahankan komunikasi antara angkatan bersenjata dalam berbagai cara. Membangun kembali hubungan seperti dulu adalah fokus kedua negara dan Australia ingin memastikan bahwa mereka saling berkomunikasi secara efektif untuk menjauhi kesalahpahaman antara kedua negara dan saling menghargai kebudayaan masing-masing sehingga tercipta hubungan pertahanan yang baik. Australia dan Indonesia memang telah memiliki hubungan militer tetapi yang penting adalah bagaimana

¹¹³ Kristianto Hartadi, "Hubungan RI-Australia: Siapa Teman Kita?", http://www.sinarharapan.com/berita_0709/13110041.html, diakses 23 Maret 2009 pukul 14.00 WIB

membangun hubungan tersebut dimasa depan. MoU tentang terorisme telah memberikan kesempatan untuk bekerjasama yang saling menguntungkan. Dari persepektif Australia, Australia menginginkan hubungan yang positif dengan Indonesia.¹¹⁴

Sementara itu Senator Evans mengatakan kedua negara akan mempererat hubungan Australia dengan Indonesia dalam menangani masalah-masalah imigrasi, termasuk keamanan perbatasan dan penyelundupan manusia. Ia mengatakan bahwa Indonesia adalah mitra kunci bagi Australia dan Australia memiliki komitmen terhadap hubungan kerja sama yang erat dan praktis menyangkut masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama. Ia sendiri ingin mempromosikan pemahaman mengenai pandangan Pemerintah Australia, serta memperbarui dan mengintensifkan komitmen terhadap hubungan yang kukuh dan penuh dukungan dengan Indonesia. Pemerintah Australia mengakui peran penting Indonesia dalam mengamankan perbatasan dan mencegah lalu lintas kapal ilegal yang diorganisir para penyelundup manusia. Kedua negara telah bekerja sama untuk mengembangkan sistem pengawasan imigrasi yang canggih guna meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengidentifikasi orang-orang yang dicurigai, seperti teroris, penjahat dan penyelundup manusia. Manfaat penting hubungan erat dengan Indonesia adalah terciptanya keamanan perbatasan yang lebih baik bagi ke dua negara, dimana proyek-proyek seperti ini membantu menciptakan keselamatan dan keamanan perjalanan yang lebih baik di kawasan ini.¹¹⁵

Menurut Duta Besar Indonesia untuk Australia Sudjadnan Parnohadiningrat, hubungan kedua negara kini lebih realistik dan semakin dewasa yang dilandasi dengan prinsip-prinsip pragmatisme, saling menguntungkan dan saling menghormati. Ia mencontohkan hubungan yang dibangun kembali antara unsur pertahanan kedua negara. Kedua negara juga terus mendorong upaya menghidupkan kembali bentuk hubungan seperti yang dialami pada era sebelum peristiwa 1999 di Timtim. Ia menegaskan bahwa sejak awal ia selalu mendorong untuk memulai pertemuan dalam hubungan antar pertahanan kedua negara (*defence to defence*) dimana pertemuan itu dimulai dalam suasana yang sangat

¹¹⁴ Senator the Hon. Robert Hill, Minister for Defence, "Defence Relationship with Indonesia", Press Conference in Shangrila Jakarta, 07 Maret 2002, <http://www.minister.defence.gov.au/HillSpeech/pol.cfm?CurrentId=1313> diakses 4 April 2009 Pukul 21.00 WIB

¹¹⁵ Senator Chris Evans, Siaran Media dalam kunjungannya ke Indonesia 16 Januari 2008, http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/special/SM08_001.html, diakses tanggal 4 April 2009 pukul 21.00 WIB

informal dan pertukaran pandangan yang tidak mengikat tapi kemudian dilanjutkan dengan pertemuan lebih serius. Hubungan yang lebih erat dan tumbuh dewasa itu tidak terlepas dari hasil saling mengunjungi kedua kepala negara serta para pejabat tinggi mereka. Kunjungan-kunjungan itu antara lain, Presiden RI Abdurrahman Wahid (saat itu) ke Australia pada Juni tahun 2001, Perdana Menteri John Howard ke Indonesia sebanyak dua kali (Agustus 2001 dan Februari 2002) dan kunjungan Ketua MPR-RI ke Australia.¹¹⁶

Menteri Pertahanan Joel Fitzgibbon menyatakan bahwa hubungan pertahanan Australia dan Indonesia seperti hubungan bilateral yang lain merefleksikan kepentingan bersama dalam keamanan regional dan juga kedua negara ingin memperkuatnya. Pertemuannya dengan menteri pertahanan Indonesia untuk membahas perkembangan inisiatif yang telah dikembangkan sejak pertemuan terakhir dimana termasuk didalamnya adalah kerjasama pelatihan dan pendidikan, bantuan strategis yang terjalin dengan Departemen Pertahanan Indonesia serta industri pertahanannya. Kerjasama pertahanan antara Australia dan Indonesia telah menyumbang secara langsung terhadap keamanan dan stabilitas regional. Kedua negara akan memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang bisa dibagi mengenai prioritas-prioritas keamanan sehingga akan memungkinkan mereka memiliki sumber-sumber pertahanan terbaik yang paling efisien dan paling efektif dalam mencapai tujuan bersama.¹¹⁷

Australia dan Indonesia memiliki hubungan pertahanan yang meyakinkan dan matang berdasarkan pada rasa saling menghargai dan saling percaya dimana selanjutnya kerjasama tersebut akan diperdalam dalam masalah-masalah keamanan bersama seperti terorisme, keamanan regional dan pembajakan. Australia dan Indonesia berkesempatan membahas lebih jauh kemajuan keterlibatan pertahanan dan kerjasama yang didasarkan pada kerjasama keamanan Australia-Indonesia di Lombok tahun 2006 lalu. *Lombok Treaty* tersebut mendasari pemahaman bersama antara Australia-Indonesia tentang hubungan pertahanan dan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Pemahaman bersama mencakup kerangka prioritas untuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang pertahanan termasuk latihan militer, kunjungan

¹¹⁶Sudjandnan Parnohadiningrat, "Hubungan RI-Australia Lebih Realistik Dan Saling Memahami"
http://www.kbri-canberra.org.au/speeches/2003_0127chr.htm diakses 4 Maret 2009 Pukul 10.00 WIB

¹¹⁷Joel Fitzgibbon MP, Media Release, "Minister for Defence Visits Indonesia and East Timor", 17 September 2008

belajar, pertukaran pelajar, latihan bersama, pengawasan maritime dan patroli. Jadi *Lombok Treaty* menjadi panduan dan merefleksikan penguatan dari Australia dan Indonesia memiliki hubungan pertahanan yang meyakinkan dan matang berdasarkan pada rasa saling menghargai dan saling percaya dimana selanjutnya kerjasama tersebut akan diperdalam dalam masalah-masalah keamanan bersama seperti terorisme, keamanan regional dan pembajakan.¹¹⁸

Tahun 2001 tercatat nilai ekspor Australia mencapai 3,2 milyar dollar Australia sehingga menjadikan Indonesia sebagai pasar ketiga bagi produk ekspor Australia. Pada tahun yang sama, neraca perdagangan kedua negara mencapai 7,1 milyar dolar Australia. Sedangkan nilai ekspor komoditi Indonesia ke Australia mencapai 3,9 milyar dolar Australia sehingga Australia mengalami defisit 690 juta dollar Australia. Sementara perdagangan jasa pada tahun 2000, Australia mengalami surplus senilai 291 juta dolar Australia. Produk ekspor Australia ke Indonesia, antara lain gandum, kapas, aluminium, produk peternakan, kendaraan penumpang dan permesinan. Sedangkan komoditi ekspor Indonesia ke Australia, antara lain berupa minyak mentah, barang perhiasan non-emas, mebel dan kertas.¹¹⁹

Kerjasama bilateral di bidang perdagangan antara Indonesia dengan Australia untuk tahun 1999-2000 yang sebesar empat milyar dollar AS, Indonesia masih mengalami surplus 30 persen.¹²⁰

Menurut data Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, volume perdagangan antar kedua negara tahun 2002-2005 mencapai lebih dari 3 miliar dolar Australia, di mana Indonesia mencapai surplus sebesar 544 juta dolar Australia dari Negeri Kangguru tersebut. Di bidang investasi, Departemen Luar Negeri Indonesia mengungkapkan bahwa Australia merupakan investor asing yang potensial bagi merupakan investor asing yang potensial bagi Indonesia dan menduduki peringkat kesembilan dengan total investasi sebesar 9,4 miliar dolar Australia dan jumlah investasi sekitar 4% dari total PMA.¹²¹

Australia dan Indonesia memiliki hubungan perdagangan dan investasi yang cukup besar. Nilai perdagangan kedua negara mencapai USD10,4 miliar

¹¹⁸ Joel Fitzgibbon MP, Media Release, "Minister for Defence Meets with Indonesian Counterpart for the First time", 27 Mar 2008,

¹¹⁹ Perdagangan RI-Australia Tidak Terpengaruh Kasus 11 September 2001, <http://www.2.kompas.com/business/news/0203/24/053422.htm> diakses 25 April 2009 pkl. 14.00 WIB

¹²⁰ Indonesia Alami Surplus Perdagangan Dengan Australia, <http://www.2.kompas.com/business/news/0010/20/13.htm> diakses 26 april 2009 pkl. 16.00 WIB

¹²¹ Kilas Hubungan Australia-Indonesia: Sarat Gejolak, <http://www.sigarharapan.co.id/berita/0601/26/lun04.htm> diakses 7 February 2009 pkl.14.00 WIB

pada 2006. Ekspor barang Australia ke Indonesia tumbuh sebesar 22,6% dengan nilai 44,4 miliar dolar Australia. Ekspor produk utama negara berpenduduk lebih dari 20 juta jiwa ini adalah gandum, minyak mentah, aluminium, ternak, dan kapas. Sementara ekspor barang Indonesia ke Australia, berkembang hingga 24,2% dengan nilai 4,5 miliar dolar Australia pada tahun 2006. Ekspor utama produk Indonesia ke Australia adalah minyak mentah, emas selain uang logam emas, kertas dan kardus, serta kayu olahan.

Perdagangan dan perniagaan antara Australia dan Indonesia semakin tumbuh. Perdagangan dua-arah telah meningkat menjadi 25,2% selama tahun 2000-2002. Lebih dari 400 perusahaan Australia melakukan perniagaan di Indonesia, mulai dari usaha pertambangan sampai telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan ini bekerja sebagai mitra dagang dengan perusahaan dan pemerintah Indonesia.¹²²

Selama 60 tahun terakhir hubungan antara pemerintahan RI dengan Australia banyak diwarnai dengan berbagai ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di berbagai sektor kehidupan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pertahanan RI, Juwono Sudarsono. ketimpangan-ketimpangan yang mempengaruhi pasang surutnya hubungan kedua negara antara lain adalah adanya perbedaan dari jumlah penduduk, ekonomi, dan kemampuan militer.¹²³

Menhan menjelaskan, ketimpangan-ketimpangan yang mempengaruhi pasang surutnya hubungan kedua negara antara lain adalah adanya perbedaan dari jumlah penduduk, ekonomi, dan kemampuan militer. Menurut Juwono, ketimpangan penduduk dan ketimpangan ekonomi diantara kedua negara adalah bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk 220 juta orang dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 256 Milyar Dolar, pendapatan perkapita sekitar 1300 Dolar US. Sedangkan Australia dengan jumlah penduduk sekitar 21 juta orang dengan perbedaan PDB cukup jauh sebesar yaitu 1 Triliun Dolar, dan pendapatan perkapita 35.000 Dolar Australia. Ditambahkan Jowono Sudarsono, betuk ketimpangan lain yaitu dilihat dari segi kemampuan militer yang dimiliki Indonesia dalam menggelar Tri Matra yang terpadu untuk mengamankan seluruh luas

¹²²Hubungan Luar Negeri Indonesia dengan Australia,
http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_luar_negeri_Indonesia_dengan_Australia,*Hubung ekonomi* diakses 10 February 2009 pkl.10.00 WIB

¹²³ Juwono Sudarsono, Hubungan Australia-Indonesia, Keynote Speech pada acara Lokakarya yang bertemakan "Perjanjian Keamanan Australia dan Indonesia Dari Perspektif Geopolitik Global dan Regional Serta Relevansinya Bagi Indonesia" yang diselenggarakan Dirjen Strahan Departemen Pertahanan bekerjasama dengan Pusat Kajian Australia Universitas Indonesia, di Kantor Dephan, Jakarta, 20 Juni 2006

wilayah Indonesia, dibandingkan Australia dengan biaya pertahanan sebesar 35-40 milyar dolar US, jelas terdapat perbedaan yang cukup signifikan.¹²⁴

Dari penjetasan di atas bisa disimpulkan bahwa Australia memang menganggap Indonesia sebagai ancaman potensial terhadap keamanan negaranya bisa dilihat dari dokumen penting yang dikeluarkan oleh Australia mulai dari *The Strategic Basis, The Strategic Review, Defence White Paper* bahkan pernyataan dari para menterinya dalam berbagai kesempatan dimana Australia selalu menekankan pentingnya Indonesia dalam pertahanan dan keamanan Australia. Sebaliknya, Indonesia justru tidak menganggap Australia sebagai faktor ancaman bagi keamanan negaranya. Indonesia lebih menekankan pada ancaman-ancaman internal dan non-tradisional sebagai ancaman potensial yang mungkin terjadi di Indonesia. Sekalipun di dalam buku putih pertahanan Indonesia, Dephan membahas dinamika yang terjadi diantara negara-negara besar baik di tingkat global dan regional, namun tidak terlihat pengaruh dinamika tersebut memiliki potensi ancaman bagi Indonesia. Hubungan Australia dan Indonesia lebih sering dipengaruhi oleh perbedaan cara pandang dari kedua negara dalam menghadapi suatu masalah. Tetapi Australia-Indonesia mengalami hubungan yang sangat mesra pada periode PM Keating dengan adanya hubungan personal dengan Presiden Suharto dan sukses dalam hubungan keamanan dengan ditandatanganinya *Agreement Of Maintaining Security* pada 1995.

Pada periode PM Howard juga Indonesia tetap dianggap sebagai potensi ancaman bagi keamanan Australia dan juga penting dalam kepentingan strategis Australia terlihat dalam Buku Putih Pertahanan Australia tahun 2000, *Defence Update 2003, Defence Update 2005* dan *Defence Update 2005*. Sedangkan hubungan pertahanan yang terjalin antara Australia dan Indonesia sudah ada sejak lama karena Australia menjelaskan bentuk kerjasama tersebut dalam *Defence Cooperation Program*¹²⁵ yang dibuat tahunan.

¹²⁴ Ibid

¹²⁵ Untuk penjelasan lebih lanjut tentang *Defence Cooperation Program* Australia bisa dilihat di BAB III dimana penulis membahas awal DCP, dana serta kegiatan yang ada dalam program DCP dimana data diperoleh dari *defence annual report* periode 1998-1999 sampai 2001-2001

BAB III. KERJASAMA PERTAHANAN AUSTRALIA DAN INDONESIA SEBELUM 2002

Kerjasama Pertahanan Australia-Indonesia telah berjalan sejak 1968 dalam kerangka yang informal. Bab ini akan membahas kerjasama pertahanan Australia dan Indonesia sebelum 2002 dimana didalamnya mencakup: pertama, awal kerjasama pertahanan Australia dan Indonesia awal 1968; kedua, mengapa Australia membina hubungan kerjasama pertahanan dengan Indonesia; ketiga, bentuk-bentuk kerjasama pertahanan dalam *Defence Cooperation Program* serta program kerjasama pertahanan yang diatur dalam *Australia's Defence Annual Report* periode 1999-2000 sampai 2000-2001. Yang terakhir, penulis fokus pada *Agreement of Maintaining Security* tahun 1995 dimana penulis mengulas latar belakang AMS tersebut sebagai bentuk formal dari kerjasama keamanan Australia dan Indonesia sebelum 2002 dan implikasinya terhadap kedua negara.

3.1. Awal Kerjasama pertahanan

Indonesia dan Australia mengawali kerja sama pertahanannya sejak 1968. Pernyataan tersebut didukung oleh dokumen Senat Australia bahwa kerjasama Pertahanan Australia dan Indonesia dimulai sejak 1968 dalam kerangka informal.¹²⁶ Kerjasama tersebut berlanjut sampai tahun 1972 dengan cukup banyak program kegiatan yang dilakukan. Salah satunya adalah *Defco (Defence Cooperation)* meliputi kegiatan seperti melakukan latihan perang bersama, patroli bersama, pemetaan bersama dan pertukaran personil. Australia menyediakan dana sebesar 10 juta dolar AS tiap tahunnya. Biaya tersebut dipakai untuk pengadaan berbagai peralatan pendidikan serta latihan. Indonesia menerima sejumlah pesawat Nomad untuk TNI-AU, kapal patroli;helikopter Sioux untuk latihan dasar TNI AU;bengkel pemeliharaan pesawat dan alat komunikasi Jip Landrough untuk TNI AD.¹²⁷ Pada dekade 1980-an, kerja sama tersebut diwadahi dalam suatu lembaga yang disebut "Indonesia-Australia Defence Cooperation Program" (DCP). DCP ini memiliki kegiatan rutin setiap tahun berupa pertemuan yang dilaksanakan secara bergiliran di Australia dan Indonesia, serta melakukan latihan bersama.

¹²⁶ Defence Cooperation Program by Country, http://aph.gov.au/Senate/committee/fact_cite/completed_inquiries/pre1996-def_coop_pojara06ch6.pdf diakses 24 Mei 2009 pkl.22.00 WIB

¹²⁷ Lembaga Informasi Nasional, *loc. cit*

Defence Cooperation Program dimulai sejak tahun 1960an, saat itu Australia sedang menghadapi perlawanan agresif dari Uni Soviet dan Cina, dua negara komunis yang melakukan ekspansi ke Asia tenggara dimana pada saat yang bersamaan, Inggris memutuskan untuk menarik pasukannya ke timur Terusan Suez. Dihadapkan pada keadaan keamanan yang sulit, AS merasa tidak perlu menawarkan komitmen untuk mencegah ancaman komunis terhadap Indonesia, negara tetangga terdekat Australia. Justru, komitmen tersebut muncul dari Australia dimana kebijakan pertahanan Australia "*Self Reliance*" pada saat itu adalah mengacu pada kebutuhan akan hubungan pertahanan yang kuat dengan negara-negara yang lebih kecil di kawasan. Pada tahun 1963, pengaturan pertahanan bilateral dibuat dengan Malaysia dan Singapura. Pada tahun 1968, Australia menjalinnya dengan Indonesia.¹²⁸

Ada beberapa hal yang menyebabkan Australia menjalin hubungan pertahanan dengan Indonesia antara lain karena faktor geostrategisnya, karena sesuai dengan kepentingan nasional Australia yaitu mewujudkan stabilitas dikawasan regional dimana hubungan dengan TNI adalah salah satu kunci penentu untuk menjaga stabilitas Indonesia. Selain itu, anggapan bahwa Indonesia adalah negara "dari dan melalui" mana ancaman akan datang ke Australia juga menjadi alasan pentingnya Indonesia bagi Australia.¹²⁹

Tujuan dari *Defence Cooperation Program/DCP* yang diberikan Australia antara lain: menjaga dan mempertahankan kepentingan pertahanan Australia di kawasan Asia Tenggara. Dimana kawasan Asia Tenggara dan kawasan Pasifik Barat merupakan daerah yang termasuk dalam kawasan strategis Australia. Penting bagi Australia untuk memastikan kedua kawasan tersebut berada dalam kondisi stabil dan mampu menjaga keamanan kawasannya. Dari segi militer, kerjasama pertahanan ini bertujuan untuk memajukan hubungan bilateral khususnya jaring pertahanan, untuk mempromosikan stabilitas politik dan perkembangan ekonomi di kawasan melalui program bantuan serta mengembangkan sikap bersahabat terhadap Australia.¹³⁰

¹²⁸ Lieutenant R.A. Niessl, *RAInf*, "The Relevance of the Defence Cooperation Program Between Australia and Indonesia", Australian Defence Force Journal No. 130 May/June 1998, Department of Defence: Canberra, 1998, hlm.49

¹²⁹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bab II dalam subbagian pandangan Australia tentang Indonesia dimana penulis menjelaskan arti penting Indonesia bagi Australia berdasarkan *the strategy basis, the strategic review dan white paper*.

Keuntungan dari kerjasama pertahanan dengan Indonesia antara lain: Australia mempunyai dasar kerjasama yang baik dalam konflik Timor-Timor dimana TNI menyiapkan akses masuk perwakilan kedutaan Australia untuk masuk ke Timor-Timor, Australia juga bisa bekerjasama menghadapi isu yang sama yaitu terorisme dimana hubungan pertahanan tersebut membantu kesiapan dan kerjasama ADF dan TNI pasca Bom Bali terutama dalam proses evakuasi medis. Hubungan pertahanan juga membangun ikatan personal yang kuat antara angkatan bersenjata kedua negara serta membuka kesempatan bagi Australia dan Indonesia untuk mendiskusikan isu-isu keamanan secara bersama khususnya untuk mewujudkan kawasan regional yang stabil.¹³¹

Secara militer Australia dan Indonesia memiliki hubungan dekat sekali. Selain saat Konfrontasi, sebelum kemerdekaan Timor Leste tentara Australia dan Indonesia sering bekerjasama. Antara tahun 1960 dan 1984, 1.100 anggota Angkatan Bersenjata berasal dari Indonesia berlatih di Australia. Anggota Angkatan Bersenjata Australia juga berlatih di Indonesia. Hal ini mencerminkan kedekatan dan kepercayaan yang berada antara Australia dan Indonesia. Pada tahun 1972 Australia menghadiahkan kepada Indonesia pesawat Sabre. Tentara Australia dan tentara Indonesia juga mempunyai proyek bersama termasuk gerakan tentara bersama untuk angkatan laut dan angkatan udara. Selanjutnya dalam tahun 1980an Australia dan Indonesia bekerjasama dalam Proyek Patroli Maritim. Proyek ini menyebabkan Australia menghadiahkan tentara Indonesia pesawat Nomad, kapal patroli, alat-alat untuk komunikasi lapangan, helikopter, penasehat dan proyek pembuatan peta topografi dan geologi yang bersama. Suasana kerjasama meninggi pada tahun 1981 dan 1982 dimana saat itu besarnya bantuan Australia untuk Indonesia menurut Program Kerjasama Pertahanan Australia (Defence Co-operation Program/DCP) berjumlah A\$8,6 juta.¹³²

Menurut Bilveer Singh, DCP dimulai pada 1972 dan memulai 3 tahun periode pertama dari 1972-1975 dengan dana A\$20m. Dalam DCP tersebut ada beberapa aktifitas yang dilakukan antara lain Australia menyediakan 16 pesawat Sabre. Australia juga mengikutsertakan 1000 personel militer Indonesia dalam

¹³⁰ "The Purpose of Defence Cooperation Program," dalam http://www.aph.gov.au/SENATE/committee/FADT_CITR/completed_inquiries/pre1996/def_co-op/asia/02h2.pdf diakses 27 Mei 2009 pkl. 10.00 WIB

¹³¹ Department of Defence Submission, *op.cit.*, hlm.6-7

¹³² H.D. Anderson. 1984. 'Australia-Indonesia Relations' dalam *Regional Dimensions of Indonesia-Australia Relations*. Jakarta : CSIS. h. 13 dikutip Ratican Rachel, "Pengaruh Kemerdekaan Timor Leste terhadap Hubungan Australia dan Indonesia," Universitas Muhammadiyah Malang, Juni, 2005

pelatihan di William Town Air Base di New South Wales. Aktifitas tersebut menghabiskan dana sekitar A\$6-7m dari A\$20m. Jumlah personil militer Indonesia yang berlatih di Australia semakin bertambah pada 1971 ada 79 personil menjadi 90 pada 1972. Australia juga setuju melanjutkan proyek pemetaan di Sumatra seluas 26.000 km² yang diharapkan selesai dipetakan pada 1972 dimana pemetaan tersebut melibatkan 80 personil militer Australia.¹³³

DCP periode kedua pada tahun 1975-1978 dengan dana sebesar A\$25 m dan program yang dijalankan adalah melanjutkan yang sudah ada dan juga mengembangkan program-program baru. Program yang termasuk dalam DCP tersebut adalah pendidikan bagi personil, latihan bersama, program pemetaan dan pengadaan pesawat Sabre. Australia juga menyediakan 12 helikopter Army Sioux termasuk pelatihan bagi para pilot helikopter selama 2 tahun. Sedangkan untuk program pemetaan, Irian Jaya dijadikan daerah pemetaan baru dibawah operasi Cendrawasih¹³⁴

DCP periode ketiga pada 1978-1986 sebesar A\$47,5m dimana aktifitas yang dilakukan antara lain pemetaan dan survey di daerah baru yaitu Maluku. Australia juga menyumbang 250 Land Rovers kepada TNI AD dan 2 kapal patroli kepada TNI AL¹³⁵.

Pada 1972, dimulai latihan bersama untuk pertama kalinya antara Angkatan Laut kedua negara.

Tabel 3.1 latihan bersama Australia dan Indonesia periode 1972-1986

Tahun	Latihan	Lokasi
1972	Southern Cross	Latihan Angkatan LAut di Perairan Indonesia
1973	Southern Cross	Latihan Angkatan LAut di Perairan Indonesia
1974	Southern Cross	Latihan Angkatan LAut di Perairan Indonesia
1975	Southern Cross	Latihan Angkatan LAut di Perairan Indonesia dan Kapal AL Indonesia

¹³³"The Purpose of ...," *ibid*

¹³⁴ Bitycer Singh, *op.cit.*, hlm.67

¹³⁵ *ibid*

		mengunjungi Australia
1977	Southern Cross	Latihan Angkatan LAut di Perairan Indonesia
1978	New Horizon 2	Latihan Angkatan LAut di Perairan Indonesia
1980-1981	New Horizon 80	Latihan Maritim di Laut Jawa
1981-1982	New Horizon	Latihan AL CPX di Australia
1982-1983	New Horizon 4	Latihan Maritim di Laut Jawa
1984-1985	New Horizon 84	Latihan gabungan maritime di Indonesia

Sumber: Bilveer Singh, *Defense relations between Australia and Indonesia in the post-Cold War Era*, Westport, Conn. Greenwood Pr, 2002

Latihan militer bersama saat ini sudah lebih luas daripada sebelumnya. Pada tahun 1970an dan awal 1980an, latihan bersama hanya terbatas pada "New Horizon" series yang merupakan latihan maritime bersama yang dilakukan secara bergantian. Pada Agustus 1993, latihan "New Horizon 7" diadakan di Darwin yang merupakan latihan angkatan laut bersama terbesar yang melibatkan 8 kapal RAN, pesawat RAAF dan 6 kapal laut Indonesia serta pesawat Nomad Indonesia.¹³⁶

Menurut dokumen Senat Australia dinyatakan bahwa kerjasama Pertahanan Australia dan Indonesia sudah dimulai sejak 1968 dalam kerangka informal. Pada Juni 1972, Pemerintah Australia mengumumkan secara resmi kerjasama pertahanannya dengan Indonesia senilai \$20m termasuk transfer ex pesawat Sabre milik RAAF senilai \$6.1m, pemetaan di Indonesia senilai \$2m dan daerah target senilai \$0.870m serta bantuan pelatihan. Pada 1975-1978, periode kedua DCP, Australia memberikan \$25m. Pada 1973, Indonesia menjadi penerima dana DCP terbesar dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya.

Pada November 1988, Panglima Angkatan Bersenjata Australia Jendral Gration mengunjungi Indonesia dan dibalas oleh Jenderal Try Sutrisno pada Juli 1989. Sementara itu, KSAD Jenderal Edi Sudrajat mengunjungi Australia pada

¹³⁶ Desmond Ball, *op.cit.*, hlm. 113

Agustus 1991 dan dilanjutkan pada September 1993 dalam kapasitasnya sebagai Menhankam. Pada April 1994, Pangab RI Jenderal TNI Faisal Tanjung bersama tiga mayjenya mengunjungi Australia. Bisa disimpulkan, saling kunjung antara perwira tinggi dan perwira menengah kedua negara, kunjungan kapal perang kedua negara merupakan bagian dari membina rasa saling percaya dan menghilangkan persepsi yang salah serta meningkatkan kerjasama militer kedua negara.¹³⁷

Pada tahun 1990 tiga kapal perang Australia kunjungi beberapa pelabuhan di Indonesia. Kapal-kapal tersebut adalah HMAS Parramatta, HMAS Swan dan HMAS Tobruk yang akan mengunjungi Jakarta pada 3-6 Oktober, Bali pada 8-10 Oktober dan Surabaya pada 11-15 Oktober. Dan HMAS Tobruk akan mengunjungi Ujungpandang pada 25-29 Oktober.¹³⁸

TNI AU dan RAAF mengadakan dua latihan bersama yaitu Rajawali Ausindo yang merupakan latihan bersama untuk melatih kemampuan pesawat C-130 sedangkan Elang Ausindo adalah latihan antara pesawat F/A 18 dari Australia dan pesawat F-5 dari Indonesia dimana latihan tersebut diadakan di Medan tahun 1993.¹³⁹

Latihan AL bersama "Ausina" dilaksanakan tahun 1994-1995 di laut Jawa yang bertujuan untuk melatih taktik maritim dasar dan prosedur maritim antara kedua negara. Latihan antara Angkatan Laut kedua negara juga meliputi pengawasan maritim dan prosedur patroli. Latihan "Night Komodo/Night Kookaburra 1995" merupakan latihan antara Angkatan Udara kedua negara yang bertujuan untuk latihan pasukan anti teroris dan juga terjun payung bersama.

"Elang Ausindo" adalah latihan AU bersama antara Australia dan Indonesia dimana kedua angkatan melatih taktik penyerangan di udara. Sedangkan "Rajawali Ausindo" adalah latihan bersama antara angkatan darat dimana latihan ini bertujuan untuk melatih kemampuan mengangkut pasukan di darat.

Menurut Desmond Ball, tahun 1994 hubungan pertahanan antara Indonesia dan Australia telah berkembang kepada titik dimana kerjasama terjalin lebih luas daripada kerjasama pertahanan dengan negara lain. Hubungan pertahanan juga merefleksikan hubungan yang akrab antara menteri luar negeri Australia Gareth Evans dan menteri luar negeri Indonesia Ali Alatas yang telah

¹³⁷ Desmond Ball, *op.cit.*, hlm.95-131

¹³⁸ Jakarta Post, 3 Oktober 1990

¹³⁹ *ibid*

dibangun sejak 1988. Hubungan pribadi antara Panglima Angkatan Bersenjata Australia Jenderal Peter Gration dan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia Jenderal Try Sutrisno juga terjalin dengan baik.¹⁴⁰ Pada Juli 1989, Tri Sutrisno mengunjungi Australia untuk membahas tentang pertahanan regional dan isu-isu keamanan, ia menyatakan:

*"Australia and Indonesia destined to live in geographic proximity, and such we, people's both countries, have to make the best of this living reality...I believe we have a common desire to achieve a peaceful and meaningful coexistence".*¹⁴¹

Hubungan pertahanan yang baik juga ditekankan oleh menteri Pertahanan John Moore dimana ia mengatakan bahwa hubungan antara Australia dan Indonesia sangat penting dan akan berlanjut ke hubungan yang kuat dan beragam. Hubungan ini akan menjadi kunci bagi dialog pertahanan yang lebih luas. Ia menekankan pentingnya hubungan antara militer Australia dan Indonesia sebagai cara yang jitu untuk mendukung proses reformasi dalam ABRI. Pentingnya hubungan pertahanan dengan Indonesia telah dibuktikan dengan adanya penandatanganan *Agreement of Maintaining Security* 1995 dan juga dokumen pemerintah the Strategic policy tahun 1997.¹⁴²

Hubungan Pertahanan Australia dan Indonesia adalah elemen yang penting dari keseluruhan hubungan bilateral dan juga mendukung pencapaian kepentingan nasional dan elemen kunci bagi Australia. Seperti ditegaskan dalam Buku Putih Pertahanannya, luas Indonesia dalam kawasan regional merupakan hal yang potensial yang mempengaruhi perkembangan stabilitas keamanan kawasan. Bukan hanya karena faktor geografi Indonesia yang penting bagi kepentingan strategis Australia tetapi juga karena perdagangan luar negeri Australia harus melewati jalur laut kepulauan Indonesia. Dari berbagai pertimbangan di atas, kunci dari tujuan hubungan pertahanan adalah untuk memperkuat masa depan Indonesia yang stabil dalam jangka waktu yang lama sehingga tercipta kestabilan di kawasan regional. Hal tersebut yang menyebabkan Australia fokus pada perkembangan hubungan pertahanan bilateral dengan cara bekerjasama menghadapi isu-isu keamanan yang muncul. Hubungan pertahanan dilakukan melalui kunjungan pejabat tinggi, dialog

¹⁴⁰ Desmond Ball, *op.cit.*, hlm. 107

¹⁴¹ Jenderal Try Sutrisno dikutip dalam P.J grenville, "Living with Indonesia", Asia Pacific Defence Report, Maret 1991 hlm.37

¹⁴² John Moore Minister of Defence, "Defence Minister To Visits Indonesia", Media Release 26 November 1998

strategis keamanan dan juga kontak pribadi dan interaksi professional dalam segala bidang. Australia juga memperkuat peranan TNI di Indonesia yang bercirikan professional, patuh pada hukum dan responsif pada tujuan.¹⁴³

Kerjasama pertahanan Australia-Indonesia juga merefleksikan adanya kebutuhan untuk memperkuat *confidence and security building measures* (CSMBs) dalam kawasan regional.

Serangan Bom Bali 12 Oktober 2002 melatarbelakangi pentingnya stabilitas Indonesia bagi kepentingan strategis Australia. Bagi Australia, Indonesia yang stabil dan memiliki posisi yang kuat untuk merespon ancaman terorisme regional akan lebih baik daripada Indonesia yang lemah dan tidak stabil. Keterlibatan Australia dengan TNI adalah salah satu cara untuk mendukung kepentingan Australia dalam menjaga stabilitas Indonesia. Australia akan terus bekerjasama dengan TNI dalam merespon ancaman teroris dimana keterlibatan Australia merupakan komponen penting dalam kerjasama bilateral. Hubungan pertahanan ini menguntungkan bagi Australia karena adanya akses operasional, pengawasan maritim, kerjasama evakuasi dan akses terhadap para pembuat keputusan di Indonesia. Hubungan pertahanan Australia dan Indonesia juga menyediakan kesempatan untuk berdiskusi tentang masalah kepentingan dengan TNI dan membahas isu keamanan yang muncul sehingga kedua negara bisa mempertahankan stabilitas kawasan.¹⁴⁴

Posisi Indonesia dan Australia sebagai tetangga terdekat mempunyai implikasi yang besar di bidang pertahanan. Dalam beberapa tahun terakhir, kerja sama kegiatan di bidang pertahanan ke dua negara meningkat cukup signifikan terutama sejak tragedi tsunami. Indonesia dan Australia menjalin hubungan kerja sama dalam bidang pertahanan dipayungi dalam sejumlah kesepakatan yang berbentuk MoU, diantaranya MoU *Concerning Stage 2 of Sioux Helikopter Project* yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1982, MoU *Concerning the Provision of Three Additional Attack Class Patrol Boats* yang ditandatangani di Jakarta tanggal 14 Desember 1983, MoU *on Depot Level Maintenance Pacility for Nomad Juanda Phase I*, tanggal 9 Nopember 1983, MoU *Cencerning the Army Communication and Electronics Project (COMLEC)* tanggal 9 Nopember 1984, serta , MoU *Concerning Long Term Attachment of a*

¹⁴³ Department of Defence Submission, *op.cit.*, hlm.5-6

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm.7

Survey Technical Officer to the Australian Army School of Military Survey
Bonegilla tanggal 14 Oktober 1985.¹⁴⁵

3.2. Bentuk-Bentuk Kerjasama Pertahanan Australia dalam *Defence Cooperation Program*

Dalam *Defence Cooperation Program*, ada beberapa bentuk kerjasama mencakup: training, pertukaran pelajar, latihan militer bersama, operasi gabungan, proyek bersama serta bantuan konsultasi dan saran.¹⁴⁶

Program Pelatihan dalam kerjasama pertahanan sangatlah penting, program tersebut antara lain: berbagi konsep dan doktrin, membuat jaringan secara pribadi ataupun kontak profesional, melatih kemampuan teknis serta membangun saling percaya dan menghilangkan salah persepsi antara kedua negara. Pada 1990, Jenderal Gration mengumumkan bahwa Australia akan menambah jumlah tempat bagi personil Indonesia di Akademi Militer Australia dan juga mengeksplorasi kemampuan personil ABRI untuk mengikuti pelatihan di Australia.¹⁴⁷

Ia juga menyatakan bahwa antara Australia dan Indonesia telah saling setuju untuk melakukan pertukaran pandangan secara regular tentang situasi strategis di kawasan regional. Pertukaran pandangan ini menambah level kunjungan para pejabat tinggi di militer kedua negara serta diskusi bilateral tentang pertahanan yang juga rutin dilakukan.¹⁴⁸

Latihan udara maritim gabungan antara TNI AU dan RAAF dilakukan di Laut Timor dan merupakan latihan gabungan militer pertahanan sejak 1999. Menteri Pertahanan Robert Hill mengatakan bahwa latihan Albatros Ausindo ini mendemonstrasikan komitmen yang diperbaharui antara kedua negara. Latihan ini merupakan kesempatan lebih jauh untuk membangun hubungan serta menunjukkan kerjasama dan komitmen yang telah di bangun dalam keamanan maritim. Latihan ini termasuk pelatihan pengawasan maritim yang menekankan interaksi antara kru penerbang dan tehnsi yang bertujuan memperbaiki kemampuan operasi antara kedua negara.¹⁴⁹

¹⁴⁵ <http://sawung.blogspot.com/2007/12/buku-putih-pertahanan-republik.html>

¹⁴⁶ Defence Force Journal No. 68 January/February 88 hlm.

¹⁴⁷ Desmond Ball, *op.cit.*, hlm.112

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm.109-110

¹⁴⁹ "Combined Defence Exercise with Indonesia",

http://www.defence.gov.au/minister/Hill/press/010104/010104_4774 diakses 20 Maret 2009 pukul 22.00 WIB

Berikut adalah tabel DCP Australia untuk Indonesia periode 1997-1998 sampai 2000-2001¹⁵⁰:

Tabel 3.2 Program Kerjasama Pertahanan periode 1997-1998- 2000-2001

Aktifitas	1997-98 \$m	1998-99 \$m	1999-2000 \$m	2000 -2001 \$m
Personil/Latihan/administrasi	1.0	1.254	1,531	1.250
Proyek	0.2	0.194	275	1
Pelatihan dan Kunjungan personil	4.1	4.566	3,428	2.104
Total Indonesia	5.3	6.014	5,234	3.355

Sumber: Laporan Pertahanan Tahunan Australia periode 1997-2008

Menurut tabel DCP periode 1997-1998, dana program untuk Asia Tenggara berkurang akibat dari krisis ekonomi di Asia dan latihan gabungan dengan Indonesia yaitu latihan Kookaburra juga ditunda pelaksanaannya.¹⁵¹

Berdasarkan *Defence Annual Report* 1998-1999, dukungan logistik dan personil Australia diberikan kepada Angkatan Laut Indonesia pada perbaikan pesawat Nomad dan juga sekolah pelatihan bahasa bagi angkatan bersenjata Indonesia. Kerjasama yang menguntungkan antara staf Angkatan Udara Indonesia dan pusat studi RAAF dimana pejabat Indonesia diikutsertakan dalam pelatihan komando Angkatan Laut dan pelatihan bahasa Inggris pada pusat bahasa internasional pertahanan. Kerjasama pertahanan termasuk penelitian terhadap pengaruh lingkungan terhadap GPS dan transmisi Frekwensi termasuk juga dukungan terhadap ratifikasi terhadap konvensi senjata kimia dan proyek manajemen pertahanan tingkat tinggi. Australia juga menyediakan training bagi 128 personil angkatan bersenjata Indonesia untuk mengikuti berbagai macam pendidikan seperti pasca sarjana di institut militer di bidang studi strategis dan pertahanan, navigasi, pengobatan, komunikasi, penjaga perdamaian, logistik dan kemampuan teknik.

Total DCP untuk Indonesia pada 1998-1999 adalah \$6.014 m dan pada 1999-2000 adalah \$5,234. Variasi jumlah dana merefleksikan adanya penundaan

¹⁵⁰ Data *Defence Cooperation Program* bagi Indonesia diambil dari *Defence Annual Report* periode 1997-1998, 1998-1999; 1999-2000; dan 2000-2001.

¹⁵¹ *Defence Annual Report* 1997-1998, hlm.79

beberapa kegiatan DCP setelah adanya keterlibatan Australia dalam mendukung PBB dalam operasi di Timor-timor.¹⁵²

Jika dilihat perkembangan DCP bagi Indonesia dari periode 1998-1999 maka terlihat ada penurunan, pada periode 1998-1999 adalah \$6.014m dan periode 1999-2000 adalah sebesar \$5,234m sedangkan pada periode 2000-2001 adalah \$3,355m. Sangat jelas terlihat penurunan DCP Australia bagi Indonesia dan penurunan dana pada periode 2000-2001 menurut Paul Iozzi Penasehat Keamanan Kedubes Australia di Jakarta disebabkan karena adanya pengurangan keterlibatan dalam aktifitas dengan Indonesia karena konflik Timor-Timor dimana dana dan pasukan Australia di fokuskan pada Timor-timor

Tabel 3.3 Program Kerjasama Pertahanan Australia terhadap Indonesia antara angkatan bersenjata periode 1998-1999.

Latihan	Angkatan Bersenjata	Tujuan	Hasil
Cassowary Series 12 - 18 Sept 1998 (99-01) 19 - 23 Apr 1999 Laut Banda	RAN, RAAF, TNI-AL	TMelatih Angkatan Laut Australia dan AL Indonesia dalam prosedur maritime unmtuk memperkuat kemampuan AL dan bertukar pengataman dalam latihan gabungan dimana latihan meliputi kapal patroli AL dan pesawat P3C	Latihan sukses sesuai dengan tujuan
Albatross Ausindo 20 Sept - 26 Oct 1998 98-4 Celah Timor	RAAF, TNI-AU	Latihan pengawasan maritime untuk lebih mengembangkan kekuatan angkatan Udara kedua negara.	Sukses
Rajawali Ausindo 12 - 16 Oct 1998	RAAF, TNI-AU	Melatih Taktis udara antara angkatan udara kedua Negara untuk saling mngembangkan kemampuan AU	Sukses
Elang Ausindo 98-5 11 - 21 Nov 1998	RAAF, TNI-AU RAAF Williamtown	Diskusi antara angkatan laut Australia dan Indonesia dan latihan bilateral antara AU TNI dan AU Australia	Kedua Negara saling memahami mengenai kemampuan dan kapabilitas pertahanan udara
Indonesia/Surabaya 23 - 26 Nov 1998	RAN, TNI-AL	Melatih kemampuan operasi kedua Angkatan melalui pemberian	Sukses

¹⁵² <http://www.defence.gov.au/budget/99-00/dar/dar01app.pdf>

		latihan pada petuga militer yang bertugas di pelabuhan	
Trisetia 98/99 19 - 29 Mar 1999 Jakarta	ARA, RAAF, TNI-AD ARA	Melatih kemampuan operasi gabungan pada semua elemen angkatan bersenjata	Sukses
Albatross Ausindo 29 Mar - 1 Apr 99-5 Bali	RAAF, TNI-AU	Latihan Gabungan antara kedua angkatan di kawasan kerjasama celah Timor	Sukses
Indonesia/Jakarta 3 - 4 May 1999 RAN, TNI-AL	RAN, TNI-AL	Melatih personil Angkatan yang bertugas di pelabuhan dan pelatihan dilaut khususnya para anggota AL dan melatih kemampuan berkomunikasi	Sukses
Indonesia/ Surabaya 17 - 21 Jun 1999	RAN, TNI-AL	Melatih kemampuan operasi khususnya dalam pelatihan personil di pelabuhan dan pelatihan di laut	Sukses

Sumber: Laporan Pertahanan Tahunan Australia, <http://www.defence.gov.au/budget/98-99/dar/dar99app.pdf>

Tabel 3.4 Latihan bersama Australia dan Indonesia periode 1999-2000

Latihan	Angkatan Bersenjata	Tujuan	hasil
FCP Kakadu IV Jul-Aug 1999	Australia Navy Air Force, Negara lain:ik Serikat, Selandia Baru, Indonesia, Malaysia, Singapore, Papua New Guinea	Melatih kemampuan operasi dengan angkatan bersenjata regional yang fokus pada pelatihan lingkungan.	Sukses sesuai dengan tujuan
ALBATROS AUSINDO 99-6 August 1999	Australia Air Force Indonesia	Latihan pengawasan maritime antara AU Australia dan Indonesia di celah Timor untuk mendekatkan jhubungan kedua angkatan agar lebih erat	Sukses dengan ditutupnya latihan dengan kunjungan STaf TNI AU dan adanya diskusi antara kedua angkatan
FCP Kakadu IV Cassowary Series Aug-Sep 1999; April 2000	Australia Navy, Air Force, Other Countries Indonesia	Untuk mengembangkan kemampuan operasi dalam pengawasan maritim	dibatalkan
ELANG AUSINDO September 1999	Air Force Other Countries Indonesia	Melatih kemampuan dan meningkatkan hubungan antara	dibatalkan

		angkatan udara Australia dan Indonesia	
Rajawali Ausindo 99-6 Sep-Oct 1999	Australia Air Force Other Countries Indonesia	Melatih kemampuan operasi kedua angkatan udara	dibatalkan
Trisetia Nov 1999	Australia Army Other Countries Indonesia	Melatih kemampuan operasi yang melibatkan semua elemen angkatan bersenjata	dibatalkan
New Horizon May 2000	Australia Air Force Other Countries Indonesia	Melatih kemampuan operasi bagi Angkatan Laut Australia dan Indonesia khususnya dalam pengawasan maritim	dibatalkan

Sumber: Laporan Pertahanan Tahunan Australia <http://www.defence.gov.au/budget/99-00/dar/dar00app.pdf>

Latihan Tasmanex 2000 dan Cassowary dibatalkan sehubungan dengan operasi militer di Timor-timor. Beberapa Latihan dengan negara lain seperti Bulleye, Maple Flag 2000, Day tiger, FCP 00-1, Gunrunner 2000, Trisetia, Fincastle 99, Rajawali Ausindo 99-6, Tamx series, Matakirea 2000 juga dibatalkan karena tidak tersedianya elemen pasukan karena semuanya difokuskan pada operasi di Timor-timor.

Khusus latihan bersama Indonesia seperti latihan Kakadu, Rajawali Ausindo, Albatros Ausindo, elang Ausindo, Tri setia, New Horizon dibatalkan pelaksanaannya karena konflik Timor-Timor dimana Australia mengurangi sejumlah aktifitas kerjasama pertahanannya dengan Indonesia dan lebih fokus pada pengiriman pasukan ke Timor-Timor. Tetapi bentuk kerjasama pertahanan dalam DCP berupa pertukaran dan pelatihan masih berjalan.

Dari data tabel diatas bisa dilihat bahwa latihan gabungan antara Australia lebih sering diadakan bagi angkatan laut seperti latihan Cassowary dengan tujuan pengawasan maritim serta pengawasan perbatasan. Latihan Albatros Ausindo, rajawali Ausindo dan Elang Ausindo merupakan latihan bersama antara TNI AU dan RAAF bertujuan untuk melatih kemampuan operasi di udara serta pengawasan perbatasan melalui udara. Sedangkan latihan Trisetia adalah latihan gabungan antara ADF dan TNI AD yang bertujuan melatih kemampuan operasi dalam strategi darat. Sedangkan Latihan Kakadu adalah

latihan gabungan dari beberapa Negara yaitu antara Australia, AS, Selandia Baru, Malaysia, Singapura dan Papua New Guini yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan operasi dengan angkatan bersenjata regional dengan fokus pada pelatihan lingkungan.

Proyek yang diadakan termasuk kerjasama pertahanan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta logistik. Australia juga mengadakan latihan bersama dengan Indonesia dalam menghadapi konflik Timor-timor. Pelatihan diutamakan kepada pasukan Australia yang bertugas di timor-timor. Pelatihan yang diberikan adalah kajian strategis dan pertahanan, navigasi, pengobatan, pasukan perdamaian, komunikasi, manajemen teknik, sistem pelatihan, logistik dan pengawasan perbatasan maritim. Personil Indonesia juga menghadiri konferensi RMA. Variasi dana kerjasama pertahanan ini merupakan refleksi dari banyaknya kegiatan bilateral yang muncul dari meningkatnya hubungan setelah keterlibatan Australia dalam pasukan PBB ke Timor-timor.

Tujuan program Kerjasama Pertahanan untuk mendukung kepentingan strategis pemerintah yaitu berkontribusi untuk menjaga keamanan regional, bekerjasama dengan aliansi, partner regional dan yang lainnya untuk menjaga lingkungan global dan regional, berkonsolidasi agar Australia bisa diterima sebagai negara yang berlegitimasi dalam mengantarkan isu yang mempengaruhi keamanan regional dan memperkuat dan mendukung perkembangan pertahanan yang saling mempercayai di antara negara-negara di kawasan regional. Dimana aktifitas yang termasuk didalam program kerjasama pertahanan adalah bantuan terhadap militer dalam daerah perencanaan strategis, komando dan kontrol, infrastruktur, komunikasi dan dukungan logistik. DCP ini juga mendukung latihan bersama untuk memperbaiki kemampuan negara-negara di kawasan regional untuk menyumbang terhadap keamanan regional.¹⁵³

Berdasarkan *Defence Annual Report 2000-2001* beberapa latihan yang dijadwalkan antara 1999-2000 dibatalkan atau ditunda sampai periode 2000-2001 atau bahkan dikurangi wilayahnya karena ketidaktersediaan dari elemen pasukan Australia dikarenakan banyaknya pasukan yang diarahkan kedalam operasi ke Timor-Timor. Walaupun hal ini menyebabkan pengurangan program latihan ADF hal ini tidak merefleksikan pengurangan jumlah training dan pasukan Australia tetap memperoleh keuntungan dari operasi tersebut.¹⁵⁴ Penurunan

¹⁵³ *Defence Annual Report 2003-2004*, http://www.defence.gov.au/budget/03-04/03_04_outcome5_6_coop.htm,

¹⁵⁴ *Defence Annual Report 2000-2001*, hlm 267

dana DCP periode 2000-2001 dikarenakan karena banyaknya pengeluaran departemen termasuk adanya inisiatif penghematan dana departemen, transfer dana dalam keterlibatan pasukan di Timor-Timor, penyesuaian harga, pengurangan kegiatan di Indonesia dan penyesuaian gaji militer. Krisis Timor juga menyebabkan dampak yang serius bagi kerjasama pertahanan Australia-Indonesia sebagai akibatnya sejumlah program pelatihan dan latihan bersama dikurangi.¹⁵⁵

Kerjasama Pertahanan antara Australia dan Indonesia walaupun berkurang dalam ruang lingkup dan jumlah tetap dilanjutkan dalam bentuk pelatihan, pertukaran dan kunjungan staf universitas dan juga konsultasi pada level senior. Proyek kerjasama utama dengan Indonesia adalah dukungan dalam pengadaan pesawat Nomad.

Tabel 3.5 Kunjungan Royal Australian Navy Ship ke Indonesia periode 2001-2002

tanggal	Nama/jenis kapal	Pelabuhan yang dikunjungi
2-4 Mei 2001	HMAS Geraldton Fremantle Kapal Patroli	Benoa, Bali
28 Juni-2 Juli 2001	HMAS Huon and HMAS Hawkesburry Kapal Penyapu ranjau	Surabaya
27 Juli- 3 Agustus 2001	HMAS Leuwin Kapal survey	Benoa, Bali
25 September 2001	HMAS Adelaide Guided Missile Frigate	Banten
2-4 Mei 2002	HMAS Westralia Underway replenishment Ship	Benoa, Bali
12-17 Juni 2002	HMAS Benalla and HMAS Shepparton Kapal survey	Benoa, Bali
21-23 Juni 2002	HMAS Success	Jakarta

¹⁵⁵ Ibid., hlm.275

	Auxiliary Oiler Replenishment	
3-5 Juli 2002	HMAS Leuwin Kapal survey	Kendari
16-19 Agustus 2002	HMAS Diamantina and HMAS Norman Mine Hunter Coastal	Jakarta
24-25 Agustus 2002	HMAS Cessnock and HMAS Geelong Freemantle kapal patroli	Surabaya

Sumber::Submission No 92, Inquiry into Australia's Relation with Indonesia,Department of Defence annex C

Kunjungan kapal-kapal tersebut menjadi indikasi adanya hubungan yang intim dalam kerangka hubungan pertahanan yang dilaksanakan sebelum kejadian Bom Bali I 12 Oktober 2002. Kunjungan kapal Australia tersebut juga merupakan bagian dari kerjasama pertahanan selain kunjungan pejabat militer, training, pertukaran pelajar/staf dan latihan bersama.

Tabel 3.6 Pertukaran/Pelatihan di Australia dan Indonesia periode 2002

Indonesia di Australia	Australia di Indonesia
Pusat Pelatihan Internasional Pertahanan (setiap 2 tahun sekali)	Pusbasa-Pusat Bahasa Indonesia Inggris (setiap 2 tahun sekali)
Pusat Aerospace Australia (2 tahun sekali)	Instruktur RAAF di SESKO (2 tahun sekali)
3 kali pertukaran personil AU,AL dan AD	Masing-masing 1 siswa AL, AD dan Au di SESKO
3 kali personil Indonesia mengikuti Kursus Pertahanan Strategis	3 kali personil Adf menjadi anggota tim Perbaikan pesawat Nomad
16 kali personil militer Indonesia memperoleh beasiswa pasca sarjana pertahanan di Australia	1 siswa Australia ditugaskan di AL
4 kali personil Indonesia menghadiri pelatihan pertahanan Australia dan pelatihan bahasa asing	
2 kali personil Indonesia mengikuti	

kursus pelatihan pertahanan Australia	
2 kali personil militer mengikuti kursus	
5 kali personil militer menghadiri seminar manajemen pertahanan	

Sumber: Submission No 92, Inquiry into Australia's Relation with Indonesia, Department of Defence annex B

Data latihan diatas menunjukkan kedekatan hubungan pertahanan Australia dan Indonesia. Pertukaran personil militer memang lebih sering dilakukan oleh Indonesia termasuk mengikuti kursus, pelatihan, serta belajar di universitas pertahanan di Australia. Australia sendiri lebih sering mngirimkan tenaga ahli dalam suatu tim untuk perbaikan pesawat Nomad. Seperti tujuan Australia sendiri dalam melakukan kerjasama pertahanan dengan negara-negara yang masuk kedalam RSPI nya yaitu untuk menjaga keamanan kawasan Australia sendiri dengan membantu negara-negara tetangganya menjadi stabil dan aman.

3.3. *Agreement of Maintaining Security (AMS) 1995*

Berbeda dengan pemerintahan Buruh yang lebih menekankan kerjasama regional seperti upaya Australia membentuk APEC pada tahun 1989 dan aktifnya Australia dalam forum-forum internasional maka pada masa koalisi liberal tegas dinyatakan bahwa penekanan pada hubungan bilateral lebih diutamakan. Dalam kaitannya dengan hubungan bilateral tersebut, empat negara yang paling penting adalah Amerika Serikat, Jepang, Cina dan sebagian negara-negara di kawasan Asia Pasifik serta Indonesia sebagai negara tetangga yang memiliki posisi geostrategis dan geopolitik yang amat penting bagi Australia.¹⁵⁶

Semasa partai buruh berkuasa ada beberapa perjanjian penting yang ditandatangani oleh kedua negara antara lain: perjanjian penghapusan oajak berganda, pembentukan forum menteri Australia-Indonesia, perjanjian pengembangan industri strategis dan perjanjian pertahanan/Arrangement of Maintaining Security pada Desember 1995. Semuanya merupakan bagian dari proses perluasan dan pendalaman hubungan kedua negara.¹⁵⁷

Persetujuan keamanan 1995 tersebut mengikat Australia dan Indonesia dalam bentuk yang formal walaupun kedua negara sudah memiliki keterhubungan pertahanan yang tidak formal sejak awal kemerdekaan RI.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Ikrar Nusa Bakti, *op.cit.*, hlm.16-17

¹⁵⁷ *ibid.*, hlm.30

¹⁵⁸ *ibid.*, hlm.38

Untuk menampilkan keseriusan Australia dalam negosiasi, Keating memilih tiga pejabatnya yaitu Kepala angkatan Bersenjata, Jenderal Peter Gration, orang yang dipercaya dan dihormati di Indonesia. Kedua, penasehat urusan luar negerinya Allan Gyngell dan ketiga, duta besar Australia untuk Indonesia Allan Taylor. Indonesia sendiri memilih sekretaris Negara Moerdiono. Soeharto mempercayainya karena keahliannya dalam menangani negosiasi yang paling penting bagi Indonesia. Di Australia sendiri hanya sedikit yang peduli dengan keberadaan dari team negosiasi ataupun tujuan negosiasi tersebut. Gareth Evans, Robert Ray, Jenderal John Baker dan beberapa pejabat Negara sudah bersumpah untuk menjaga kerahasiaan negosiasi tersebut karena akan gagal jika dibuka di debat publik. Negosiasi tahun 1994 berjalan lambat dan baru materinya disampaikan oleh Australia kepada Moerdiono pada September 1994. Setahun kemudian, Keating dan Suharto bertemu membahas perjanjian keamanan tersebut dan kemudian Moerdiono dan Gration yang membuat rancangan final tentang perjanjian keamanan tersebut. Pada November dalam konferensi APEC di Osaka, Suharto dan Keating bertemu dan membahas perubahan akhir pada rancangan perjanjian keamanan dan 18 Desember 1995 menteri luar negeri dari kedua negara menandatangani perjanjian tersebut. Australia meratifikasi perjanjian keamanan tersebut setelah kunjungan pertama Howard ke Jakarta sebagai PM.¹⁵⁹

Dari perjanjian tersebut dinyatakan adanya pertemuan tingkat menteri yang diadakan untuk membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keamanan dan untuk membangun kerjasama yang menguntungkan bagi kedua negara. Setelah ditandatangani, pertemuan antara menteri luar negeri telah dilakukan setahun sekali dan pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah pertemuan pejabat pemerintah yang lain seperti pertemuan komite kerjasama pertahanan Australia dan Indonesia dan dibawahnya juga terdapat pertemuan sub komite dan *working group*. Pertemuan-pertemuan tersebut menghasilkan suatu forum untuk membahas lebih jauh soal kerjasama yang sudah ada seperti Perjanjian Zona Celah Timor.¹⁶⁰

Isi dari perjanjian keamanan 1995 dibuat karena kedua negara ingin memperkuat persahabatan yang ada di antara keduanya. Perjanjian itu juga

¹⁵⁹ Group Captain Brenton Crowhurst, "The Australian-Indonesian Security Agreement: Where Did it Come From – Where is it Going?", dalam *Australian Force Defence Journal* no.132 September-October 1998, Canberra: Department of Defence, 1998, hlm. 37

¹⁶⁰ Ibid.

mengakui pentingnya jaminan perdamaian dan stabilitas kawasan sebagai cara untuk menjamin adanya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bagi kedua negara. Kedua negara menyetujui bahwa para menteri negara akan secara tetap berkonsultasi mengenai masalah-masalah keamanan dan mereka akan saling berkonsultasi jika terjadi tantangan yang sifatnya bermusuhan terhadap kepentingan keamanan bersama. Kedua negara juga akan mempertimbangkan tindakan individual atau tindakan bersama yang mungkin diambil dan mereka akan bekerjasama dalam masalah-masalah keamanan. Perjanjian ini tidak berlaku terhadap komitmen internasional yang ada pada kedua negara. Perjanjian itu juga didasarkan atas kesepakatan mengenai perlunya menghormati kedaulatan, kemandirian politik, dan integritas kawasan bagi semua negara.¹⁶¹

Perjanjian kerjasama keamanan itu juga berarti pemberitahuan ke publik bahwa kedua Negara yakin akan masa depan hubungan mereka dan kedua Negara berkeinginan untuk bekerjasama tidak hanya dalam bidang keamanan tetapi juga politik dan ekonomi hal ini terlihat dalam perjanjian:

“The Parties agree to promote – in accordance with the policies and priorities of each – mutually beneficial cooperative activities in the security field in areas to be identified by the two Parties.”

Dari pandangan Australia, perjanjian keamanan ini merupakan hasil dari peran Australia untuk ikut terlibat dalam urusan regional serta menegaskan peran Australia sebagai *middle power* di kawasan Asia. Bagi Indonesia, perjanjian ini semakin menguatkan anggapan bahwa Indonesia adalah ancaman bagi Australia serta merefleksikan kebutuhan Indonesia akan diplomasi Australia untuk mengurangi perasaan anti-Indonesia yang merebak di kalangan rakyat Australia menyusul kasus Timor. Perjanjian ini juga menformalkan segala bentuk hubungan kerjasama pertahanan dengan Australia dan pengenalan posisi Indonesia sebagai negara yang stabil yang memiliki hubungan internasional dengan negara-negara barat.¹⁶² Australia menganggap Indonesia adalah ancaman keamanan terbesar bagi negaranya dan para pemimpin militerpun berpendapat sama walaupun dari segi kemampuan militer Indonesia lemah.

¹⁶¹ www.dfat.gov.au/publications/ahj/index.html diakses tanggal 10 Maret 2009 pukul 22.00 WIB

¹⁶² Gary Brown, Frank Frost and Stephen Sherlock, "The Australian-Indonesian Security Agreement - Issues and Implications", Research Paper 25 1995-1996, www.apf.gov.au diakses 07 februari 2009 pukul 22.00 WIB

Dengan adanya AMS ini, Australia merasa aman dari ancaman Indonesia karena kedua negara terikat dalam suatu bentuk perjanjian keamanan. Sebaliknya, dari perjanjian keamanan ini, Indonesia ingin menunjukkan bahwa tidak ada hal yang perlu ditakuti dari Indonesia dan Indonesia tidak memiliki ambisi terhadap Australia. Indonesia hanya menekankan pada hubungan diplomatik, ekonomi dan perdagangan dengan Australia.¹⁶³

AMS 1995 ini memberi dampak yang positif bagi stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara dan merupakan salah satu mata rantai kerjasama bilateral dan multilateral yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dari sisi domestik politik, perjanjian keamanan 1995 lahir tak lama setelah terjadinya pergantian pemerintahan dari PM Hawke ke PM Keating yang sama-sama berasal dari Partai Buruh.¹⁶⁴

Bagi Australia sendiri, kesimpulan akhir dari perjanjian keamanan dengan Indonesia berarti pada akhirnya Australia berhasil membuat bentuk kerjasama formal dengan seluruh negara-negara tetangganya. Sebelumnya, Australia telah membuat perjanjian kerjasama dengan Selandia Baru, Papua New guinea, Malaysia dan Singapura. Selain itu, perjanjian ini merupakan hasil akhir dari diplomasi personal antara PM Keating dan Presiden Suharto sebelum Australia mengadakan pemilihan PM yang baru. Bagi Indonesia, perjanjian ini merupakan suatu momen yang penting karena untuk pertama kalinya Indonesia membuat perjanjian keamanan dengan suatu negara yang bertentangan dengan politik luar negerinya dalam bentuk formal.¹⁶⁵

Namun kekalahan Paul Keating menjadi signifikan karena dua hal yaitu pertama ia terikat dengan Australia-Indonesia *Agreement of Maintaining Security* 1995. apapun substansinya, AMS merupakan simbol kedekatan dan asa saling mendukung dan menghormati antar kedua negara dan hal ini jarang terjadi dalam hubungan bilateral yang selalu labil. AMS dibangun berdasarkan strategi yang dipromosikan oleh Menlu Ali Alatas dan Gareth Evans, untuk memecahkan persoalan-persoalan dan membangun jangkar dalam hubungan bilateral. PM Keating mengekspresikan secara terbuka dan lugas apa yang diterima pendahulunya, bahwa kestabilan yang diciptakan Suharto dengan prinsip anti komunis, rezim yang terpusat dan stabil yang menghasilkan pertumbuhan

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ Ikrar Nusa Bakti, *Merajut Jaring-Jaring Kerjasama Keamanan Indonesia-Australia: Suatu Upaya menstabilkan Hubungan Kedua Negara*, Orasi Pengukuhan Profesor Riset bidang Wilayah Asia Pasifik, Jakarta: LIPI, 2006

¹⁶⁵ Gary Brown, Frank Frost and Stephen Sherlock, " *The Australian-Indonesian Security...* "

ekonomi berkelanjutan merupakan pengaruh yang paling menguntungkan bagi lingkungan strategis jangka pendek bagi Australia. Signifikansi strategis Indonesia bagi Australia tidak tertandingi oleh negara manapun.¹⁶⁶

AMS 1995 juga menunjukkan bahwa diantara para perancang strategi tidak lagi terjadi mispersepsi yang dapat merusak hubungan keduanya. Bahkan hubungan antara ABRI dan ADF bisa disebutkan sebagai hubungan yang terkokoh dan terstruktur dibandingkan dengan aspek lainnya. Untuk itu AMS diciptakan untuk memberikan landasan prediktabilitas hubungan antara keduanya dan memberikan kepastian keamanan bagi terciptanya tatanan keamanan nasional.¹⁶⁷

Bisa dipastikan AMS ini merupakan langkah Australia untuk mempertahankan keamanannya sebab *insecurity* di Indonesia akan mempengaruhi iklim keamanan Australia.¹⁶⁸

Penandatanganan Persetujuan Keamanan Australia-Indonesia pada 18 Desember 1995 merupakan suatu tonggak sejarah yang menandai lembaran baru didalam mendekatkan kerjasama antara kedua negara. AMS bukan hanya sekedar pemeliharaan keamanan tetapi lebih jauh merupakan suatu pernyataan rasa saling percaya antar kedua negara.¹⁶⁹

Persetujuan keamanan Indonesia-Australia memberikan suatu kepastian kepada Canberra-Jakarta, jika menghadapi "suatu ancaman", untuk melakukan suatu konsultasi dan perlakuan aktifitas yang kooperatif untuk mengantisipasinya. Persetujuan tersebut menunjukkan kematangan hubungan bilateral antara kedua negara dengan komitmen timbal balik meskipun dilingkupi oleh realitas perbedaan antara keduanya.¹⁷⁰

Menurut Ikrar Nusa Bakti¹⁷¹, ada beberapa hal yang menyebabkan perjanjian AMS ini amat penting dan membuat kaget banyak pihak yaitu pertama, setelah setengah abad Indonesia merdeka, baru pertamakalinya Indonesia mengikat diri dengan negara lain dalam persetujuan keamanan. Tidaklah mengherankan jika beberapa kalangan baik didalam maupun diluar negeri mempertanyakan apa maksud dari persetujuan keamanan tersebut. Kedua, tidak seperti Australia yang strategi pertahanannya lebih *outward looking*, budaya

¹⁶⁶ Richard Chauvel, Chusnul Mar'iyah, *Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005. hal 2-3

¹⁶⁷ Ikrar Nusa Bakti, Ganewati Wuryandari dan M Rifqi Muna, *op.cit.*, hlm. 78-79

¹⁶⁸ *ibid.*, hlm. 65

¹⁶⁹ *ibid.*, hlm. 88

¹⁷⁰ *ibid.*, hlm. 89

¹⁷¹ *ibid.*, hlm. 38-39

strategi pertahanan keamanan Indonesia lebih memfokuskan pada stabilitas keamanan didalam negeri atau *inward looking*. ketiga, jika Australia lebih memprioritaskan matra laut dan udara, Indonesia sendiri lebih fokus pada matra darat tetapi Indonesia dan Australia memiliki kemiripan persepsi strategis tentang keamanan regional.

Bagi Indonesia sendiri, persetujuan keamanan tersebut juga merupakan perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bagaimanapun, persetujuan tersebut telah mengurangi makna dan prinsip dasar pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif karena Indonesia menjalin ikatan dengan kekuatan barat. Namun jika melihat kepada kenyataan bahwa berakhirnya perang dingin telah merubah konstelasi strategi dan hubungan internasional, maka pembentukan kerjasama keamanan antara Indonesia dan Australia hanyalah merupakan kondisi dinamik dari interpretasi bebas aktif di dalam iklim baru Asia Pasifik dan global yang sudah berubah.¹⁷²

Dari sisi pandang kedua negara, persetujuan pemeliharaan keamanan tersebut merupakan suatu upaya untuk mengubah tipe hubungan kedua negara yang sebelumnya dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang memberi dampak positif maupun negatif bagi hubungan kedua negara seperti tampak pada pola hubungan Indonesia-Australia dari tahun 1945 sampai 1995, kepada suatu pola hubungan yang lebih teratur dan memiliki lingkup yang luas serta persepektif yang panjang.¹⁷³

Secara struktural, *defence relationship* antara Australia-Indonesia untuk mengimplementasikan AMS dikelola dengan menggunakan staf *Regional Engagement Policy and program Branch* dan Kedutaan Australia di Jakarta dengan sumber-sumber dana dan manusia diberikan dari *Australia Defence Headquarters, services* dan program lainnya.¹⁷⁴

Hubungan pertahanan Australia dan Indonesia telah mencapai *Intermediate stage* dan berbeda dengan ANZUS yang telah mencapai *Mature Stage*. Perjanjian ANZUS merupakan pakta militer dilihat dari isinya yang menyatakan jika salah satu anggotanya diserang maka negara-negara penandatanganan lain akan secara otomatis membantunya. Sebaliknya AMS 1995 dapat dikatakan semi pakta militer karena mengandung unsur konsultasi untuk

¹⁷² *ibid.*, hlm.90

¹⁷³ *ibid.*, hlm.44

¹⁷⁴ *ibid.*, hlm.48

membentuk pertahanan bersama antara kedua negara apabila salah satu negara mengalami kesulitan keamanan.¹⁷⁵

Persetujuan pemeliharaan keamanan ini juga bermakna ekonomi dan bukan sekedar politik dan pertahanan dilihat dari pasal 2 perjanjian tersebut yang menyangkut *external challenges* yang bisa saja di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Melalui kerjasama keamanan ini akan meningkatkan kerjasama pengembangan teknologi untuk kepentingan sipil dan militer.¹⁷⁶

Howard sendiri dalam pidatonya dalam *Joint Conference Australia-Indonesia Business Council* menyatakan bahwa kedua negara berperan penting dalam mengkonsolidasikan kepentingan keamanan yang saling menguntungkan. Kedua negara memahami perjanjian keamanan secara formal dimana mereka memiliki kepentingan strategis pada keamanan dan stabilitas masing-masing negara dan juga kepentingan pada stabilitas kawasan. Australia menyadari bahwa masalah keamanan adalah masalah yang vital dalam hubungan kedua negara. Pemerintah Australia berkomitmen untuk membangun perjanjian tersebut termasuk mengadakan program pertahanan bilateral melalui pertukaran, latihan dan pelatihan bersama.¹⁷⁷

Pada tahun 2001, Angkatan Bersenjata Australia mengajak Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk meningkatkan kembali hubungan militer kedua negara yang memburuk sejak Australia memimpin pasukan penjaga perdamaian di bekas Provinsi Timor Timur, tahun 1999 lalu. Menanggapi keinginan Australia tersebut, Panglima TNI Widodo AS mengatakan, saat ini yang harus dilakukan adalah merumuskan konsep-konsep hubungan militer yang realistis di antara kedua negara secara bertahap. Hubungan antar-Angkatan Bersenjata harus didasari perasaan saling percaya dan saling menghormati. Ia menegaskan bahwa hubungan ini harus didasari *mutual trust* dan *mutual respect*.¹⁷⁸

Pengeboman Bali 12 oktober 2002 setahun setelah peristiwa 11 september 2001 mengingatkan seluruh bangsa bahwa teroris memang beroperasi di wilayah mereka dan siap melakukan serangan acak atau non diskriminatif. Peristiwa mengerikan ini tidak hanya membunuh warga Indonesia

¹⁷⁵ *ibid.*, hlm.46

¹⁷⁶ *ibid.*, hlm.50

¹⁷⁷ Alexander Downer, *Australia and Indonesia: Opportunities for Cooperation*, Speech by Minister for Foreign Affairs, to the Joint Conference of the Australia-Indonesia Business Council/Indonesia-Australia Business Council, Melbourne, 18 June 1996, dari www.dfat.gov.au diakses 21 Maret 2009 pukul 21.00 WIB

¹⁷⁸ "Australia ingin tingkatkan hubungan militer", <http://www.depkeu.go.id/indonesiadesk.php?name=News&file=print&id=1108> diakses 7 Februari 2009 pukul 21.00 WIB

tapi juga orang Australia dan merusak keseluruhan citra pulau Bali sebagai tempat teraman di Indonesia. Tetapi respon Polri sangat cepat dalam sebulan polisi mampu menyelidiki dan menyeret para pelaku ke pengadilan. Kerjasama Australia dan Indonesia dalam investigasi kasus Bom Bali I 2002 lebih dari sekedar kerjasama yang baik, suksesnya penyelidikan ini menjadi titik balik hubungan Australia-indonesia yang memburuk akibat kasus Timor Leste tahun 1999.¹⁷⁹

Tidak mengejutkan, debat di Australia pasca Bom Bali terlihat sebagai panggilan terhadap Australia agar lebih konsentrasi pada keamanan kewasannya. Akan sangat mudah untuk berargumen bahwa Canberra menghadapi pilihan antara perang melawan teror di negaranya sendiri atau perang melawan teror secara bersama-sama di kawasan. Yang sangat penting, era pasca Bom Bali lebih dari sekedar pertanyaan bagaimanana Australia menjaga pertahanannya melewati lingkaran konsentris. Walaupun Australia memiliki aset pertahanan yang lebih bukan berarti dengan mudah Australia bisa memindahkan angkatannya ke dalam kawasan untuk merespon serangan semacam itu. Beberapa aset ADF baru dipakai setelah serangan bom Bali 12 Oktober 2002 termasuk pesawat transportasi untuk mengangkat tim media. Karena respon yang lebih banyak datang dari Kepolisian Federal Australia dan Badan Intelijen Australia dalam bentuk peningkatan kerjasama intelijen. Kasus bom Bali menekankan keterbatasan pemikiran keamanan menggunakan cara militer dan kebutuhan untuk terlibat dan yang paling akhir, integrasi militer dengan menggunakan aset non militer.¹⁸⁰

Pemboman di Bali telah mengingatkan Australia akan pentingnya keamanan Indonesia. Bom yang membunuh puluhan warga Negara Australia dan juga Indonesia juga mengancam stabilitas pemerintahan Megawati. Australia yakin bahwa kuncinya untuk menangani masalah terorisme adalah membangun kembali kemampuan Australia untuk bekerjasama secara efektif dengan Indonesia dengan cara mendukung pemerintahan yang stabil dan demokratis di Indonesia dan juga bekerjasama dengannya. Disini difokuskan pada pentingnya bekerjasama dengan institusi lain seperti kepolisian dan pengadilan untuk memerangi teroris dan memperkuat kapabilitas mereka daripada hanya menekankan hubungan pada angkatan bersenjata Indonesia. Wajah baru

¹⁷⁹ Richard Chauvel, Chusnul Mar'iyah, *op.cit.*, hal 35

¹⁸⁰ Robert Ayson, *Australian Defence and Security Challenge: A Tale of Three Posts*, NZ International Review January/February, 2003

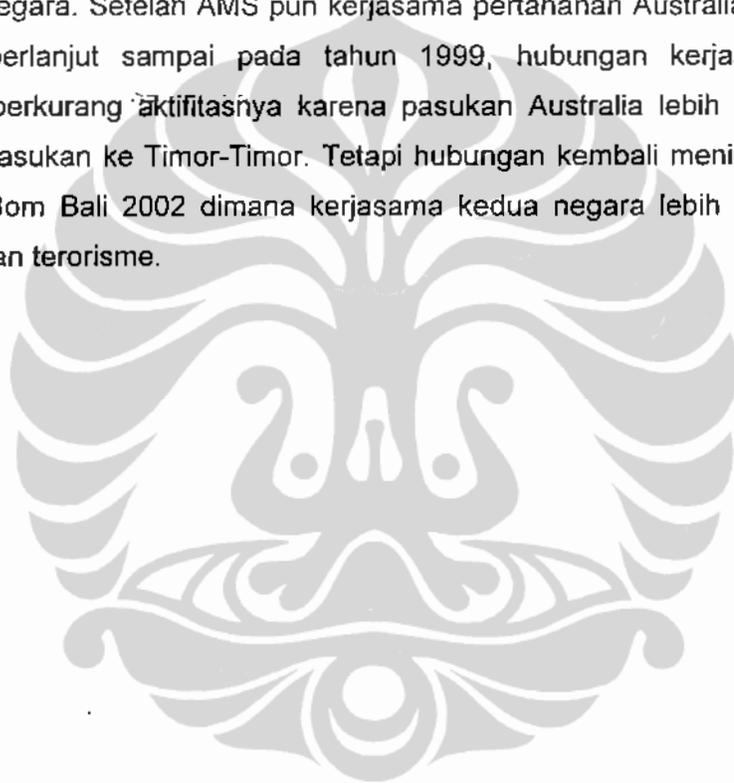
tantangan yang dihadapi Australia akan berubah menjadi transformasi bentuk kerjasama dimana Australia bekerjasama dalam lingkungan yang lebih luas dalam memerangi teroris selain kepentingan Australia terhadap demokrasi, stabilitas dan keamanan di Indonesia.

Hubungan dalam berbagai aspek dalam keamanan dengan Indonesia menjadi sangat penting dan kasus bom Bali 2002 pada akhirnya memperdalam kerjasama kedua negara. Respon yang efektif terhadap teroris sangat penting bagi Australia tetapi yang menjadi masalah adalah pemerintahan Indonesia yang lemah pada saat itu yang tidak mampu mengantarkan pentingnya isu teroris. Penelitian di Australia menyarankan untuk melakukan apapun untuk mendukung dan memperkuat pengembangan demokrasi di Indonesia sehingga Australia akan tetap aman.¹⁸¹

Kerjasama Pertahanan antara Australia dan Indonesia sudah berlangsung lama dimulai sejak 1968 dalam bentuk informal walaupun penulis tidak mendapat data secara rinci seperti pada bentuk kerjasama pertahanan dalam *Defence Annual Report* periode 1998-1999 sampe 2001-2002. Penulis merasa yakin bahwa hubungan pertahanan telah berjalan dengan baik dilihat dengan adanya kunjungan-kunjungan dari pejabat militer kedua negara serta adanya pelatihan yang diadakan oleh Australia. Justru pada saat krisis Timor-Timor dimana banyak terjadi kesalahpahaman dan konflik politik saling menjatuhkan di media, hubungan pertahanan antara Australia tetap berjalan walaupun beberapa kegiatannya dikurangi. Kembali ke pernyataan Atase pertahanan Australia Ian Errington bahwa Apapun masalah yang dihadapi Australia-Indonesia, hubungan militer tetap berjalan. Penulis sangat setuju dengan pendapat tersebut dibuktikan dengan adanya data-data dari pemerintah Australia secara resmi mengenai bantuan pertahanan kepada Indonesia serta dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa Indonesia sangat penting dimata Australia. Fakta sejarah juga bahwa keterhubungan pertahanan dan keamanan antara Australia dan Indonesia telah dimulai sejak masa kemerdekaan 1945 dimana partai Buruh Australia sangat mendukung kemerdekaan Indonesia dengan cara menolak permintaan tentara sekutu untuk mengirimkan tentara ke Indonesia untuk membangun kembali pemerintahan Kolonial Belanda.

¹⁸¹ Aida Borgu, "Beyond Bali: ASPI's Strategic Assessment 2002", Australia: ASPI, 2002, hlm.35.
www.ASPI.org diakses 22 Maret 2009 pukul 23.00 WIB

Setelah masalah Timor-Timor, Australia dan Indonesia berusaha bangkit kembali menjalin hubungan dan kedua negara menandatangani MoU kerjasama penanggulangan terorisme. Bom Bali 2002 yang memakan korban dari kedua negara telah menjadi satu pemicu untuk kembali berhubungan baik dan menata kembali hubungan yang sempat koyak karena berbagai masalah di masa lalu. Bisa disimpulkan bahwa kerjasama pertahanan sebelum Bom Bali 2002 memang sudah ada dan terbagi kedalam berbagai aktifitas seperti training, pertukaran dan latihan bersama. Kerjasama AMS pada 1995 akhirnya menjadi tonggak sejarah hubungan kedua negara. Setelah AMS pun kerjasama pertahanan Australia dan Indonesia tetap berlanjut sampai pada tahun 1999, hubungan kerjasama pertahanan agak berkurang aktifitasnya karena pasukan Australia lebih fokus pada pengiriman pasukan ke Timor-Timor. Tetapi hubungan kembali meningkat setelah peristiwa Bom Bali 2002 dimana kerjasama kedua negara lebih fokus pada pemberantasan terorisme.



BAB IV. KERJASAMA PERTAHANAN AUSTRALIA DAN INDONESIA SETELAH BOM BALI 2002

Bab ini akan membahas: Pertama, kerjasama pertahanan Australia dan Indonesia dalam DCP periode 2002-2003 sampai 2007-2008 termasuk didalamnya besarnya dana dan bentuk latihan bersama Australia dan Indonesia; kedua, Dialog Strategis Pertahanan antara ADF dan TNI dari 2002-2008 dimana penulis akan menguraikan isi dari Dialog Strategis Pertahanan dan apa saja yang dihasilkannya; Ketiga bentuk kerjasama keamanan yang formal "*Lombok Treaty*" yang ditandatangani tahun 2006 dimana didalamnya akan dibahas latar belakang perjanjian keamanan tersebut, isi dari perjanjian dan implikasi perjanjian keamanan tersebut bagi Australia dan Indonesia.

Kerjasama Pertahanan Australia-Indonesia dalam DCP periode 2002-2008

Lingkungan strategis pasca bom Bali mengarahkan kerjasama pada level kunjungan pejabat senior pada akhir 2002 dan awal 2003. Dialog diperkuat dengan kunjungan Kepala Staf Angkatan Udara Australia pada Agustus 2002 dan keikutsertaan angkatan bersenjata kedua negara dalam forum menteri Australia-Indonesia pada Maret 2003. Tetapi terjadi penurunan bantuan kerjasama pertahanan terhadap Indonesia menjadi \$4,583m.¹⁸²

Australia mengadakan operasi *Bali Assist* pada November-Desember 2002 yang dilaksanakan oleh personil *Australian Defence Force*/ADF dengan tujuan untuk menyediakan sarana evakuasi medis dan logistik dan juga bantuan personil dari Australia. ADF mengadakan lima kali misi evakuasi dari Bali ke Darwin dan empat kali misi evakuasi dari Darwin ke negara bagian lain di Australia

Program DCP Australia untuk Asia tenggara periode 2002-2003 turun sekitar \$4m dikarenakan banyaknya peristiwa-peristiwa tak terduga seperti penyebaran virus SARS dan meningkatnya operasi yang dilakukan Australia sehubungan dengan perang Irak. Australia juga tetap memberikan bantuan pada perkembangan angkatan bersenjata Timor-Timor.¹⁸³

¹⁸² Ibid., hlm. 177

¹⁸³ Defence Annual Report periode 2002-2003, <http://www.defence.gov.au/annual02-03/ganda0203.pdf>, hlm. 174

Australia dan Indonesia kembali melanjutkan hubungan pertahanan yang fokus pada kepentingan yang saling menguntungkan. Pasca Bom Bali menyebabkan adanya penundaan sejumlah kunjungan pejabat senior pada pertengahan 2002 dan awal 2003 tetapi kunjungan oleh panglima Angkatan Udara pada Agustus 2002 tetap dilakukan dan juga program pelatihan bahasa bagi tentara Indonesia tetap dilaksanakan. Sedang untuk latihan gabungan, pada periode ini tidak ada.¹⁸⁴

Tabel 4.1 Latihan Gabungan Australia dan Indonesia dan Negara lain periode 2003-2004

Latihan	Angkatan Bersenjata	Negara peserta	Tujuan	Status
Kakadu VI/03 July – August 2003	AL dan AU	Brunai, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Selandia Baru, Philipina, Papua New Guinea, Republic of Korea, Singapura, Thailand and Vietnam.	Mengadakan serangkaian latihan perang-perangan dengan angkatan laut dan angkatan udara regional untuk memperbaiki kesiapan dan kemampuan operasi dan saling pengertian antara angkatan di kawasan regional	sukses
Pacific Airlift rally 2003	AU	Bangladesh, Brunai, Kanada, India, Indonesia, Jepang, Laos, Malaysia, Mongolia, Philipina, Papua New Guinea, Republic of Korea, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Rusia and Sri Lanka	Meningkatkan keterlibatan regional dan koalisi angkatan udara melalui symposium dan latihan pertukaran teknis bagii penyelamatan kemanusiaan termasuk teknik menurunkan, mengangkat korban dan penyelamatan	Ditunda sehubungan dengan tingginya tempo operasi pasukan Australia dan Amerika Serikat

¹⁸⁴ Ibid., hlm 177

Tempest Express-6 March 2004	ADF	Kanada, Fiji, Perancis, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Mauritius, Selandia Baru, Philipina, Papua New Guinea, Singapura, kepulauan Solomon Thailand, Tonga, Inggris, Amerika Serikat, Vanuatu, Banglades, Cina, Republic of Korea, Madagascar, Maldives, Nepal, Rusia, Sri Lanka and PBB	Melatih kemampuan pasukan gabungan dalam menghadapi krisis	Sukses dan semua tujuan tercapai.
---------------------------------	-----	---	--	-----------------------------------

Sumber: Laporan Pertahanan Tahunan Australia, <http://www.defence.gov.au/budget/03-04/cari/dar04app.pdf>

Program latihan bersama Australia dan Indonesia secara khusus dalam DCP periode 2003-2004 tidak ada tetapi Indonesia ikut serta dalam latihan gabungan bersama negara lain dalam "Kakadu VI, Pacific Airlift Rally 03 dan Tempest Express 6" seperti pada tabel diatas dimana latihan gabungan tersebut bertujuan untuk melatih pasukan dalam keterlibatan regional dan koalisi serta melatih kemampuan operasi antara negara-negara peserta latihan gabungan tersebut. Latihan Kakadu dan *Tempest Ekpress* sukses dilakukan dan Australia meyakinkan bahwa tujuan latihan tersebut telah dicapai. Sedangkan latihan *Pacific Airlift* ditunda pelaksanaannya karena adanya peningkatan operasi militer oleh Australia dan AS.

Pada periode ini dana DCP naik sekitar \$0,6m menjadi \$5,048m dikarenakan adanya perbaikan dari kegiatan-kegiatan kerjasama yang dikurangi pada periode 2002-2003. Pada saat ini kerjasama pertahanan fokus pada penanggulangan teroris. Hubungan pertahanan Australia-Indonesia terlihat meningkat dengan banyaknya kunjungan dalam level pejabat senior dan panglima angkatan bersenjata kedua Negara serta pembicaraan antara angkatan darat dan angkatan laut.. Hubungan pertahanan bilateral berkembang dengan baik selama periode ini. Pembicaraan dimulai dari level senior yaitu kunjungan

Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia ke Australia pada Desember 2003 dan kunjungan kepala Angkatan laut Australia ke Indonesia pada Februari 2004.¹⁸⁵

Indonesia juga melakukan kunjungan kapal laut ke Australia pada 10-13 Oktober 2004. Dua kapal Angkatan laut Indonesia, kapal patroli KRI Hiu dan KRI Tjiptadi mengunjungi HMAS Strirling di Perth dan kunjungan kedua pada 14-17 Oktober 2004 dimana tiga kapal KRI Karl Satsuitubun, KRI Fatahila dan KRI Arun. Kunjungan tersebut sekaligus melatih kemampuan operasi antara Angkatan Laut Australia dan Indonesia.¹⁸⁶

Tabel 4.2 Latihan gabungan Australia, Indonesia dan negara-negara lain periode 2005-2007:

Latihan	Angkatan Bersenjata	Negara peserta	Tujuan	Status
Kakadu vii/05 July–August 2005	AL dan AU	Indonesia, Malaysia, Selandia baru, Singapura, Papua New Guinea	Mengembangkan hubungan dan kemampuan operasi antara negara –negara di kawasan regional	Terlaksana
Pacific Airlift Rally 2005 August 2005	AU	Bangladesh, Brunai, Kanada India, Indonesia, Jepang, Laos, Malaysia, Mongolia, Philipina, Papua New Guinea, Republic of Korea, Rusia, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam	Memperkuat keterlibatan regional dan koalisi melalui simposium militer dan pertukaran teknik pengangkut dalam pesawat khusus.	Terlaksana
Regional Counter Terrorist Subject Matter Expert Exchange August 2005	Pasukan Khusus	Kamboja, Cina, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, selandia Baru, Papua New Guinea, Philipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam	Memperbaiki kemampuan operasi dalam penanggulangan teroris dengan cara berbagi informasi, metodologi, taktik, teknik dan prosedur serta kebijakan	Terlaksana

¹⁸⁵ Ibid., blm 174-

¹⁸⁶ Indonesian Navy Ships To Visit Australia, <http://www.defencetalk.com/> diakses 22 April 2009 pkl.22.00 WIB

Albatross AusIndo 06 May 2006 Navy and Air Force Indonesia	AL dan AU	Indonesia	Memperkuat hubungan antara Au Australia dan AU Indonesia dan meningkatkan keamanan maritim.	Ditunda dan dijadwalkan ulang pada Desember 2006
Cassowary 06 ⁽¹⁾ May 2006	AL	Indonesia	Mengembangkan kemampuan operasi maritime antara pasukan pengawas maritime Australia dan Indonesia.	Ditunda dan dijadwalkan ulang pada November 2006
Kartika Exchange '06 June–July 2006	AD	Australia, Indonesia	Memperluas pengalaman dan pengetahuan profesional dari para perwira militer terpilih melalui pertukaran personil yang saling menguntungkan	Nama latihan diganti menjadi Kartika Burra dan dijadwalkan ulang pada November 2007
Cassowary '06[4] November 2006	Navy	Australia, Indonesia	Melaksanakan latihan patroli pengawasan maritim bersama	terlaksana
Rajawali AusIndo '06[5] November–December 2006	AU	Australia, Indonesia	Melaksanakan latihan gabungan dalam teknik penurunan dengan AU Australia dan Indonesia.	Terlaksana
Albatross AusIndo '06 December 2006	AU	Australia, Indonesia	Melaksanakan latihan pengawasan maritime yang saling menguntungkan bagi kedua negara	Dibatalkan oleh Indonesia
Cobra Gold '07[6] May 2007	AL, AD dan AU	Australia, Thailand, Amerika Serikat, Indonesia, Jepang and Singapura	Berperan serta dalam latihan tahunan pasukan perdamaian Thailand dan Amerika Serikat yang diadakan di Thailand untuk memperkuat To participate in this annual Thailand–United States peacekeeping exercise held in Thailand to enhance Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) interoperability.	Terlaksana

Data diolah sendiri oleh penulis dari *Defence Annual Report 2005-2006 dan 2006-2007*

Latihan Kakadu dan Pacific Airlift sama seperti periode sebelumnya adalah latihan yang bertujuan untuk memperkuat keterlibatan regional dan koalisi serta melatih dan mengembangkan kemampuan operasi antar pasukan dikawasan. Australia juga mengadakan latihan pencegahan teroris dengan mengadakan pertukaran ahli teroris dengan beberapa negara termasuk Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan operasi dengan berbagi metodologi dan kebijakan anti teroris serta teknik dan prosedur penanganan.

Sedangkan latihan khusus antara Australia dan Indonesia pada periode 2005-2007 adalah Albatross Ausindo 06, Cassowary 06, Kartika Exchange 06, Rajawali Ausindo 06 serta Albatross Ausindo 06. latihan Albatross dan Cassowary ditunda pelaksanaannya yang semula Mei 2006 dijadwalkan ulang pada November dan Desember 2006. latihan Kartika juga ditunda yang semula pada Juni-Juli dirubah namanya menjadi Kartika burra dan dijadwalkan ulang pada November 2006. sedangkan latihan Rajawali Ausindo dibatalkan oleh Indonesia. Latihan Cobra Gold adalah latihan antara Australia, AS, Thailand, Indonesia, Jepang dan Singapura bertujuan untuk melatih kemampuan operasi antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Komandan Maritim Australia Davyd Thomas resmi membuka Latihan Kakadu di Darwin. Sekita 1700 personil pertahanan dari enam negara yaitu Indonesia, Singapura, Selandia Baru, Malaysia, PNG ikut serta dalam latihan maritime bersama. Latihan ini dilaksanakan dari 26 Juli sampai 12 Agustus 2005. kapal KRI Fatahillah dari Indonesia, KD Jebat dari Malaysia, kapal patroli PNG HMPNGS Tarangau dan HMPNGS Dreger, kapal Singapura RSS Valiant dan RSS Valour serta pesawat Singapura F-50 dan pesawat patroli maritim Selandia Baru P3K Orion. Pengamat dari India, Perancis, Korea Utara serta Thailand datang dalam latihan tersebut. Latihan Kakadu ini sangat berguna bagi angkatan bersenjata Australia juga sebagai kelanjutan dari niat baik dan saling pengertian antara angkatan bersenjata di kawasan regional.¹⁸⁷

Kepala Dinas Penerangan Mabes TNI-AL Laksamana Pertama Slamet Yulistiyono mengatakan selama ini, meski hubungan politik kedua negara kerap mengalami pasang surut namun hubungan militer terutama angkatan laut kedua negara berjalan baik dan terus mengalami peningkatan. Tentara Nasional

¹⁸⁷ www.defence.gov.au/kakadu/default.htm

Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dengan Angkatan Laut Australia (Royal Australian Navy/RAN) terus meningkatkan kerjasama pengamanan di wilayah perbatasan laut kedua negara. tingginya angka kegiatan ilegal di wilayah Timur Indonesia dan perbatasan laut RI-Australia membuat kedua pihak harus membangun kerjasama yang konstruktif dalam berbagai bidang, seperti patroli bersama, pertukaran perwira, serta latihan bersama angkatan laut kedua negara.¹⁸⁸

Pada pertengahan November 2006, TNI-AL dan RAN menggelar latihan bersama bersandikan Cassowary Exercise (Cassoex) 2006 di Darwin, Australia. Dalam kegiatan itu, dilibatkan empat kapal perang masing-masing dua KRI dari jajaran Koarmatim yakni KRI Layang-801 dikomandani Mayor Laut (P) Dato Rusman dan KRI Kakap-811 yang dikomandani Kapten Laut (P) Rio Muko. Sedangkan dua kapal perang dari Australia yakni HMAS Albany-86 dengan Komandan LCDR Jasson Hunter serta HMAS Dobbo-214 yang dikomandani LCDR Mitchel Edwards. Cassoex 2006 yang digelar selama satu pekan diawali dengan gladi lapang dari perairan Darwin, Australia pada pertengahan Nopember 2006 hingga bergerak sampai Tennau Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Materi latihan selama kapal berlayar dari Darwin, Australia menuju Kupang, NTT itu meliputi latihan menembak baik siang maupun malam hari dengan sasaran kapal permukaan atas air, udara, manuver kapal-kapal. Materi lainnya yaitu kesiapan prajurit untuk menempati pos-pos tempur, latihan pembekalan dan kerjasama taktis pemeriksaan di laut, patroli bersama dan kerjasama taktis pertolongan kecelakaan di laut.¹⁸⁹

Selain meningkatkan profesionalisme, kemampuan dan ketrampilan prajurit angkatan laut kedua negara, kegiatan juga dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara yang lebih baik.¹⁹⁰

Kepala Dinas Penerangan Umum Mabes TNI Kolonel CAJ Ahmad Yani Basuki mengatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Bersenjata Australia sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang pendidikan, latihan dan pertukaran perwira antara kedua angkatan bersenjata yang dituangkan dalam nota kesepakatan kedua angkatan bersenjata yang akan ditandatangani pada Juni 2007. Ia juga mengatakan, kerja sama angkatan

¹⁸⁸ Al. Tingkatkan kerjasama dengan Angkatan Laut Australia, [http://www.depnan.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=7416](http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=7416) diakses 19 April 2009 pkl.11.00 WIB

¹⁸⁹ www.unl.ac.id/news.php?id=113012006112601

¹⁹⁰ *ibid*

bersenjata kedua negara telah berjalan baik dan terus mengalami peningkatan, bahkan kedua pihak telah menandatangani "*Frame Work Of Security Agreement Indonesia-Australia*" di Lombok setahun silam. Panglima TNI dan Panglima Angkatan Bersenjata Australia akan bertemu di Singapura pada 1 hingga 3 Juni untuk membahas lebih lanjut hubungan bilateral militer kedua negara dimana pembahasan akan ditindaklanjuti secara intensif dilanjutkan penandatanganan kesepakatan kerjasama kedua pihak pada 7-8 Juni 2007 di Jakarta. Australia dan Indonesia menyepakati untuk mengintensifkan latihan bersama kedua negara. Selama ini hubungan kedua angkatan, terutama angkatan laut telah berjalan dengan baik.

Adapun latihan kerja sama yang telah dilakukan antara angkatan laut kedua negara adalah latihan bertajuk "Burung Kasuari" yang dimulai sejak November 2006, dan dilaksanakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Darwin, Australia. Sementara itu, kapal angkut HMAS Manooora milik Angkatan Laut Australia sejak mengunjungi Indonesia dalam rangka kunjungan persahabatan dan bersandar di Dermaga 115 Pelabuhan Tanjung Priok. HMAS Manooora merupakan kapal angkut yang mampu membawa sekitar 450 personel lengkap dengan kendaraan dan peralatan tempurnya.¹⁹¹

Bentuk kerjasama antara Australia dan Indonesia juga dalam bentuk pelatihan berupa *Aviation Safety Officer (ASO)* yang diikuti oleh para perwira TNI AU berbagai kesatuan yang berterlibat langsung dalam penerbangan seperti Penerbang, Navigator, Tehnisi dan Kru Kesehatan. Tujuan pelatihan ini adalah agar para perwira yang tugasnya dilapangan dapat menentukan dan merencanakan kebijakan. Kursus ini berlangsung tanggal 18 Juni- 29 Juni 2007, atas kerja sama antara TNI AU dengan *Royal Australia Air Force (RAAF)* di Lanud Halim Perdanakusuma, dengan para instruktur dari *mobile training team RAAF*.¹⁹²

Latihan Bersama (Latma) antara TNI Angkatan udara dan RAAF (Royal Australian Air Force) dengan nama sandi "Elang Ausindo 2007", dihadiri oleh Kepala Staf Koopsau II Marsekal Pertama TNI Benyamin Dandel dan Atase

¹⁹¹ Angkatan Bersenjata RI-Australia Tingkatkan Kerja Sama, <http://www.kemhan.go.id/keajaibane.com/news.html?ref=173583> diakses 22 April 2009 pkl.13.00 WIB

¹⁹² 33 Perwira TNI AU Ikut Kursus ASO, http://www.tni-an.mil.id/e_content.asp?contentid=1096 diakses 14 April 2009 pkl.15.00 WIB

Pertahanan Australia Kolonel Raymond Press, dalam upacara militer di Apron Galaktika Lanud Hasanuddin yang dihadiri Komandan Lanud Hasanuddin, Marsekal Pertama TNI Eddy Suyanto, pejabat Koopsau II, Kosekhanudnas II, Lanud Hasanuddin serta pejabat dari Kodam VII Wrb, Lantamal VI, Polda Sul-Sel dan Kepala Cabang Angkasa Pural.¹⁹³

Latma Elang Ausindo 2007 yang dilaksanakan sampai tanggal 21 September 2007. melibatkan alat utama sistem senjata dari TNI Angkatan udara berupa empat pesawat F-16 Fighting Falcon dengan personel 116 orang, sedangkan dari RAAF melibatkan enam buah pesawat tempur jenis F-18 Hornet dengan personel 95 orang. Adapun tujuan Latma Elang Ausindo 2007 adalah untuk lebih mempererat hubungan persahabatan antara TNI Angkatan Udara dengan Royal Australia Air Force (RAAF), selain itu juga untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan kerjasama para personel Angkatan Udara kedua negara. Sedangkan macam dan metode dalam Latma Elang Ausindo 2007 adalah latihan taktis dengan materi latihan meliputi *Dissimilar Basic Fighter Manouver (DBFM)*, *Dissimilar Air Combat Manouver (DACM)*, *Dissimilar Air Combat Tactic (DACT)* serta *Combine Strike*. Sasaran yang dicapai dalam latihan adalah meningkatkan jalinan persahabatan antara TNI AU dengan RAAF serta kerja sama dan saling pengertian diantara personel peserta latihan.¹⁹⁴

Pada tahun 2006, TNI Angkatan Udara dan Royal Australia Air Force (RAAF) menggelar latihan udara bersama dengan sandi "Rajawali Ausindo 2006" di Pangkalan Richmond Air Force Base (AFB). Australia dari tanggal 27 November-1/Desember 2006. Rajawali Ausindo merupakan latihan bersama antara TNI AU dengan RAAF dalam bidang operasi udara dengan menggunakan pesawat angkut jenis C-130 Hercules, yang melibatkan personel dari para penerbang Skadron udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma, Skadron Udara 32 Lanud Abdul Saleh. Malang, Navigator, Flight Engineer, Load Master, Paskhasau serta Perbekud TNI AD serta dari RAAF Skadron 37 yang menggunakan pesawat C-130 dan C-130J. Latihan yang dilaksanakan diantaranya adalah *Demonstration of Drop Operations*, *Demonstration and Training Container Delivery System (CDS) Operations*, *Demonstration of Combat Offload Operations*, *review of Maintaining Platform and BP Systems*, *Review of Ideal Dropping Zone and Air*

¹⁹³

¹⁹⁴ Latma Elang Ausindo 2007, <http://www.anc-aa.nil.id/content.asp?contentid=825> diakses 15 April 2009 pkl.01.19 WIB

*Drop Procedures, Review of Land Operation and Procedures, Review of Assault Operation and Procedures, serta Review and Demonstrate Cargo Rigging.*¹⁹⁵

Tujuan latihan Rajawali Ausindo adalah untuk mempererat hubungan persahabatan kedua negara khususnya kedua Angkatan Udara antara TNI AU dan RAAF, selain itu diharapkan pula dapat meningkatkan profesionalisme para Penerbang beserta Crew C-130 Hercules dalam taktik dan teknik Operasi Udara. Sasaran latihan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan operasional awak C-130 dalam bidang Cargo Drop, kemampuan penerbang C-130 dalam melaksanakan "*Tactical Flying*" serta dapat menambah pengetahuan dari awak pesawat C-130 RAAF dalam taktik dan teknik penerbangan dropping dengan pesawat C-130 dan C-130J. Sedangkan latihan lain yang dilaksanakan dengan Australia adalah Elang Ausindo yang mengutamakan kemampuan para penerbang pesawat tempur dalam pertempuran udara (*Dog fight*) serta Camar Ausindo latihan bersama tentang Patroli Udara Bersama.¹⁹⁶

Hubungan pertahanan antara Australia dan Indonesia terjalin dalam segala level angkatan dari angkatan laut, darat dan udara. Angkatan Laut Australia menikmati hubungan baik dengan Angkatan Laut Indonesia (TNI-AL) dimana hubungan yang terjalin berlandaskan hubungan pribadi yang erat, dialog teratur dan pembicaraan tingkat strategis, interaksi operasi dan pelatihan serta bekerja sama untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan bencana di kawasan. Kunjungan Kapal Penyapu Ranjau Australia HMAS Gascoyne dan HMAS Diamantina menambah erat hubungan pertahanan kedua negara. Kedua kapal tiba di Jakarta dengan lebih dari 90 awak kapal untuk suatu kunjungan tiga hari (11-14 Juli 2008) sebelum kembali ke perairan Australia utara dimana mereka akan ambil bagian dalam salah satu latihan maritim multilateral terbesar Australia.¹⁹⁷

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Bill Farmer mengatakan penguatan kerjasama pertahanan merupakan unsur penting Perjanjian antara Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (Traktat Lombok) yang mulai berlaku awal tahun ini. Ia menekankan bahwa kunjungan persahabatan ini

¹⁹⁵ TNI AU dan RAAF Gelar Latihan bersama Rajawali Ausindo 2006, http://www.walri.org.au/isp/contentid_1115 diakses 20 April 2009 pkl.10.00 WIB

¹⁹⁶ibid

¹⁹⁷Kapal Penyapu Ranjau Aussie Merapat di Tanjung Priok, www.10zone.com diakses 22 April 2009 pkl.22.00 WIB, lihat juga siaran media, Kapal Angkatan Laut Australia Disambut secara Resmi dalam Pelayaran Persahabatan ke Indonesia, tanggal 11 Juli 2008 dari Kedutaan Australia, <http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/home.html>

merupakan contoh praktis bagaimana dua negara kita terus-menerus memperkuat hubungan pertahanan.¹⁹⁸

Dialog Strategis Pertahanan ADF dan TNI 2002-2008¹⁹⁹

Pertemuan informal antara Dephan/TNI dengan *Australian Defence Force* yang ke I dilaksanakan tahun 2001 dan sempat tertunda pelaksanaan IASDS pada tahun berikutnya karena insiden Bom Bali I pada Oktober 2002. IASDS ke II selanjutnya dilaksanakan tahun 2004 dimana pertemuan dilaksanakan pada tanggal 9 – 10 Agustus 2004 di Hyatt Regency, Yogyakarta. Indonesia sediri diikuti oleh Dirjen Strahan Dephan dengan anggota delegasi dari pejabat Dephan, Mabes TNI, Bais TNI, Mabesad, Mabasal dan Mabasau. Sedangkan delegasi Australia dipimpin oleh Mrs. Myra Rowling, *First Assistant Secretary International Policy, Department of Defence*, dengan anggota delegasi terdiri dari pejabat Dephan dan Angkatan Bersenjata Australia serta Kedubes Australia di Jakarta. Pertemuan menekankan arti pentingnya membina dan meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara yang mengalami pasang surut terutama paska jajak pendapat di Timor Timur September 1999.

Materi yang dipresentasikan oleh Indonesia dan dilanjutkan dengan diskusi adalah: *Strategic Overview: An Overview of Global and Regional Security Issues and Assessment of Australia – Indonesia Relations, Current Operation Brief, Counter Terrorism Brief, Maritime Security Cooperation*. Sementara Australia menyampaikan presentasi mengenai *Strategic Overview, Defence Relation Overview, Current Operation Brief, Counter Terrorism, Maritime Security Cooperation, Future Defence Cooperation, Strategic Dialogue*.²⁰⁰

Kedua negara membahas isu keamanan regional dan global khususnya peran masing-masing negara dalam penciptaan perdamaian global dan kawasan. Yang menjadi ancaman utama adalah ancaman non-tradisional seperti penyelundupan senjata, masalah kerjasama pengamanan Selat Malaka, perompakan di laut, konflik antar etnis dan terorisme. Indonesia juga menyampaikan perlunya reformasi dalam anggota Dewan Keamanan (*Security Council*) PBB dan menghargai dukungan Australia kepada Indonesia untuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Mengenai masalah Irak, Indonesia

¹⁹⁸ Ibid

¹⁹⁹ Lihat Laporan lengkapnya dalam hasil Dialog Strategis Pertahanan Australia dan Indonesia, www.defence.gov.au/indonesia Diakses 20 Februari 2009 pukul 16.00 WIB

²⁰⁰ Ibid., hlm 2

mendukung penarikan pasukan asing dari Irak dan digantikan oleh pasukan multinasional dibawah bendera PBB. Bagi Indonesia yang mayoritas muslim, masalah Palestina merupakan masalah yang sensitif karena adanya hubungan keagamaan. Dalam rangka penyelesaian isu senjata pemusnah massal di Semenanjung Korea, Indonesia mendukung langkah-langkah dialog yang dilakukan oleh negara-negara besar serta negara-negara Asia lainnya. Menurut pandangan Indonesia, cara penyelesaian konflik/problem dengan menggunakan pasukan multinasional dibawah bendera PBB adalah cara terbaik, seperti halnya pengiriman pasukan perdamaian ke Solomon Islands yang dipimpin oleh Australia. Ini merupakan contoh/model yang bagus.²⁰¹

Selanjutnya, pihak Indonesia menjelaskan perkembangan peran ASEAN dengan negara mitra dalam rangka membahas isu-isu dikawasan seperti dialog ASEAN+3 (Korsel, Cina, Jepang), ASEAN dengan negara Asia Selatan serta yang terakhir ASEAN+Australia. Indonesia juga tetap melakukan kerjasama dan dialog dengan negara-negara lain seperti negara-negara Asia Pasifik dan Afrika, dalam membahas isu-isu global maupun regional. Mengenai masalah isu terorisme, pihak Indonesia mendukung tercapainya kesepakatan Bali Concordé II tahun 2003 serta MoU Indonesia – Australia 2002 dalam memerangi terorisme. Indonesia menjelaskan jaringan terorisme global dan regional serta khususnya jaringan Al-Qaeda dan Jemaah Islamiyah (JI) yang ada di Indonesia. Disampaikan bahwa dalam pembentukan kadernya, umumnya JI merekrut kadernya dari lapisan masyarakat miskin dan pengangguran. Hal ini dapat menumbuhkan fanatisme sempit dan ini sangat berbahaya dalam jangka panjang. Indonesia menyampaikan bahwa tingkat hubungan kerjasama pertahanan Indonesia dan Australia cenderung dipengaruhi oleh isu-isu politik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan hubungan kedua negara, diperlukan tidak hanya CBMs (*Confidence Building Measures*) tetapi lebih pada TBMs (*Trust Building Measures*).

Sedangkan Australia menyetujui adanya reformasi dalam organisasi Dewan Keamanan (*Security Council*) PBB dan diperlukannya peningkatan peran PBB dalam perdamaian dunia serta pemerintah Australia mendukung Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Selain itu, Australia mempunyai komitmen yang kuat untuk bekerjasama dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara lain dalam rangka penciptaan keamanan global dan regional.

²⁰¹ ibid

Dalam hal terorisme, Australia menekankan bahwa Australia mempunyai kebijakan untuk memerangi terorisme, bukan untuk memerangi suatu negara. Dibidang pendidikan, Australia ingin melakukan kerjasama dan memberikan bantuan kepada lembaga pendidikan yang ada di Indonesia termasuk Pesantren (*Islamic Boarding School*).²⁰²

Dalam hubungan pertahanan dengan Indonesia, Australia menguraikan perkembangan kerjasama pertahanan saat ini, antara lain : pendidikan, kunjungan pejabat Dephan, TNI/Angkatan, kerjasama antara Angkatan (*Army to Army Talks, Navy to Navy Talks, Airman to Airman Talks*) serta seminar-seminar di Australia. Secara khusus Australia menegaskan bahwa tidak ada peraturan dari Australia yang melarang anggota Kopassus TNI AD ikut serta dalam pendidikan maupun seminar di Australia. Kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama pertahanan dimasa mendatang seperti kerjasama penyiapan *Peace Keeping Center*, pengiriman siswa ke Australia, namun untuk program-program yang belum terlaksana seperti rencana kunjungan Panglima CDF ke Indonesia menunggu terbentuknya kabinet baru.²⁰³

Indonesia menjelaskan tentang pengerahan pasukan TNI ke beberapa wilayah Indonesia seperti NAD, Papua, Maluku, Poso dan NTT, perkembangan pelibatan personil TNI dalam misi PKO PBB (Batallyon Kesehatan dan Milops). Disampaikan juga tentang program latihan TNI yang mencakup *Readiness Exercise* dan *Combine Exercise* serta bentuk-bentuk kerjasama latihan/operasi terakhir (darat, laut, udara) dengan negara-negara ASEAN, Korsel, India dan AS. Khusus kegiatan latihan bersama dengan Australia telah berlangsung antar ketiga Angkatan, namun kegiatan tersebut terhenti pada tahun 1999.

Sedangkan Australia menjelaskan macam-macam pelibatan pasukan ADF dibelahan dunia seperti di : Iraq, Sinai, Ethiopia, Timor Leste, Laut Cina Selatan, Lautan India dan Kepulauan Salomon. Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama antar Angkatan yang telah ada (*Service to Service Talks*).²⁰⁴

Dalam bidang *Counter Terrorism*, Australia memaparkan tentang kebijakan Australia dalam memerangi terorisme. Dalam hal ini Australia menerbitkan Buku Putih tentang Terorisme Internasional. Australia juga menjelaskan kerjasama pelibatan instansi terkait (gabungan) dalam menghadapi

²⁰² ibid

²⁰³ Ibid., hlm 3

²⁰⁴ ibid

terorisme seperti Polisi, Militer, Bea & Cukai, Imigrasi. Dalam penanganan terorisme, Australia menempatkan Polisi sebagai satuan terdepan untuk menanggulangi dengan supervisi dari pihak militer (militer menempatkan anggotanya di satuan anti Teror Polisi sebagai Liaison Officer). Tahapan pelibatan instansi terkait (gabungan) tersebut harus melalui keputusan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Australia telah mengadakan kerjasama dalam memerangi terorisme seperti dengan Thailand dalam bentuk pelatihan serta pertukaran informasi. Pihak Australia mengundang TNI untuk melakukan latihan bersama dengan SAS Australia di Canberra, Australia.

Sementara Indonesia menjelaskan pelibatan instansi di TNI dalam pencegahan dan melawan terorisme. Selanjutnya dipaparkan tugas pokok Bais TNI, pasukan khusus TNI Ad (Den 81), TNI AL (Den Jaka) dan TNI AU (Den Bravo). Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama yang telah ada dalam memerangi terorisme seperti pertukaran informasi, pelatihan, dan kunjungan pejabat instansi terkait. Dalam soal latihan bersama, pihak Indonesia masih menunggu adanya kesepakatan/komitmen antara pimpinan kedua belah pihak, yang merupakan landasan/payung kerjasama antara kedua negara seperti AMS.

Mengenai *Maritime Security Cooperation*, Indonesia memaparkan tentang kerjasama TNI AL dan RAN (*Royal Australian Navy*) selama ini serta isu-isu keamanan maritim yang terakhir. Dalam kerjasama maritim, telah dilaksanakan berbagai kegiatan seperti kunjungan kapal perang kedua negara ke masing-masing pangkalan, seminar/konferensi, pelatihan, pertukaran kunjungan dan kegiatan *Navy to Navy Talks* pada bulan Maret 2004 di Jakarta. Dalam kegiatan *Navy to Navy Talks* tersebut tersebut, dibahas tentang : keamanan regional, kerjasama hidrografi, operasi Surya Baskara Jaya, latihan bersama dan pertukaran personil. Kemudian dijelaskan tentang kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Singapura pada bulan Juli 2004 untuk menjaga keamanan di Selat Malaka.

Sedangkan Australia, menjelaskan tentang kebijakan Australia dalam kerjasama keamanan maritim dengan negara-negara lain dan mendukung stabilitas keamanan regional. Mengacu insiden KM. Bintang Samodra, pihak Australia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nelayan tradisional salah satunya adalah kapal yang dipakai tidak menggunakan mesin.

Namun dari pihak Indonesia menyampaikan bahwa yang dimaksud nelayan tradisional adalah jalur laut yang telah dilalui/digunakan sejak dahulu kala. Perbedaan pengertian ini akan ditindak lanjuti dengan meneruskan kepada instansi kelautan masing-masing negara untuk mendapatkan pemahaman bersama agar tidak terjadi lagi insiden serupa dimasa datang, karena sesuai dengan MoU Indonesia – Australia tentang penangkapan ikan oleh nelayan tradisional Indonesia diperairan Australia tahun 1974 tidak dijelaskan persyaratan khusus untuk pengertian nelayan tradisional. Selain itu, dibahas kemungkinan penempatan Perwira TNI AL di kapal RAN dalam pelaksanaan patroli perbatasan perairan Indonesia – Australia, dengan maksud untuk menjembatani komunikasi antara nelayan Indonesia dengan petugas patroli maritim Australia. Untuk rencana ini, Australia akan membicarakannya dengan instansi terkait di Australia. Dalam pembicaraan selanjutnya delegasi Australia akan menyampaikan kepada pemerintahnya tentang kemungkinan memberikan bantuan sebuah kapal patroli kepada TNI AL.

Australia memaparkan program kerjasama pertahanan Indonesia – Australia tahun 2005 seperti: kelanjutan *Service to Service Talks* yang membahas latihan bersama dan pelatihan, pendidikan dan seminar-seminar. Pada kesempatan itu, Australia menyampaikan keinginannya untuk mengundang Kepala Staf maupun pejabat dibawahnya untuk berkunjung ke Australia. Dalam bidang *Counter Terrorism* dan *Peace Keeping Operation*, Australia membuka peluang untuk latihan bersama dengan Indonesia. Australia masih menawarkan kepada Indonesia untuk mengirimkan 7 (tujuh) taruna dalam mengikuti pendidikan di Akademi Militer Australia/ADFA (*Australian Defence Force Academy*).²⁰⁵

Indonesia sendiri menyambut baik tawaran tersebut, namun Indonesia menyampaikan bahwa sesuai doktrin yang dianut Indonesia, maka untuk pendidikan pertama militer harus dilaksanakan di Indonesia. Disisi lain, Indonesia menanyakan kemungkinan pengiriman calon siswa yang baru lulus dari SMA (bukan dari Taruna) untuk mengikuti pendidikan AFDA selama 3 tahun, dimana siswa lulusan ADFA itu akan direkrut menjadi anggota TNI setelah mereka lulus dari ADFA. Pihak Australia akan menanyakan dan mengkoordinasikan hal itu kepada instansi terkait di Australia.²⁰⁶

²⁰⁵ Hasil Dialog Strategis Pertahanan, *op. cit.*, hlm.4

²⁰⁶ *ibid*

Australia menyampaikan perlunya peningkatan kerjasama pertahanan antara negara-negara dikawasan dalam *Strategic dialogue*. Khusus kerjasama pertahanan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan agar tercapai saling pengertian diantara dua pihak dalam kerangka CBMs maupun TBMs. Australia mengharapkan forum dialog dengan Indonesia dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, Indonesia menyampaikan bahwa untuk forum dialog yang lebih tinggi memerlukan suatu keputusan politik antara pemimpin kedua negara. Keputusan politik ini dapat dilakukan setelah terpilihnya Presiden RI dan terbentuknya kabinet baru.

Pertemuan IADSD yang ke III sampai ke VI terus rutin dilakukan setiap tahun. Materi yang dipresentasikan masih sama yaitu Indonesia membahas *Strategic Overview: An Overview of Global and Regional Security Issues and Assessment of Australia – Indonesia Relations, Current Operation Brief, Counter Terrorism Brief, Maritime Security Cooperation*. Sementara Australia menyampaikan presentasi mengenai *Strategic Overview, Defence Relation Overview, Current Operation Brief, Counter Terrorism, Maritime Security Cooperation, Future Defence Cooperation, Strategic Dialogue*.

Sebagai produk dari IADSD V di Canberra tahun 2007, Australia-Indonesia menyepakati kerjasama pertahanan yang akan ditindak lanjuti hingga akhir tahun 2008 sejumlah 41 program. Ke-41 program tersebut terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan secara bersama oleh kedua Departemen Pertahanan, antara ADF dengan TNI, dan antar Angkatan kedua negara, selanjutnya akan dibahas secara teknis ditingkat Departemen Pertahanan, ADF dan TNI serta *Service-to-Service Talk*. Kedua delegasi juga akan membangun komunikasi dalam menindaklanjuti *Lombok Treaty* yang ditandatangani pada bulan November 2006 (Parlemen Australia telah meratifikasi Lombok Treaty, dan diharapkan DPR RI akan dapat melakukan hal yang sama, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah implementasi).²⁰⁷

IADSD ke VI di Canberra diselenggarakan dalam mekanisme pembentukan 5 (lima) *Working Group (WG)* untuk memudahkan pembahasan yaitu: WG-1: membahas *Future Defence Cooperation* dibidang *Counter Terrorism/Intelligence Cooperation*; WG-2: membahas *Future Defence Cooperation* bidang *Maritime Security*; WG-3: membahas *Future Defence Cooperation* dibidang *Humanitarian Assistance/Disaster Relief*; WG-4:

²⁰⁷ Hasil Dialog Strategis Pertahanan, *op. cit.*, hlm.9

membahas *Future Defence Cooperation* dibidang *Peace Keeping Operation*; dan WG-5: membahas *Future Defence Cooperation* tentang *Defence Management* yang mencakup *Governance, Education and Training*.²⁰⁸

Sedangkan pada Pada IADSD VI tahun 2008 dibentuk 4 (empat) *Working Group* (WG) untuk membahas materi-materi kerjasama sebagai tindak-lanjut dari paparan masing-masing delegasi pada hari pertama. Ke-empat WG tersebut adalah WG-1: membahas *Future Defence Cooperation* dibidang *Counter Terrorism/Intelligence Cooperation*; WG-2: membahas *Maritime Security*; WG-3: membahas *Humanitarian Assistance/Disaster Relief* dan *Peace Keeping Operation*; dan WG-4: membahas *Defence Management*.²⁰⁹

Lombok Treaty 2006

Perjanjian Lombok adalah perjanjian keamanan antara Australia-Indonesia yang mencakup beberapa bidang seperti kerjasama pertahanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, kerjasama intelijen, keamanan maritime, kerjasama keselamatan dan keamanan penerbangan, proliferasi senjata pemusnah masal, kerjasama tanggap darurat, kerjasama di organisasi internasional yang terkait dengan masalah-masalah keamanan serta kerjasama pengertian antara masyarakat dan antar orang. Perjanjian tersebut ditandatangani di Lombok pada tanggal 13 November 2006 oleh Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer dan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda.

Seperti yang tercantum dalam pasal 1 perjanjian tersebut dinyatakan bahwa tujuan utama dari perjanjian ini adalah pertama, untuk menciptakan suatu kerangka guna memperdalam dan memperluas kerjasama dan pertukaran bilateral serta meningkatkan kerjasama dan konsultasi antara para pihak dalam bidang yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama mengenai permasalahan yang mempengaruhi keamanan bersama serta keamanan nasional masing-masing. Kedua, untuk membentuk suatu mekanisme konsultasi bilateral dengan tujuan untuk memajukan dialog dan pertukaran intensif serta penerapan kegiatan kerjasama dan sekaligus juga memperkuat hubungan antar lembaga sesuai dengan perjanjian ini.

²⁰⁸ Ibid., hlm.12

²⁰⁹ ibid

Dalam pasal tersebut jelas dinyatakan bahwa kerjasama yang dijalin adalah seperti yang tercantum dalam perjanjian dan menegaskan bentuk perjanjian keamanan yang lebih luas ruang lingkupnya dibandingkan dengan kerjasama pertahanan. Bisa dikatakan kerjasama pertahanan antara Australia dan Indonesia yang sudah berlangsung lama juga merupakan bagian dari kerjasama keamanan. Perjanjian Lombok inilah yang akhirnya menjadi payung hukum dalam berbagai bentuk kerjasama antar lembaga serta memperkuat hubungan antar lembaga tersebut.

Sementara itu Menteri Pertahanan Joel Fitzgibbon menyatakan Australia dan Indonesia memiliki hubungan pertahanan yang meyakinkan dan matang berdasarkan pada rasa saling menghargai dan saling percaya dimana selanjutnya kerjasama tersebut akan diperdalam dalam masalah-masalah keamanan bersama seperti terorisme, keamanan regional dan pembajakan. Australia dan Indonesia berkesempatan membahas lebih jauh kemajuan keterlibatan pertahanan dan kerjasama yang didasarkan pada kerjasama keamanan Australia-Indonesia di Lombok tahun 2006 lalu. *Lombok Treaty* tersebut mendasari pemahaman bersama antara Australia-Indonesia tentang hubungan pertahanan dan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Pemahaman bersama mencakup kerangka prioritas untuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang pertahanan termasuk latihan militer, kunjungan belajar, pertukaran pelajar, latihan bersama, pengawasan maritime dan patroli. Jadi Lombok Treaty menjadi panduan dan merefleksikan penguatan dari hubungan Australia dan Indonesia. Hubungan pertahanan yang meyakinkan dan matang berdasarkan pada rasa saling menghargai dan saling percaya dimana selanjutnya kerjasama tersebut akan diperdalam dalam masalah-masalah keamanan bersama seperti terorisme, keamanan regional dan pembajakan.²¹⁰

Menteri Pertahanan Joel Fitzgibbon juga menegaskan bahwa hubungan pertahanan Australia dan Indonesia seperti hubungan bilateral yang lain merefleksikan kepentingan bersama dalam keamanan regional dan juga kedua negara ingin memperkuatnya. Australia akan membahas perkembangan inisiatif yang telah dikembangkan sejak pertemuan terakhir dengan Indonesia dimana termasuk didalamnya adalah kerjasama pelatihan dan pendidikan, bantuan

²¹⁰ Joel Fitzgibbon MP, Media Release, "Minister for Defence Meets with Indonesian Counterpart for the First time", 27 Maret 2008, <http://www.defence.gov.au/minister/fitzgibbon/index.htm> diakses 20 Maret 2009 pkl.23.00 WIB

strategis yang terjalin dengan Departemen Pertahanan Indonesia serta industri pertahanannya. Kerjasama pertahanan antara Australia dan Indonesia telah menyumbang secara langsung terhadap keamanan dan stabilitas regional. Kedua negara akan memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang bisa dibagi mengenai prioritas-prioritas keamanan sehingga akan memungkinkan mereka memiliki sumber-sumber pertahanan terbaik yang paling efisien dan paling efektif dalam mencapai tujuan bersama.²¹¹

Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen mengatakan bahwa penjabaran dari Perjanjian Lombok itu dapat dilakukan melalui pertukaran perwira, saling kunjung pejabat angkatan bersenjata kedua negara untuk saling bertukar pengalaman dan informasi, termasuk pula latihan bersama. Dengan rumusan pelaksanaan Perjanjian Lombok itu, maka hubungan angkatan bersenjata kedua negara dapat terus dipelihara dan ditingkatkan secara lebih luas dan lebih baik. Perjanjian Lombok yang mulai berlaku pada 7 Februari 2008 merupakan landasan yang kuat untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam suatu tantangan dan peluang yang baru. Perjanjian Lombok meliputi kerjasama bidang pertahanan, penegakan hukum, kontra terorisme, intelijen, keamanan maritim, keselamatan pembangunan dan keamanan pencegahan senjata pemusnah massal. Perjanjian ini juga mencakup kerjasama darurat, kerjasama dalam organisasi dunia tentang isu-isu keamanan dan kerjasama antar masyarakat.²¹²

Dalam perjanjian Lombok tersebut dijelaskan 6 prinsip dasar yang sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa antara lain: kesetaraan, saling menguntungkan dan pengakuan terhadap kepentingan masing-masing pihak dalam stabilitas, keamanan dan kemakmuran pihak lainnya. Saling menghormati dan mendukung kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan bangsa dan kemerdekaan politik setiap pihak serta tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing. Para pihak sejalan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional mereka, tidak akan dalam bentuk apapun, mendukung atau turut serta dalam kegiatan-kegiatan oleh setiap orang atau lembaga yang merupakan ancaman terhadap stabilitas, kedaulatan atau integritas teritorial pihak lain,

²¹¹ Joel Fitzgibbon MP, Media Release, "Minister for Defence Visits Indonesia and East Timor", 17 September 2008, <http://www.defence.gov.au/omist/.../Fitzgibbon%20Media%20Release%20-%20diakses%2020%20maret%202009%20pkl.23.00%20WIB>

²¹² TNI dan AB Australia Sepakati Pelaksanaan Perjanjian Lombok, <http://kabar.com/indonesia/news/berita-media-lombok-2009/> diakses 31 Maret 2009 pkl.16.00 WIB

termasuk oleh mereka yang berupaya menggunakan wilayahnya untuk mendorong atau melakukan kegiatan-kegiatan tersebut termasuk separatisme di wilayah lainnya. Prinsip yang keempat adalah para pihak sejalan dengan Piagam PBB untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin timbul diantara mereka dengan cara-cara damai dengan sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan perdamaian, keamanan dan keadilan dunia. Para pihak juga wajib menahan diri untuk melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan yang menentang integritas teritorial atau kemerdekaan politik pihak lainnya sesuai dengan Piagam PBB dan yang terakhir adalah tidak ada dari perjanjian ini yang mempengaruhi dalam bentuk apapun, hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap pihak berdasarkan hukum internasional.

Dari prinsip-prinsip diatas sangat jelas bahwa Indonesia sangat menginginkan pengakuan Australia atas kedaulatan Republik Indonesia serta Indonesia tidak menginginkan Australia memberikan dukungan terhadap gerakan separatis yang sering terjadi di Indonesia. Bisa dikatakan perjanjian Lombok ini sangat penting dan menguntungkan pihak Indonesia karena mencakup berbagai bidang yang penting bagi kedua negara. Perjanjian keamanan ini lebih luas daripada AMS 1995. Traktat Lombok merupakan perjanjian keamanan yang dilatarbelakangi isu-isu nontradisional tidak seperti AMS 1995 yang lebih fokus pada ancaman tradisional atau militer. Bentuk *Lombok Treaty* merupakan perjanjian keamanan yang meliputi pertahanan didalamnya dan bidang-bidang lain yang penting seperti maritim, penegakan hukum, sedangkan AMS bisa dikatakan sebagai pakta semi pertahanan.

Dalam perjanjian Lombok disebutkan ruang lingkup kerjasama pertahanan yang meliputi kerjasama pertahanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, kerjasama intelijen, keamanan maritim, kerjasama keselamatan dan keamanan penerbangan, proliferasi senjata pemusnah masal, kerjasama tanggap darurat. Kerjasama di organisasi internasional yang terkait dengan masalah-masalah keamanan serta kerjasama pengertian antara masyarakat dan antar orang.

Dalam kerjasama pertahanan, kedua negara melanjutkan dalam *joint statement* antara panglima angkatan bersenjata kedua negara yang bertujuan untuk lebih memperkuat hubungan pertahanan antara kedua negara. *Joint statement* ditandatangani oleh Panglima Angkatan Bersenjata RI Jenderal Djoko Santoso dan Panglima Angkatan Udara ADF A.G. Houstom Ac AFC pada tanggal

12 Januari 2009. Dimana kerjasama meliputi bidang penanggulangan terorisme, keamanan maritim, kerjasama intelijen, bantuan kemanusiaan serta operasi perdamaian.

Bidang keselamatan dan keamanan penerbangan, kedua negara menandatangani perjanjian kerjasama di bidang keselamatan transportasi 31 Januari 2008 dimana dalam kerjasama ini Pemerintah Australia memberikan paket bantuan senilai 24 juta dollar atau senilai 200 milyar kepada Indonesia, untuk upaya-upaya peningkatan keselamatan transportasi di Indonesia (*Indonesia Transport Safety Assistance Package*).

Langkah kongkritnya adalah pelatihan empat puluh anggota penyelidik kecelakaan kereta api Indonesia pada Oktober 2008 sebagai bagian dari kerja sama yang tengah berlangsung antara Australia dan lembaga-lembaga Pemerintah Indonesia guna meningkatkan keselamatan transportasi di Indonesia. Proyek ini menyediakan kursus pelatihan selama 5 hari bagi anggota KNKT dan sejumlah petugas profesional keselamatan industri perkeretaapian guna meningkatkan pengetahuan tentang proses investigasi di kalangan para penyelidik dan pihak terkait pada sektor transportasi kereta api. Kursus ini juga akan memberi bekal kepada para petugas profesional keselamatan industri perkeretaapian agar mampu berinteraksi secara efektif dengan para penyelidik dari KNKT guna memastikan adanya tindakan penyelamatan sebelum proses investigasi. Proyek ini adalah salah satu dari beberapa kegiatan yang tengah dikembangkan di bawah Paket Bantuan Keselamatan Transportasi Indonesia.²¹³

Australia dan Indonesia juga menyelenggarakan latihan SAR bersama di Merauke, Papua, yang melibatkan personil Badan SAR Nasional (BASARNAS) dan Otoritas Keselamatan Maritim Australia, pesawat SAR serta dukungan logistik bagi aset dan personil yang diterjunkan. Latihan ini berlangsung dari 17 hingga 20 November 2008 dan merupakan bagian dari kerja sama Australia yang sedang berlangsung dengan lembaga-lembaga Pemerintah Indonesia guna meningkatkan keselamatan transportasi secara keseluruhan di Indonesia. Proyek ini merupakan salah satu dari beberapa kegiatan yang sedang dilaksanakan di bawah Paket Bantuan Keselamatan Transportasi Indonesia termasuk pendampingan inspektor keselamatan pesawat udara dan bandar udara; peningkatan jasa manajemen lalu lintas udara di Indonesia; pengadaan ahli dan

²¹³ "Keselamatan Transportasi menjadi Titik Berat Kerjasama Australia dan Indonesia," siaran media 28 Oktober 2008, http://www.indonesiainfoembassy.com/08/indonesian/SMP08_095.html diakses 10 Februari 2009 pkl.10.00 WIB

panduan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia untuk melakukan penyelidikan kecelakaan transportasi; serta pelatihan keselamatan maritim dan keselamatan feri.²¹⁴

Bidang kerjasama tanggap darurat, Indonesia dan Australia dipercaya memimpin Satuan Tugas Forum Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) untuk Kesiapan Tanggap Darurat hingga Maret 2008, sebagai bagian dari upaya penanggulangan terhadap dampak bencana alam dan tanggap darurat di kawasan APEC. Menurut Juru Bicara KBRI Canberra, Dino Kusnadi Dua dari manfaat yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia itu adalah bantuan peningkatan kapasitas serta transfer pengetahuan/informasi.²¹⁵

Indonesia dan Australia sepakat untuk menggalang kerja sama intelijen dengan tujuannya untuk menghadapi ancaman teroris. Hal itu sejalan dengan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Menteri Pertahanan Australia, Robert Murray Hill mengatakan bahwa kelanjutan kerjasama pertahanan antara RI-Australia akan yang saling menguntungkan untuk kedua negara. Kedua negara telah menentukan kerjasama untuk menghadapi ancaman teroris yaitu melalui kerjasama intelijen. Ia menambahkan, dalam situasi tertentu tidak tertutup kemungkinan bagi kedua negara melakukan operasi gabungan jika operasi itu memang dirasa perlu.²¹⁶

Dalam pertemuan antara Panglima TNI dan Menhan, juga dibicarakan kerangka (*framework*) yang memungkinkan kesepakatan kerjasama itu bisa direalisasikan. Menurut Hill, Australia sangat khawatir mengenai potensi ancaman teroris di kawasan Asia seperti di Malaysia, Singapura dan Filipina. Untuk menghadapi ancaman itu Australia akan bekerjasama dengan negara-negara lain di kawasan Asia, yang memang memiliki kepentingan yang sama untuk memerangi teroris.

Hill mengatakan bahwa Indonesia dan Australia memiliki perbedaan budaya dan nilai-nilai namun mengenai teroris, kedua negara memiliki persepsi yang sama. Kedua negara menekankan pentingnya kesamaan persepsi dalam

²¹⁴ Australia dan Indonesia menyelenggarakan Latihan SAR, "siaran media 17 November 2008, <http://www.indonesia.embassy.gov.au> diakses 10 februari 2009 pkl.11.00 WIB

²¹⁵ RI dan Australia Pimpin Satgas APEC, <http://www.indonesia.embassy.gov.au> <http://www.alopda.gov.au> <http://www.pikiran-rakyat.com> Berita Nasional & op. cit. 10 Februari 2009, diakses 7 Mei 2009 pkl. 3.55 WIB

²¹⁶ RI-Australia Galang kerjasama Intelijen, <http://www.sivip.com.id/berita/200807nas03.html> diakses 15 Mei 2009 Pkl.15.00 Wib

menghadapi teroris yang akan mempererat hubungan militer untuk mengatasi persoalan yang ada.²¹⁷

Kegiatan *Defence Intelligence Research and Analysis Course* (DIRAC) merupakan Kerjasama pelatihan bersama penganalisaan dan riset terhadap data-data dan fakta-fakta serta informasi yang akurat dan benar. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama antara TNI AD dengan *Defence Intelligence Training Center Australia* dibawah pengawasan Staf Intelijen Mabes TNI. Program ini merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan di TNI AD dengan jumlah peserta sebanyak 40 perwira intelijen dari satuan Intelijen jajaran TNI AD sama seperti pelaksanaan pada tahun sebelumnya. Diharapkan para peserta dapat menjadi Perwira Analisis yang profesional sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kursus ini, sehingga nantinya dapat meningkatkan kemampuan satuan Intelijan jajaran TNI AD, khususnya di bidang riset dan penganalisaan. Diharapkan para peserta dapat mengimplementasikan di lapangan dalam bentuk analisa yang tajam dan akurat dalam mengolah data yang ada, sehingga pimpinan dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam membuat suatu keputusan.²¹⁸

Traktat Lombok merupakan perkembangan penting dalam kerja sama pertahanan bilateral antara Australia dan Indonesia. Traktat tersebut imbang, berpandangan jauh ke depan dan terfokus secara praktis dan akan membantu memperluas kerja sama bilateral dan pertukaran dalam hal-hal yang mempengaruhi keamanan kita bersama. Secara khusus, Traktat tersebut memberi kerangka yang bernilai untuk pengembangan hubungan pertahanan bilateral di masa depan. Menteri Pertahanan Joe Fitzgobbon menyatakan bahwa Australia menantikan dengan gembira kemajuan dalam bidang-bidang penting kerja sama antara Australia dan Indonesia, termasuk keamanan maritim, penjagaan perdamaian, bantuan bencana dan reformasi serta tata kelola pemerintahan.²¹⁹

²¹⁷ ibid

²¹⁸ TNI AD-Australia lakukan Kerjasama Intelijen.

http://www.dinkindonesia.gov.id/portal/modules.php?name=News&file=artikel&sid_52 diakses 18 Mei 2009 pkl.16.00 WIB

²¹⁹ Joel Fitzgobbon, PM Menteri Pertahanan Australia, Pidato di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, 18 September 2008, [http://www.defence.gov.au/minis\[profile\]_johon_index.htm](http://www.defence.gov.au/minis[profile]_johon_index.htm) diakses 26 April 2009 pkl.21.00 WIB

Keamanan maritim merupakan bagian penting program Australia dan Indonesia, khususnya mempertimbangkan bahwa lebih dari 50% perdagangan kami melakukan transit melalui perairan Indonesia sehingga Australia mengadakan kerja sama keamanan maritim mencakup latihan kapal patroli bilateral, dan latihan pengawasan maritim yang melibatkan pesawat patroli. Australia-Indonesia juga mengembangkan prosedur untuk melakukan patroli terkoordinasi dengan Angkatan Laut Indonesia. Melalui penjadwalan patroli yang efektif dan pertukaran informasi tentang pengawasan akan saling membantu dalam memerangi ancaman keamanan maritim. Melalui Komando Penjaga Perbatasan Australia, negara kita bekerja sama untuk mencegah penangkapan ikan secara gelap yang merusak stok ikan. Kerja sama ini tercapai secara nyata dan praktis, termasuk melalui patroli perikanan bersama. Australia dan Indonesia juga tukar-menukar informasi tentang gerakan kapal laut di perbatasan dengan komunikasi antara Komando Utara Australia dan komando-komando daerah Indonesia.

Seperti Australia, Indonesia juga memiliki sejarah panjang yang membanggakan dalam memberikan sumbangsih pada keamanan global melalui partisipasi dalam operasi perdamaian - dari penempatan Garuda yang pertama di Sinai pada 1957 hingga penempatan tentara Indonesia di Libanon kini. Australia gembira mendukung Pusat Penjagaan Perdamaian TNI dengan kegiatan seminar dan pelatihan. Akhir tahun ini, kedua negara akan bekerja sama untuk menentukan bidang-bidang kunci kerja sama melalui analisa kebutuhan. Kerja sama antara Australia dan Indonesia di bidang ini memungkinkan kita untuk berbagi pelajaran yang telah diperoleh dari pengalaman luas kita dalam operasi penjagaan perdamaian. Kerja sama pemberian bantuan bencana alam antara Australia dan Indonesia tidak memerlukan penjelasan. Operasi kemanusiaan terbesar Angkatan Pertahanan Australia (ADF) dalam sejarahnya adalah dalam mendukung operasi pemberian bantuan bencana TNI, setelah bencana tsunami Samudera Hindia 2004. Tragedi tersebut menyatukan angkatan bersenjata Australia-Indonesia dalam suatu contoh kerja sama yang luar biasa, yang juga secara jelas memperlihatkan nilai investasi jangka panjang dalam hubungan pertahanan.²²⁰

ADF juga memberikan bantuan kepada penduduk Kepulauan Nias setelah gempa bumi hebat pada Maret 2005. Pada operasi bantuan inilah sembilan

²²⁰ ibid

anggota ADF gugur dalam kecelakaan helikopter di Nias. ADF tidak akan pernah melupakan penghormatan yang diperlihatkan oleh Pemerintah Indonesia dan penduduk Nias kepada mereka yang gugur. Upaya pemberian bantuan ini telah memperdalam kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam aspek militer manajemen bencana. Pada Mei 2008, kita bersama-sama menyelenggarakan latihan simulasi pemberian bantuan Forum Regional ASEAN (FRA) di Jakarta, dengan harapan agar Australia-Indonesia akan lebih siap lagi dalam memberikan tanggapan dan menyelamatkan nyawa ketika tugas memanggil. Prosedur yang dibicarakan pada latihan simulasi tersebut telah berkembang menjadi seperangkat pedoman strategis yang bertujuan membantu mengkoordinasikan upaya pemberian bantuan regional di antara anggota ARF.

Australia dan Indonesia akan berupaya mengadakan kerja sama lebih lanjut dalam bidang ini melalui pelatihan medis dalam menghadapi situasi bencana, kursus pengelolaan tanggap bencana, peningkatan kerja sama logistik dan perencanaan ke arah pelaksanaan pemberian bantuan bencana bilateral di masa mendatang. Bidang penting kerja sama bilateral yang dapat Australia dan Indonesia pertahankan dan bangun adalah pendidikan dan pelatihan. Menhan Australia menegaskan bahwa ini adalah upaya kooperatif kunci antara kedua negara kita yang akan memperkuat kemampuan kita untuk memahami satu sama lain dan belajar bersama, serta untuk menghadapi tantangan masa depan sebagai mitra. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya menguntungkan mereka yang mengikuti kursus. Pendidikan dan pelatihan tersebut membuka kesempatan kepada personil pertahanan kita untuk menyaksikan sudut pandang yang berbeda mengenai masalah keamanan regional. Ini membangun hubungan personil yang dapat membawa hubungan lebih lanjut di masa depan. Tata kelola pemerintahan adalah wilayah kerja sama yang sangat penting. Australia sendiri sedang mendalami pelajaran tentang tata kelola pemerintahan dan Australia ingin berbagi dengan Indonesia.

Reformasi adalah proses terus menerus, dan sesungguhnya Departemen Pertahanan terus-menerus mencari perbaikan selama lebih 30 tahun terakhir. Angkatan pertahanan yang memiliki fungsi tata kelola pemerintahan yang kuat dan akuntabilitas akan lebih siap untuk menghadapi tantangan keamanan dan mendukung lembaga-lembaga pemerintah sendiri. Angkatan Pertahanan Australia bekerja sama erat dengan Dephan dan TNI dalam berbagai prakarsa tata kelola pemerintahan untuk membantu proses reformasi di Indonesia.

Australia telah menawarkan beasiswa bagi staf TNI dan Dephan untuk belajar di tingkat S-2 di universitas-universitas Australia dalam berbagai bidang pendidikan yang berhubungan dengan pertahanan. Bisa dikatakan, hubungan pertahanan antara Australia dan Indonesia sangat luas. Traktat Lombok menunjukkan tingkat kedewasaan baru hubungan tersebut. Dan Australia dan Indonesia sedang menyelesaikan Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Pertahanan yang akan mengidentifikasi sejumlah prioritas bersama untuk beberapa tahun mendatang.

Hubungan pertahanan Australia-Indonesia terus berkembang dengan cara yang kooperatif dan produktif ini dan Australia sendiri ingin menindaklanjuti kerja sama dengan Indonesia dalam bidang-bidang kunci yang akan meningkatkan kemampuan TNI dan mendukung peran Dephan yang semakin penting dalam bidang pembuatan keputusan seperti kemampuan dan perencanaan pengadaan, pengelolaan keuangan dan pengembangan kebijakan strategis.

Menteri Pertahanan Australia Fitzgibbon menyatakan bahwa keterlibatan pertahanan itu mencakup kegiatan latihan militer dan pendidikan pascasarjana, pertukaran kunjungan dan studi serta pemantauan, latihan dan patroli maritime. Pemahaman-pemahaman bersama itu akan dipandu oleh Perjanjian Lombok (Perjanjian Keamanan Indonesia-Australia) dan merefleksikan hubungan kedua negara yang semakin kuat. Ia menegaskan bahwa Australia dan Indonesia sepakat untuk terus mendukung berbagai inisiatif yang menyangkut masalah pasukan perdamaian melalui pusat-pusat pelatihan pasukan penjaga perdamaian kedua Negara dalam kerja sama penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama yang sudah ada. Pada Mei 2008, akan ada pelatihan bersama kedua negara di bidang ini.²²¹

Australia dan Indonesia sama-sama memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga penting sekali kita memiliki pengertian yang jelas mengenai prioritas Traktat Lombok dan Pernyataan Kesepahaman Bersama mewakili sebuah rencana masa depan yang akan memungkinkan kita untuk menjalankan transformasi dan sasaran hubungan ini bersama-sama guna memaksimalkan investasi Australia dan Indonesia.²²²

²²¹ Indonesia-Australia Jajaki Kerjasama Industri Pertahanan
http://www.diplog.go.id/jndek.php?Itemid_55&id=1704&option=com_content&task=view diakses 14 Mei 2009 pk1.13.00 Wib

²²² Ibid

Terkait dengan masalah kerja sama keamanan maritim, menteri pertahanan Indonesia Juwono Sudarsono mengatakan bahwa Australia dan Indonesia sepakat untuk melakukan patroli perairan bersama antar angkatan laut kedua negara. Bagi Indonesia, kendati sudah berjalan selama delapan tahun, patroli terkoordinasi bersama ini penting untuk menjaga keamanan wilayah tenggara Indonesia. Sedangkan bagi Australia, hal ini penting untuk menjaga wilayah barat lautnya. Peningkatan kemampuan para perwira angkatan laut dari kedua negara menjadi penting untuk mendukung kegiatan-kegiatan patroli terkoordinasi bersama, termasuk pelatihan penentuan perbatasan kedua negara yang sudah disepakati bersama. Sementara itu, Menhan Australia Joel Fitzgibbon mengatakan kedua pihak sepakat mendorong masing-masing panglima angkatan bersenjata terus mengembangkan pemahaman bersama tentang hubungan pertahanan guna lebih memajukan hubungan bilateral yang sudah ada. Pemahaman-pemahaman bersama itu akan dipandu oleh Perjanjian Lombok dan akan merefleksikan hubungan kedua negara yang semakin kuat. Berbagai kerjasama yang sudah ada maupun inisiatif baru akan dilaksanakan dan dikoordinasikan melalui dialog strategis pertahanan Indonesia-Australia.²²³

Panglima Angkatan Pertahanan Australia Marsekal Udara Angus Houston menyatakan bahwa pernyataan Bersama ini memperkuat tekad Australia dan Indonesia untuk bekerja sama dalam masalah keamanan di bawah payung Traktat Lombok. Australia bertekad untuk bekerja sama dengan Indonesia sebagai mitra untuk membangun kawasan yang aman dan damai. Penandatanganan Pernyataan Bersama ini menunjukkan kekuatan hubungan dua negara dan memberikan arah yang jelas pada kerja sama masa depan. Pernyataan Bersama ini menfokuskan pada keterlibatan pertahanan Australia dengan Indonesia di bidang anti-terorisme, keamanan laut, intelijen, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, serta penjagaan perdamaian. Pernyataan tersebut juga berisi garis besar kegiatan-kegiatan keterlibatan pertahanan di masa depan, termasuk pelatihan militer, pendidikan pasca-sarjana, kunjungan dan pertukaran studi, latihan dan patroli laut gabungan.²²⁴

²²³ RI-Australia Kerjasama Bangun Kapal Patroli, http://www.kadongseugon.modul.php?news_publisher&newsviewarticle&cid=37&grid=1187

²²⁴ Panglima Angkatan Pertahanan Australia Tandatangani Pernyataan Bersama tentang Kerja Sama Pertahanan dengan Indonesia, http://www.austlii.au/au/other/dfat/indonesian/SAB09_002.html diakses 27 Maret 2009 pkl.12.00 WIB

Menurut Penasehat Keamanan Kedutaan Australia Paul Iozzi *Lombok Treaty* yang ada sekarang lebih sesuai dan merefleksikan isu-isu keamanan kontemporer berdasarkan prinsip-prinsip saling menghargai antara kedua negara. Jika dibandingkan dengan AMS 1995, sangatlah jauh berbeda karena AMS merupakan dokumen lama yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian keamanan sekarang. Kunci hubungan pertahanan Australia-Indonesia adalah keterlibatan dalam kebutuhan yang sama yaitu bersama-sama memerangi ancaman yang sama didasarkan pada prinsip saling menghargai dan kesetaraan

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menjelaskan, UU atas perjanjian itu sangat penting karena ada berbagai ancaman di sekitar kawasan serta kepentingan nasional khususnya dalam menghadapi separatisme. Meskipun perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua pemimpin negara pada 13 November 2006 itu menggunakan *security*, perjanjian itu bukanlah Pakta Militer. Ada dua pilar utama dalam perjanjian tersebut yakni prinsip-prinsip yang melandasi kerja sama serta ruang lingkup perjanjian.²²⁵

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Luar negeri Indonesia bahwa perjanjian kerja sama keamanan itu bukan suatu pakta pertahanan. Penandatanganan kerja sama keamanan ini sangat bersejarah dan akan bisa menjadi kontribusi penting bagi upaya untuk memajukan hubungan antara Indonesia dan Australia.²²⁶

Perjanjian kerja sama keamanan secara tertulis itu sebenarnya juga adalah upaya memwadahi kerja sama yang telah terjadi selama ini dan berhasil dengan baik. Seperti kerja sama dalam hal menumpas terorisme, migran ilegal, pencegahan penyelundupan, dan lain-lain. Berbagai kerja sama yang telah ada antara Indonesia dan Australia dianggap perlu dimasukkan ke dalam suatu kerangka kesepakatan yang formal agar bisa menjadi prinsip-prinsip yang menguatkan hubungan Indonesia dan Australia.²²⁷

Perbedaan yang sangat penting antara AMS 1995 dan *Lombok Treaty* adalah AMS lebih terfokus pada ancaman militer dan *Lombok Treaty* kepada ancaman nontradisional. Jika AMS, negosiasinya dilakukan secara rahasia sebaliknya *Lombok Treaty* sangat terbuka karena tidak hanya unsur pertahanan

²²⁵ DPR sahkan *Lombok Treaty*, <http://www.sampemerde.sac.go.id/indonesia/01/11/28/pas12.htm>, diakses 13 April 2009 pkl.21.00 WIB

²²⁶ Kerja Sama Keamanan Menolak Separatisme, <http://www2.kompas.com/ver1/Internasional/01/11/01/1855.htm>, diakses 9 April 2009 pkl.13.00 WIB

²²⁷ *ibid*

negara kita belum pernah dibatalkan sama sekali, apalagi sejak krisis politik di Timor Timur pada tahun 1999.²²⁹



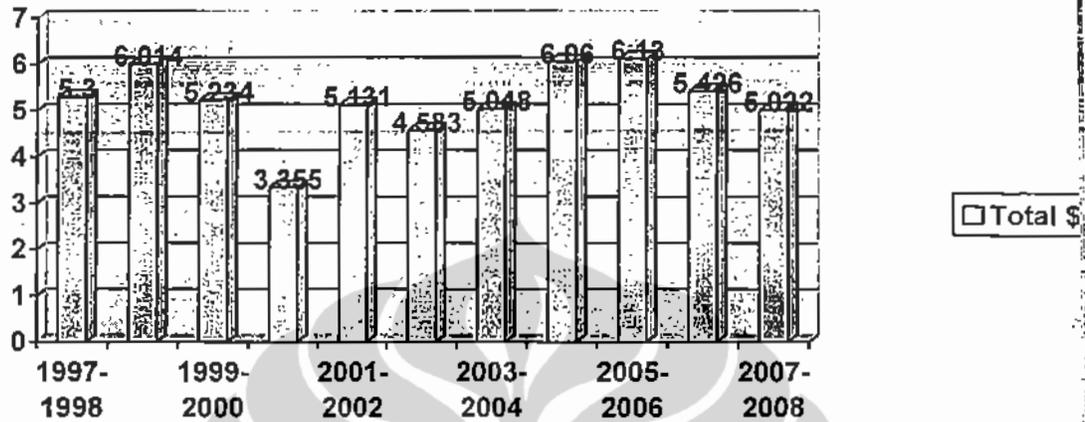
²²⁹ Hubungan Bilateral Australia dan Indonesia di Bidang Maritim dan Pertahanan, <http://indonesianews.php?id=1151199411189> diakses 10 februari 2009 pkl.11.00 WIB

BAB V. KESIMPULAN

Kerjasama Pertahanan Australia-Indonesia telah dimulai sejak 1968 dalam bentuk yang informal yaitu pelatihan personil. Secara resmi, Pemerintah Australia mengumumkan *Defence Cooperation Program/DCP* dengan Indonesia sejak 1972. Tujuan DCP adalah menjaga dan mempertahankan kepentingan pertahanan Australia di kawasan Asia Tenggara. Dimana kawasan Asia Tenggara dan kawasan Pasifik Barat merupakan daerah yang termasuk dalam kawasan strategis Australia. Penting bagi Australia untuk memastikan kedua kawasan tersebut berada dalam kondisi stabil dan mampu menjaga keamanan kawasannya. Dari segi militer, kerjasama pertahanan ini bertujuan untuk memajukan hubungan bilateral khususnya jaring pertahanan, untuk mempromosikan stabilitas politik dan perkembangan ekonomi di kawasan melalui program bantuan serta mengembangkan sikap bersahabat terhadap Australia. Selain itu program kerjasama pertahanan juga bertujuan

Pemerintah Australia membagi DCP tersebut kedalam tiga periode yaitu periode pertama 1972-1975 dengan dana A\$20m. Dalam DCP tersebut Australia menyediakan 16 pesawat Sabre dan mengikutsertakan 1000 personil militer Indonesia dalam pelatihan di William Town Air Base di New South Wales. Proyek lain dalam DCP tersebut adalah pemetaan di Sumatra seluas 26.000 km² yang melibatkan 80 personil militer Australia. DCP periode kedua pada tahun 1975-1978 dengan dana sebesar A\$25 m dan program yang dijalankan adalah melanjutkan yang sudah ada dan juga mengembangkan program-program baru. Program yang termasuk dalam DCP tersebut adalah pendidikan, latihan bersama, pemetaan dan pengadaan pesawat Sabre. Australia juga menyediakan 12 helikopter Army Sioux termasuk pelatihan bagi para pilot helikopter selama 2 tahun. Sedangkan untuk program pemetaan, Irian Jaya dijadikan daerah pemetaan baru dibawah operasi Cendrawasih. DCP periode ketiga pada 1978-1986 sebesar A\$47,5m dimana aktifitas yang dilakukan antara lain pemetaan dan survey di daerah baru yaitu Maluku. Australia juga menyumbang 250 Land Rovers kepada TNI AD dan 2 kapal patroli kepada TNI AL.

Dilihat dari bentuk kerjasama pertahanan, Australia akan terus memberikan dana DCPnya kepada Indonesia dikarenakan alasan-alasan kepentingan Australia diatas. Dibawah ini adalah grafik dana DCP dari periode 1997-1998 sampai 2007-2008:



Dari grafik diatas terlihat jelas besaran dan yang diberikan Australia mengalami peningkatan dari tahun ketahun walaupun ada penurunan pada periode 2000-2001 dikarenakan kasus Timor-Timor tetapi DCP tetap berjalan. Pasca Bom Bali 2002, dana DCP meningkat pada periode 2003-2004 dan 2004-2005 . Pada priode 2006-2007 dana DCP menurun menjadi \$5.426 dan kembali menurun pada 2007-2008 menjadi \$5.022.

Hubungan pertahanan Australia dengan Indonesia tidak lepas dari konsep diplomasi militer Australia yang meliputi: hubungan militer, kerjasama pertahanan, latihan bersama dan keterlibatan dalam perjanjian dan persetujuan. Semua konsep dilomasi militernya masuk kedalam program DCP yang Australia keluarkan bagi Indonesia. Terbukti Australia telah melakukan hubungan pertahanan dengan Indonesia sejak 1968 sampai saat ini dengan adanya hubungan militer yaitu kunjungan pejabat militer antar kedua negara serta keikutsertaan kedua negara dalam seminar, konfrensi dan *working group*. Bentuk kerjasama pertahanan yang tercantum dalam *Australia Defence Annual Report* dalam bentuk DCP merupakan program formal yang dikeluarkan Australia termasuk didalamnya training, pertukaran pelajar di bidang militer dan latihan bersama.

Hubungan pertahanan antara Australia dengan Indonesia juga terlihat dalam kerangka kerjasama AMS 1995 (*Arrangement of Maintaining Security*).

Sebelumnya, hubungan mesra antara PM Keating dan Presiden Suharto juga menjadi suatu landasan hubungan yang baik bagi kedua negara. Hubungan baik tersebut diwujudkan dalam kerangka AMS pada tahun 1995. Selain itu, keterlibatan Australia dalam perjanjian keamanan dengan Indonesia pada tahun 2006 yang lebih dikenal dengan "Lombok Treaty" juga menjadi satu bukti adanya hubungan baik antara PM Howard dengan Presiden Yudhoyono. Bisa dikatakan diplomasi militer Australia terhadap Indonesia berjalan sukses karena hubungan dibidang militer tetap berjalan walaupun terjadi konflik dalam masalah Timor-Timor. Diplomasi militer Australia juga akan terus berjalan terhadap Indonesia karena dalam *Defence White Paper* dan *Strategic Review* Australia, Indonesia tetap menjadi prioritas negara tetangga yang memiliki arti penting bagi Australia selain prioritas aliansi dengan AS sebagai hal utama juga.

Keterikatan Australia dalam perjanjian keamanan merupakan bentuk paling formal dari diplomasi militernya. Kunjungan Menteri Pertahanan Australia Robert Hill ke Indonesia pada 2002 juga menekankan pentingnya hubungan pertahanan dengan Indonesia. Penekanannya pada hubungan pertahanan antara Australia dan Indonesia yang didasari atas saling percaya dan saling menghargai budaya yang berbeda terlihat sebagai usaha Australia dalam kerangka formal yang sangat ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. Hubungan pertahanan diyakini akan menguntungkan kedua negara tidak hanya bagi Australia.

Konsep Kerjasama Pertahanan antara Australia dan Indonesia menurut Molan yaitu tahap *Intermediate Stage* ternyata sesuai dengan kondisi kerjasama pertahanan yang sudah terjalin. Kerjasama pertahanan tetap berjalan walaupun ada beragam masalah atau isu yang muncul di antara kedua Negara dan memang masih ada kekhawatiran akan kelanjutan kerjasama ini kedepannya tetapi kembali ke pernyataan Atase Pertahanan Australia, Ian Errington bahwa apapun masalah yang muncul antara Australia dan Indonesia, hubungan militer tetap berjalan bahkan pada saat krisis Timor-Timor.

Keterhubungan pertahanan antara Australia dan Indonesia sudah terjadi sejak lama sejak 1968 tetapi sesungguhnya keterlibatan Australia dengan Indonesia dimulai sejak era Soekarno pada masa kemerdekaan (1945) dimana Australia sangat mendukung Indonesia dalam memperoleh kemerdekaannya. Keterlibatan pertahanan antara Australia dan Indonesia terjalin antara pihak militernya dengan adanya kunjungan pejabat militer atau pejabat dalam angkatan

bersenjata kedua negara. Kemudian berkembang dalam keterhubungan keamanan dimana tidak hanya aspek militer yang menjadi hal utama tetapi juga politik, perdagangan, budaya dan perdagangan antara kedua negara. Bukti nyata adanya keterhubungan keamanan adalah Australia dan Indonesia saat ini adalah adanya *Lombok Treaty 2006* dan ditandatanganinya *Joint Statement* antara Panglima Angkatan Bersenjata kedua negara. Isi perjanjian tersebut tidak hanya mencakup masalah militer tetapi juga masalah teroris, maritim, transportasi.

Apapun masalah yang muncul dalam hubungan Australia-Indonesia, Australia tetap menganggap Indonesia sebagai elemen penting dalam strategi pertahanannya di buktikan dengan DCP Australia yang tetap memberikan dananya bagi Indonesia. Walaupun sempat ada penurunan dana terhadap Indonesia sehingga menyebabkan tertundanya beberapa aktivitas latihan, tidak meyakinkan Australia untuk tetap menjalin hubungan pertahanan dengan Indonesia. Hubungan Pertahanan Australia-Indonesia bisa dikatakan sangat kuat karena adanya dialog strategis pertahanan antara kedua negara yang dimulai tahun 2001 dan terus berlanjut sampai sekarang.

Penulis yakin bahwa sampai kapanpun Australia akan tetap menganggap Indonesia penting karena faktor geostrategis Indonesia yang tidak dapat dipungkiri. Indonesia adalah salah satu negara tetangga Australia yang mendapat poin khusus dalam buku putih pertahanan Australia bahkan telah disebut dalam *strategic basis* sebelum 1986. Dalam *Strategic Basis 1959, 1968, 1971, 1975 dan 1976* jelas dinyatakan arti penting Indonesia bagi Australia. Sedangkan dalam *Buku Putih Pertahanan Australia 1987*, Australia juga menekankan pengembangan ikatan-ikatan keamanan yang lebih dekat dengan Negara di kawasan meskipun aliansi militer tetap penting bagi Australia. Australia juga menekankan kerjasama pertahanan dengan negara-negara tetangga dan kurang menekankan ikatan pertahanan dengan AS. Hal ini dikarenakan Australia berada di bawah Partai Buruh dimana mereka lebih berpandangan luas terhadap negara-negara tetangga Asia dan pasifik Selatan.

Dalam *Defence White Paper 2000, Defence White Paper 2003: A Defence Update 2003, Defence White Paper 2005: A Defence Update 2005 dan Defence White Paper 2007: A Defence Update 2007* jelas dinyatakan pentingnya Indonesia bagi Australia.

Hubungan pertahanan dan keamanan akan terus berlanjut apalagi setelah diratifikasinya *Lombok Treaty 2006* oleh kedua negara. Bagi Indonesia

sendiri, *Lombok Treaty* sebagai suatu jaminan dari Australia atas pengakuan kedaulatan Indonesia dan adanya komitmen Australia untuk tidak mendukung gerakan separatis di Indonesia.

Penulis yakin kerjasama pertahanan Australia dan Indonesia yang menurut Molan telah sampai pada tahap *Intermediate* akan semakin kuat. Dan bukan tidak mungkin akan semakin berkembang cakupan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Tetapi kemungkinan kerjasama pertahanan akan mengarah ke tahap akhir yaitu *Mature Stage* penulis rasa tidak mungkin karena kembali ke sistem politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Menurut Molan sendiri, tahap akhir merupakan tahap kerjasama pertahanan yang sudah matang. Mengacu pada penjelasan Ikrar Nusa Bakti bahwa Indonesia tidak akan mencapai tahap itu karena Australia dan Indonesia terlibat perjanjian keamanan bukan terikat dalam pakta pertahanan seperti Amerika Serikat dan Australia.

Penulis setuju dengan pendapat Atase Pertahanan Australia Ian Errington yang menyatakan bahwa hubungan Australia dan Indonesia dalam militer tidak akan berubah apapun masalah yang dihadapinya. Pernyataan tersebut seakan menegaskan bahwa pihak militer Australia sangat berkepentingan terhadap Indonesia dan Australia memprioritaskan hubungan militer dibanding yang lain. Bisa dikatakan Australia dari sisi sejarah sudah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat penting bagi kepentingan nasionalnya dan dokumen pemerintah dari *strategic basis*, *defence annual report*, *defence white paper* selalu mengulas tentang pentingnya Indonesia. Penulis yakin sampai kapanpun Australia akan menjalin hubungan pertahanan dan hubungan keamanan dengan Indonesia.

Keterhubungan Pertahanan Australia dan Indonesia dibuktikan dengan adanya penandatanganan beberapa MoU antara kedua Negara antara lain: *Memorandum of Understanding between Australia's AUSTRAC and Indonesia's financial intelligence unit, the PPATK on the exchange of financial intelligence* Februari 2004, *Memorandum of Understanding on Combating International Terrorism* pada Februari 2002 dan kemudian dilanjutkan pada Februari 2004, *Memorandum of Understanding on Legal Cooperation* Oktober 2000 dan *Memorandum of Understanding on Combating Transnational Crime and Developing Police Cooperation* Juni 2002.

Australia dan Indonesia juga terlibat dalam penyelenggaraan beberapa konferensi regional antara lain: *Regional Ministerial Meeting on Counter Terrorism*,

February 2004 di Bali, *Regional Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing* Desember 2002 di Bali dan *Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crim* pada Februari 2002 di Bali.

Bahkan PM terpilih Kevin Rudd dalam pernyataan keamanan nasional pertama didepan parlemen Australia pada 4 Desember 2008 juga menyatakan bahwa pertautan regional adalah krusial. Hal itu menandakan, Australia akan tetap terlibat hubungan pertahanan dengan negara-negara dikawasan regional termasuk dengan Indonesia. Sesuai dengan prioritas keamanan nasional Australia yaitu memperkuat kerjasama Australia dengan partner-partner regionalnya selain memajukan komunitas Asia-Pasifik, memperkuat aliansi dengan AS dan meningkatkan kemampuan pertahanan.

Bisa disimpulkan bahwa siapapun perdana menteriya dan berada dibawah partai apapun, Australia akan tetap memandang Indonesia sebagai prioritasnya dan sebagai negara yang penting dalam strategi pertahanannya. Prospek kerjasama pertahanan Australia dan Indonesia akan terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Adil, Hilman. (1997). *Kebijakan Australia terhadap Indonesia 1962-1966: Studi kasus keterlibatan Australia dalam konflik bilateral*, Jakarta: CSIS
- Buzan, Barry.(1997) *People, State & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, 2nd edition New York: Harvester Wheatsheaf.
- Departemen Penerangan RI.(1989). *Australia;Dinamika Hubungannya Dengan Indonesia*, Jakarta:Departemen Penerangan.
- Department of Defence.(2000). *Defence 2000: Our Future Defence Force*, Canberra: AGPS.
- Department of Defence.(2003). *Australia's National Security:A Defence Update 2003*, Canberra: AGPS.
- Departemen Pertahanan,(2003). *Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad 21;Buku Putih Pertahanan 2003*, Jakarta:Dephan.
- Departemen Pertahanan RI.(2005). *Menata Sistem Pertahanan;Kaji Ulang Pertahanan*, Jakarta: Dephan.
- Elizabeth, Adriana(Ed).(2004). *Kebijakan Bantuan Luar Negeri Australia kepada Indonesia*, Jakarta: P2P LIPI.
- Firth, Stewart.(2005). *Introduction to Australian Foreign Policy*, Crows Nest, N.S.W: Allen & Unwin.
- Lembaga Informasi Nasional.(2001). *Citra Indonesia:Kerjasama Asia Pasifik dan kerjasama Afrika dan Timur Tengah*,Jakarta: Jakarta: LIN.
- Sudarsono,Juwono.(1995). *Ekonomi,Politik dan Strategi* , Jakarta: Gramedia.
- Sukma, Rizal. (2002).*Konsep Keamanan Nasional*, Jakarta: CSIS

2. Jurnal

- Ayson, Robert.(2003). *Australian Defence and Security Challenge: A Tale of Three Posts*, *NZ International Review* January/February.
- Crowhurst, Brenton.* (1998). *The Australian-Indonesian Security Agreement: Where Did it Come From – Where is it Going?* *Australian Force Defence Journal* no.132 September-October 1998, Canberra: Department of Defence.

- Commonwealth of Australia.(2005). *Australia's National Security: A Defence Update 2005*, Canberra ACT:department of Defence.
- Commonwealth of Australia.(2007). *Australia's National Security: A Defence Update 2007*, Canberra ACT:department of Defence.
- Commonwealth of Australia.(2002). *Defence Annual Report 2001-2002*, Canberra ACT: Department of Defence.
- Commonwealth of Australia.(2003). *Defence Annual Report 2002-2003*, Canberra ACT: Department of Defence.
- Commonwealth of Australia.(2004). *Defence Annual Report 2003-2004*, Canberra ACT: Department of Defence.
- Commonwealth of Australia.(2005). *Defence Annual Report 2004-2004*, Canberra ACT: Department of Defence.
- Commonwealth of Australia.(2006). *Defence Annual Report 2005-2006*, Canberra ACT: Department of Defence.
- Commonwealth of Australia.(2007) *Defence Annual Report 2006-2007*, Canberra ACT: Department of Defence
- Commonwealth of Australia.(2008) *Defence Annual Report 2007-2008*, Canberra ACT: Department of Defence,
- Department of Defence Submission.(2003). *Building Australia's relation with Indonesia*, submission no.92, Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence and Trade Foreign Affairs Sub-Committee.

No. 33341

**AUSTRALIA
and
INDONESIA**

**Agreement on maintaining security. Signed at Jakarta on
18 December 1995**

Authentic texts: English and Indonesian.

Registered by Australia on 5 November 1996.

**AUSTRALIE
et
INDONÉSIE**

**Accord relatif au maintien de la sécurité. Signé à Jakarta le
18 décembre 1995**

Textes authentiques : anglais et indonésien.

Enregistré par l'Australie le 5 novembre 1996.

Vol. 1945, I-33341

[INDONESIAN TEXT — TEXTE INDONÉSIEN]

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH AUSTRALIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMELIHARAAN KEAMANAN

PEMERINTAH AUSTRALIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
(selanjutnya disebut sebagai "para Pihak"),

BERHASRAT untuk memperkuat hubungan persahabatan yang ada di antara kedua Pihak;

MENGAKUI kepentingan bersama atas perdamaian dan stabilitas di kawasan;

BERHASRAT untuk menyumbang pada keamanan dan stabilitas kawasan dengan tujuan menjamin keadaan dimana aspirasi kedua pihak dapat diwujudkan sebaik-baiknya demi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara masing-masing dan kawasan;

MENEGASKAN KEMBALI penghormatan terhadap kedaulatan, kebebasan politik, dan kesatuan wilayah dari semua negara;

MENEGASKAN KEMBALI komitmen terhadap penyelesaian semua perselisihan internasional melalui cara-cara damai sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan hukum internasional;

MENGAKUI bahwa masing-masing Pihak mempunyai tanggung jawab utama atas keamanannya sendiri;

MENYADARI sumbangan yang dapat diberikan kepada keamanan masing-masing dan keamanan kawasan melalui kerjasama dalam mengembangkan kemampuan nasional yang efektif di bidang pertahanan serta ketahanan nasional dan kemandirian;

MENCATAT bahwa tidak ada satu halpun dalam Persetujuan ini yang mempengaruhi komitmen-komitmen internasional yang ada dari salah satu Pihak;

MAKA DENGAN INI MENYETUJUI sebagai berikut:

PASAL 1

Para Pihak sepakat untuk saling melakukan konsultasi pada tingkat Menteri secara berkala mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi keamanan bersama serta mengembangkan kerjasama sedemikian rupa yang dapat menguntungkan keamanan masing-masing dan kawasan.

PASAL 2

Para Pihak sepakat untuk saling melakukan konsultasi dalam hal terjadinya tantangan yang merugikan terhadap salah satu Pihak atau terhadap kepentingan keamanan bersama dan, apabila layak, mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tata cara masing-masing Pihak.

PASAL 3

Para Pihak setuju untuk meningkatkan - sesuai dengan kebijakan dan prioritas masing-masing - kegiatan kerjasama yang menguntungkan kedua belah Pihak di bidang keamanan dalam lingkup yang akan ditentukan oleh kedua belah Pihak.

PASAL 4

Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir dari salah satu Pihak tentang telah dipenuhinya persyaratan-persyaratan untuk pemberlakuan Persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa penuh Pemerintah masing-masing, telah menanda-tangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal delapan belas bulan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Untuk Pemerintah
Australia:



GARETH EVANS
Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah
Republik Indonesia:



ALI ALATAS
Menteri Luar Negeri

DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE
CANBERRA

**AGREEMENT BETWEEN
AUSTRALIA
AND
THE REPUBLIC OF INDONESIA
ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION**

Mataram, Lombok: 13 November 2006

**Not yet in force
[2006] ATNIF 25**

**AGREEMENT
BETWEEN AUSTRALIA AND THE REPUBLIC OF INDONESIA ON THE
FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia (hereinafter referred to as the 'Parties')

Reaffirming the sovereign equality of the Parties, their faith in the purposes and principles of the Charter of the United Nations and their desire to live in peace with all peoples and all governments;

Reaffirming the commitment to the sovereignty, unity, independence and territorial integrity of both Parties, and the importance of the principles of good neighbourliness and non-interference in the internal affairs of one another, consistent with the Charter of the United Nations;

Recognising that both Parties are democratic, dynamic and outward-looking members of the region and the international community;

Recognising also the new global challenges, notably from international terrorism, traditional and non-traditional security threats;

Recognising further the importance of continued and enhanced cooperation in meeting the challenges posed by international terrorism and transnational crime;

Determined to work together to respond to these new challenges and threats;

Determined also to maintain and strengthen bilateral cooperation and regular dialogue including established regular discussions on strategic, defence, intelligence, law enforcement and other matters;

Determined further to maintain and strengthen the long-standing political, economic, social and security cooperation which exist between the two Parties, and their common regional interests and ties, including the stability, progress and prosperity of the Asia-Pacific region;

Recognising the value of bilateral agreements and arrangements between the two countries since 1959 including the major bilateral instruments on security that have provided a strong legal framework for both countries in dealing with various security threats and issues as well as the importance of existing dialogues and cooperation through the Indonesia Australia Ministerial Forum (IAMF);

Emphasizing also the importance of working together through regional and international fora on security matters to contribute to the maintenance of international peace and security;

Determined to comply in good faith with their obligations under generally recognized principles and rules of international law;

Adhering to their respective laws and regulations;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1 PURPOSES

The main objectives of this Agreement are:

1. to provide a framework for deepening and expanding bilateral cooperation and exchanges as well as to intensify cooperation and consultation between the Parties in areas of mutual interest and concern on matters affecting their common security as well as their respective national security.
2. to establish a bilateral consultative mechanism with a view to encouraging intensive dialogue, exchanges and implementation of cooperative activities as well as strengthening institutional relationships pursuant to this Agreement.

ARTICLE 2 PRINCIPLES

In their relations with one another, the Parties shall be guided by the following fundamental principles, consistent with the Charter of the United Nations,

1. Equality, mutual benefit and recognition of enduring interests each Party has in the stability, security and prosperity of the other;
2. Mutual respect and support for the sovereignty, territorial integrity, national unity and political independence of each other, and also non-interference in the internal affairs of one another;
3. The Parties, consistent with their respective domestic laws and international obligations, shall not in any manner support or participate in activities by any person or entity which constitutes a threat to the stability, sovereignty or territorial integrity of the other Party, including by those who seek to use its territory for encouraging or committing such activities, including separatism, in the territory of the other Party;
4. The Parties undertake, consistent with the Charter of the United Nations, to settle any disputes that might arise between them by peaceful means in such a manner that international peace, security and justice are not endangered;

5. The Parties shall refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of the other, in accordance with the UN Charter;
6. Nothing in this Agreement shall affect in any way the existing rights and obligations of either Party under international law.

ARTICLE 3 AREAS AND FORMS OF COOPERATION

The scope of cooperation of this Agreement shall include:

Defence Cooperation

In recognition of the long-term mutual benefit of the closest professional cooperation between their Defence Forces,

1. Regular consultation on defence and security issues of common concern; and on their respective defence policies;
2. Promotion of development and capacity building of defence institutions and armed forces of both Parties including through military education and training, exercises, study visits and exchanges, application of scientific methods to support capacity building and management and other related mutually beneficial activities;
3. Facilitating cooperation in the field of mutually beneficial defence technologies and capabilities, including joint design, development, production, marketing and transfer of technology as well as developing mutually agreed joint projects.

Law Enforcement Cooperation

In recognition of the importance of effective cooperation to combat transnational crime that impacts upon the security of both Parties,

4. Regular consultation and dialogue aimed at strengthening the links between institutions and officials at all levels;
5. Cooperation to build capacity of law enforcement officials to prevent, respond to and investigate transnational crime;
6. Strengthening and intensifying police to police cooperation including through joint and coordinated operations;
7. Cooperation between relevant institutions and agencies, including prosecuting authorities, in preventing and combating transnational crimes, in particular crimes related to:

- a. People smuggling and trafficking in persons;
- b. Money laundering;
- c. Financing of terrorism;
- d. Corruption;
- e. Illegal fishing;
- f. Cyber-crimes;
- g. Illicit trafficking in narcotics drugs and psychotropic substances and its precursors;
- h. Illicit trafficking in arms, ammunition, explosives and other dangerous materials and the illegal production thereof; and
- i. Other types of crime if deemed necessary by both Parties.

Counter-terrorism Cooperation

In recognition of the importance of close and continuing cooperation to combat and eliminate international terrorism through communication, cooperation and action at all levels,

8. Doing everything possible individually and jointly to eradicate international terrorism and extremism and its roots and causes and to bring those who support or engage in violent criminal acts to justice in accordance with international law and their respective national laws;
9. Further strengthening cooperation to combat international terrorism including through rapid, practical and effective responses to terrorist threats and attacks; intelligence and information sharing; assistance to transport security, immigration and border control; and effective counter-terrorism policies and regulatory frameworks;
10. Strengthening cooperation in capacity building in law enforcement, defence, intelligence and national security in order to respond to terrorist threats;
11. Cooperation, when requested and where possible, in facilitating effective and rapid responses in the event of a terrorist attack. In this regard, the requesting Party shall have primary responsibility for the overall direction, organization and coordination for such situation.

Intelligence Cooperation

12. Cooperation and exchange of information and intelligence on security issues between relevant institutions and agencies, in compliance with their respective national legislation and within the limits of their responsibility.

Maritime Security

13. Strengthening bilateral cooperation to enhance maritime safety and to implement maritime security measures, consistent with international law;

14. Enhancing existing Defence and other cooperation activities and capacity building in the area of aerial and naval maritime security in accordance with international law.

Aviation Safety and Security

15. Strengthening bilateral cooperation in the field of capacity building to enhance civil aviation safety and security.

Proliferation of Weapons of Mass Destruction

In recognition of the Parties' shared commitment not to develop, produce, otherwise acquire, stockpile, retain or use nuclear weapons or other weapons of mass destruction,

16. Co-operate to enhance measures for preventing the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery including through strengthened national export controls in accordance with their respective national laws as well as international law;
17. Strengthening bilateral nuclear cooperation for peaceful purposes, including to further the objective of non-proliferation of weapons of mass destruction and strengthen international nuclear safety and security through enhanced standards, in accordance with international law.

Emergency Cooperation

18. Cooperation, as appropriate and as requested, in facilitating effective and rapid coordination of responses and relief measures in the event of a natural disaster or other such emergency. The Party requesting the assistance shall have primary responsibility for determining the overall direction for emergency response and relief operation;
19. Cooperation in capacity building for disaster preparedness and response.

Cooperation in International Organizations on Security-Related Issues

20. Consultation and cooperation on matters of shared interest on security related issues in the United Nations, other international and regional bodies.

Community Understanding and People-to-People Cooperation

21. Endeavoring to foster contacts and interaction between their respective institutions and communities with a view to improving mutual understanding of security challenges and responses to them.

ARTICLE 4 CONFIDENTIALITY

1. The Parties shall protect confidential and classified information received pursuant to the framework of this Agreement in accordance with their respective national laws, regulations and policies.
2. Notwithstanding Article 10, should this Agreement terminate, each Party shall continue to comply with the obligation set out in paragraph 1 to information to which it had access under the Agreement.

ARTICLE 5 INTELLECTUAL PROPERTY

The Parties agree that any intellectual property arising under the implementation of this Agreement shall be regulated under separate arrangement.

ARTICLE 6 IMPLEMENTING MECHANISM

1. The Parties shall take any necessary steps to ensure effective implementation of this Agreement, including through conclusion of separate arrangements on specific areas of cooperation.
2. For the purpose of this Article, the Parties shall meet on a regular basis under the existing mechanism of the Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF) to review and give direction to the activities under this Agreement.

ARTICLE 7 FINANCIAL ARRANGEMENT

Any expenses incurred in the implementation of this Agreement will be met by the Party incurring the expense, unless otherwise mutually decided.

ARTICLE 8 SETTLEMENT OF DISPUTES

Disputes arising in relation to the interpretation on implementation of this Agreement shall be settled amicably by mutual consultation or negotiation between the Parties.

ARTICLE 9 AMENDMENT

This Agreement may be amended in writing by mutual consent by both Parties. Any amendment to this Agreement shall come into force on the date of later notification by either Party of the completion of its ratification procedure for the amendment.

ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. The Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last notification by which the Parties notify each other that their internal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.
2. This Agreement shall remain in force until one Party gives written notice of its intention to terminate it, in which case this Agreement shall terminate six months after receipt of the notice of termination.
3. Termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any arrangement made under the present Agreement until the completion of such arrangement, unless otherwise decided by mutual consent.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Lombok on this thirteenth day of November in the year of two thousand and six, in 2 (two) original copies in both English and Indonesian languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in the interpretation, the English text shall prevail.

**For the Government of
Australia:**

**For the Government of the
Republic of Indonesia:**

Alexander Downer
Minister for Foreign Affairs

Dr Hassan Wiryuda
Minister for Foreign Affairs

**JOINT STATEMENT
BETWEEN
THE INDONESIAN NATIONAL DEFENCE FORCE
AND
THE AUSTRALIAN DEFENCE FORCE
ON
INDONESIA-AUSTRALIA DEFENCE COOPERATION**

The Commander in Chief of the Indonesian National Defence Force and Chief of the Australian Defence Force state:

This Joint Statement between the Indonesian National Defence Force (INDF) and the Australian Defence Force (ADF) affirms our intent to further cooperation through the development and management of the bilateral defence relationship.

Noting : The Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation (the Lombok Treaty), which entered into force on 7 February 2008;

Noting : That the bilateral defence relationship between Indonesia and Australia has developed significantly in recent years, building on a foundation of mutual respect and trust;

Noting : The mutually determined priority areas of common strategic interest focusing on Counter Terrorism, Maritime Security, Intelligence, Humanitarian Assistance and Disaster Relief, and Peacekeeping;

Noting : The mutually beneficial practical cooperation that is occurring in these areas, including dialogue, exercises, training, education and personnel exchanges; and

Determined : To further strengthen the defence relationship;

And take the opportunity to affirm this Statement in relation to the management framework for defence engagement between Indonesia and Australia and express our intent to develop further practical initiatives of mutual interest as follows:

Management Framework

The defence relationship will remain consistent with and under the guidance of bilateral government to government and ministerial understandings. Defence engagement policies flowing from this guidance will be managed through annual dialogue. Single-service dialogues and respective engagement programs will be based on priorities mutually determined at the annual dialogue. All engagement programs will be developed, or updated, and endorsed by the INDF and the ADF in accordance with their respective forward engagement planning cycles.

Initiatives

[This section refers to ongoing discussion on an administrative issue and will also be released once the issue is finalised.]

Counter - Terrorism

Further strengthen counter-terrorism cooperation between the INDF and the ADF to the extent of developing counter-terrorism response capabilities able to operate independently, or together if necessary and, as mutually determined, to protect common interests. Training and assistance activities that would contribute to this objective include:

- Holding combined counter-terrorism scenario – based planning exercises;
- The conduct of bilateral counter-terrorism seminars to exchange information, build confidence; and
- Other activities as mutually arranged.

Maritime Security

Develop cooperative mechanisms to enhance maritime security in mutually determined areas of common interest. Training and assistance activities that would contribute to this objective include:

- The conduct of a maritime security desktop activity, occurring as mutually determined, to address maritime aspects of transnational crime and to develop command and control concepts and procedures at an inter-agency level;
- The conduct on an ongoing basis of coordinated patrols against criminal threats, and as mutually arranged; and
- Regular contact through communication links between the ADF Headquarters, the INDF Headquarters, and other relevant headquarters as appropriate. These communication links and information sharing regimes will be developed as a matter of priority.

Intelligence

Establish a program of intelligence cooperation that will underpin cooperative security activities, provide a mechanism to exchange information of mutual interest, and develop collaborative analysis and assessment on topics of mutual interest such as counter-terrorism. Training and assistance activities that would contribute to this objective include :

- Holding intelligence exchanges and visits, exploring mutually beneficial opportunities to conduct interagency information exchanges, training assistance, and technology enhancement.

Humanitarian Assistance/Disaster Relief

Establish standing operating procedures for combined HA/DR operations and support to HA/DR. Training and assistance activities that would contribute to this objective include:

- Identifying mutually beneficial opportunities for training and information exchanges;
- Developing a Mutual Logistics Support Arrangement (MLSA) to streamline mutual support between the ADF and the INDF during HA/DR operations and exercises; and
- Conducting a bilateral Australian-Indonesian disaster relief desk top exercise.

Peacekeeping

Collaborate on peacekeeping matters including open and regular exchange of lessons learned and assistance with training and doctrine development, including :

- Developing information exchanges on lessons learned and the development of pre-deployment briefings in support of peacekeeping operations;
- Providing training opportunities such as military observer courses and military law courses; and
- The provision of support, as mutually agreed, for development of the INDF Peacekeeping Centre.

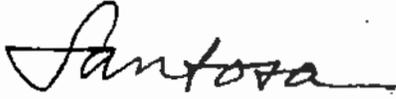
Other matters

Misunderstandings or deviations in the implementation of this Joint Statement should be resolved through coordination between both sides.

Ending Statement

A strong and robust bilateral defence relationship between the INDF and the ADF is of major strategic value to both Indonesia and Australia. This Statement on Indonesia-Australia Defence Cooperation supports and promotes the development of the outcomes we desire to strengthen the already strong relationship between the INDF and the ADF for the mutual benefit of both. This Statement is consistent with the intent of the Lombok Treaty.

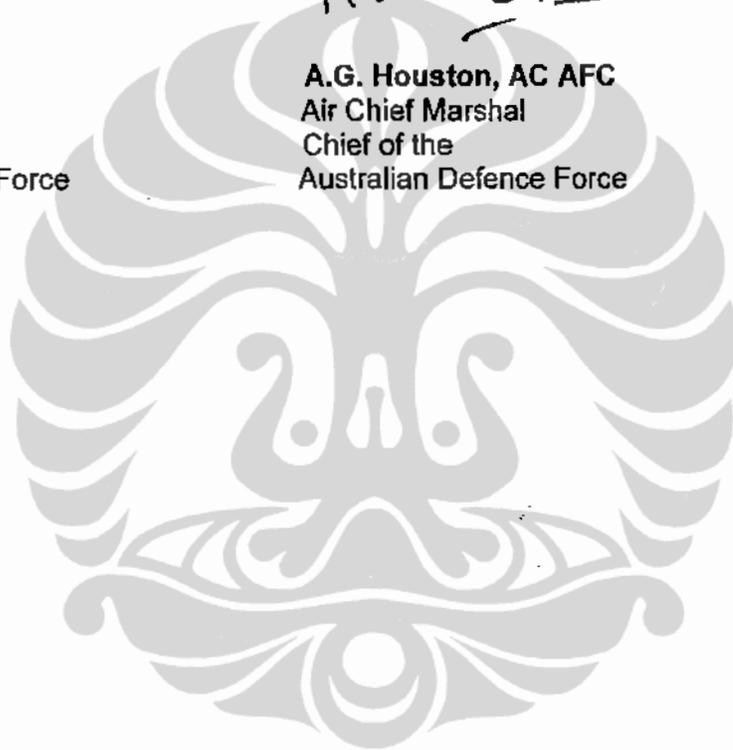
Signed at Jakarta on this 12th day of January in the year 2009, in two original copies in the English language and two original copies in the Indonesian Language.



Djoko Santoso
General
Commander in Chief of the
Indonesian National Defence Force



A.G. Houston, AC AFC
Air Chief Marshal
Chief of the
Australian Defence Force



APPENDIX 1

DCP ASSISTANCE TO ASEAN COUNTRIES

	Malaysia \$M	Singapore (A) \$M	Indonesia (B) \$M	Thailand (C) \$M	Philippines (C) \$M	Others (Asia/Africa) \$M	Total \$M
1963/64	0.144	-	-	-	-	0.072	0.144
1964/65	3.376	-	-	-	-	0.011	3.376
1965/66	5.034	-	-	-	-	0.006	5.034
1966/67	7.563	0.473	-	-	-	0.010	8.036
1967/68	4.998	1.098	-	-	-	0.034	6.096
1968/69	4.620	1.623	-	-	-	0.247	6.243
1969/70	6.520	1.683	-	-	-	0.114	8.203
1970/71	3.540	1.453	-	-	-	0.412	4.993
1971/72	3.705	0.522	-	-	-	4.227	4.227
1972/73	5.523	0.917	3.763	0.006	0.022	0.072	10.303
1973/74	3.986	1.158	5.108	0.024	0.031	0.011	10.318
1974/75	3.931	1.262	5.565	0.032	0.031	0.006	10.827
1975/76	4.038	0.723	6.259	0.025	0.044	0.010	11.099
1976/77	3.892	0.699	6.596	0.031	0.077	0.034	11.329
1977/78	4.050	0.551	7.209	0.027	0.078	0.023	11.938
1978/79	3.963	0.394	7.183	0.053	0.090	0.048	11.731
1979/80	2.876	0.699	9.589	0.107	0.804	0.087	14.162
1980/81	3.909	1.175	11.935	0.650	1.161	0.247	19.077
1981/82	3.954	1.236	8.627	1.206	1.917	0.114	17.054
1982/83	4.859	1.594	10.184	3.839	1.520	0.412	22.408
Total	84.481	17.260	82.018	6.000	5.775	1.064	196.598

(A) Included in DCP with Malaysia until 1966/67

(B) Limited expenditure on Indonesia was included in the votes of the Defence and Service Departments 1968-72.

(C) Assistance to Thailand and Philippines charged to SEATO Aid under Department of Foreign Affairs funds prior to 1972/73.

SOURCE: Submission No. 25 - Department of Defence.

AUSTRALIAN ADVISERS ON LOANS AS AT 31 MARCH 1983

Country	Civilian	Navy	Army	Air Force	Total
Malaysia	2	-	13	-	15
Indonesia	2	1	2	2	7
Papua New Guinea	3	18	65	22	*108
Thailand	3	-	-	-	3
Singapore	-	1	-	5	6
Fiji	-	2	1	-	3
Tonga	-	2	1	1	4
Solomon Islands	-	1	-	-	1
Vanuatu	-	1	4	-	5
Philippines	-	-	8	-	8
Sub Totals	10	26	94	30	160

* In addition to the above, there were personnel serving with Army Engineer and Survey units based in PNG, one Army Communications Officer with the Royal Papua New Guinea Constabulary and Australian Defence Force personnel undertaking administrative work connected with the DCP in the Australian High Commission, Port Moresby - a total of 41 at 31 March 1983.

SOURCE: Submission No. 25 - Department of Defence.

APPENDIX 5

TRAINING AND STUDY VISITORS TO AUSTRALIA UNDER THE DCP

	Malaysia	Philippines	Thailand	Singapore	Indonesia	Fiji	PNG	Tonga	Solomon Islands	Vanuatu	Other Countries	Total
1963	21	6	6									27
1964	33	4	6	2								43
1965	104	3	2	2								111
1966	118	2	5	-								125
1967	128	2	1	7							138	138
1968	110	2	1	13	1							127
1969	162	3	4	24	21							214
1970	290	4	6	14	43							357
1971	306	-	2	24	91							423
1972	268	7	8	21	240	1						545
1973	294	10	8	9	164	6						491
1974	304	13	11	8	141	12						489
1975	205	17	18	13	126	22	229					630
1976	363	27	8	15	81	30	104				4	632
1977	290	13	9	52	47	24	133				2	570
1978**	346	25	11	28	81	39	161	7	1		7	706

	Malaysia	Philippines	Thailand	Singapore	Indonesia	Fiji	PNG	Tonga	Solomon Islands	Vanuatu	Other Countries	Total
1978/ 79**	268 (9)*	31 (11)	15 (4)	25 (3)	63 (26)	11 (9)	95 (-)	- (1)	4 (-)		5	517 (63)
1979/ 80	204 (34)	34 (6)	21 (8)	35 (6)	60 (21)	19 (-)	110 (12)	7 (5)	1 (-)		8	499 (98)
1980/ 81	491 (30)	103 (12)	34 (60)	52 (27)	43 (27)	29 (4)	190 (3)	10 (1)	5 (1)		15	972 (173)
1981/ 82	651 (30)	87 (11)	82 (38)	64 (5)	66 (28)	43 (2)	208 (10)	11 (2)	12 (2)	(1)	9	1233 (131)
1982/ 83	406 (9)	112 (7)	63 (47)	64 (9)	80 (11)	39 (3)	185 (12)	16 (5)	14 (3)		38	1017 (122)

98

Footnotes:

* The figures in brackets represent the number of study visits in that year.

** Prior to 1978 training was done on a calendar year basis, there is some overlap of the 1978 and the 1978/79 figures.

SOURCE: Submission No. 25 - Department of Defence.

DEFENCE CO-OPERATION WITH INDONESIA

(All figures in \$m)

	71/72	72/73	73/74	74/75	75/76	76/77	77/78	78/79	79/80	80/81	81/82	82/83	83/84
Additional Attack Class Patrol Boats												1.733	2.375
Air Navigation Training classrooms			0.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instrument flying trainers			0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Research and Development Stage 2												0.070	0.103
Anti-Malaria Assistance												0.016	0.001
Manad 100 Hourly Menado												0.157	0.044
T56 Aircraft Engines												0.027	0.017
TNI-AU Navvaides/Comms/Avionics												0.015	0.004
Mobile Air Photo Lab.												0.017	0.004
Perret Engines												0.008	-
Titan Boats												0.217	0.067
Communications/Electronics Project												0.035	0.041
Manad 100 Hourly Ambon													0.253

DEFENCE CO-OPERATION WITH INDONESIA
(All figures in \$m)

	71/72	72/73	73/74	74/75	75/76	76/77	77/78	78/79	79/80	80/81	81/82	82/83	83/84
Nomad 100 Hourly Sabang													0.247
Sioux Helicopter Stage 3													0.782
Computer Training Centre													0.036
TNI-AD Helicopter Maintenance													0.014
AMBAL Proving Ground													0.030
Projects Mobile Workshop					0.024	-	-	-	-	-	-	-	-
Combined Exercises						0.075	-	-	-	-	-	-	-
Dart Electronic Target Ranges	0.078	0.551	0.232	0.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dental Equipment			0.022	0.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INDONESIA	3.402	4.572	5.397	6.076	6.596	7.209	7.183	9.588	11.935	8.627	10.184	8.902	

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN ATASE PERTAHANAN BRIGADIER IAN ERRINGTON DAN PENASEHAT KEAMANAN PAUL IOZZI

I: Can you explain about the background of your defence cooperation with Indonesia?

AP: In fact, we have conducted our defence relation with Indonesia along time ago. But we didn't make it in a formal agreement. Our relation with Indonesia started when Indonesia got their independence. We help Indonesia and also support Indonesia in international forum. You have to look back to our relation history.

I: I've read on some books that Australia has started their defence cooperation with Indonesia in 1968. Is that right?

AP: Yes, that's right but like I've said before that we didn't make it on a formal agreement. Yes, we did joint exercises and some personnel exchange. We focused on military relation. The real agreement is Agreement of Maintaining security that signed by both foreign minister in 1995.

PK: I want to add that in 1990, there was a defence cooperation program that Australia give to Indonesia including different maritime exercises, logistic support and some college students exchange. I mean, the defence cooperation was existed long time before but on nonformal activities. You can find the defence report on our website but you will find the data from 1997-1998 period. Some of data were old data.

AP: Taking about defence relation, first we have to remember about the misperception that Indonesia did. First, Australia never interfere in Timor conflict and it was Habibie's decision. Second, not Australia who interfere in Indonesian problem especially for Timor Leste but United Nations did it. Third, even though there was a conflict between Australia and Indonesia after pooling in Timor Leste, the defence relation between ADF and TNI still exist. The support from Australia when Indonesia d their independence became a strong fundamental for our defence relation. We confirmed that whatever the problems appeared, we still have a defence relation because we can sit and talk to discuss the problem.

I: What is the objective of your defence cooperation?

AP: We want to build a confident and trust between two countries after Timor conflict. We also want to reestablish our relation and redevelop our commitment. For the objective of our defence cooperation program, you can see in our defence annual book, we always publish it on our website.

I: What is the important of Indonesia according to your country?

AP: You can see from our defence white paper, Indonesia is a regional stabilisator for the region that good for Australia. Indonesia also a large country with high population.

I: How about Lombok Treaty in 2006, is there a relation with AMS 1995?

AP: Lombok Treaty is a highest formal agreement between Australia and Indonesia which is signed in 2006. it was a security cooperation, it was similar form with AMS but this agreement is wider than AMS 1995. in LT, the agreement is defined into some level cooperation including defence cooperation, law reinforcement maritime security, combating terrorism, intelligence cooperation, transportation safety and security, WMD, situation cooperation, cooperation with international organization related to security problems. But there is no relation between AMS 1995 and Lombok Treaty.

PK: AMS 1995 was not too wide, it was totally different with Lombok Treaty because we can see many cooperation included in this agreement like Mr.Ian said. We support the new security agreement because it can maintaining both our countries security and also strengthen the mutual trust.

I: As I have read before about your DCP in 1999-2000 period, it was decreased. Can you explain the reason?

PK: Yes, you're right. It was because there were some high activities in East Timor. We totally supported all activities there included fund and military aid. But you can see. There was still a DCP fund even it was decreased.

I: I could't find some information about the annual defence report before 1997 even on your website.

PK: Yes, some of data were old data so you're lucky if you can find it or perhaps you can send email to the authorized institution and ask for the data.

I: How about the defence strategic dialogue between Australia and Indonesia?

AP: The defence strategic dialogue is one of bilateral defence relation. It started in 2001 and still continue until now. There is an official exchange, informal meetings, discussion and also a cooperation among armies. In fact, we started the dialogue first and then we make a treaty.

PK: I think the strategic defence dialogue is one of the ways to enhance mutual trust between two countries. The dialogue started in 2001 after WTC case and two countries have discussed about the non traditional threats such as terrorism. After Bali Bombing, Australia continue his defence cooperation with Indonesia on combating terrorism.

I: What do you think about that strategic dialogue? Will it continue?

AP: Yes, I'm sure that it will continue because the dialogue is very important for both of us. We talk and share about the defence strategy, maritime security, exchange students and everything that can enhance our defence relation.

PK: I agree with Mr.Ian. Th dialogue will keep continue. I think it can strengthen our security and defence relation.

AP: I will explain about the mechanism of Lombok Treaty.

Lombok treaty is a security agreement and defence, defence cooperation is a part of it. In defence cooperation, there will be IADSD(it is an implementation of joint statement)

then the two countries signed a joint Statement on defence cooperation who signed by both Army Commander. The joint statement focuses on the military talk between two army, ADF and TNI and also defence cooperation between two countries. But Australia though that it was not legally binding. So based on the mechanism, yes of course, through the three of it, we decide to make a defence cooperation agreement between two countries. But it is still on negotiating process.

PK: So Lombok Treaty becomes a very important sign for Australia and Indonesia. It is legal umbrella for both countries and we will enhance our defence relation under the Lombok Treaty. It will be important for our defence cooperation agreement that still negotiating until now.



I: